



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
kemdikbud.go.id

2020

LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



**Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270**



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
kemdikbud.go.id

2020

LAPORAN KINERJA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Kemdikbud.RI



kemdikbud.ri



kemdikbud.ri



KEMDIKBUD_RI



KEMENDIKBUD RI

Kata Pengantar

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, “Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020” dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program dan kegiatan dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tahun 2020, Kemendikbud menetapkan lima sasaran strategis dengan 26 indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dilaksanakan oleh sembilan unit Eselon I dan 344 Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2020.

Laporan Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Kemendikbud serta rencana aksi ke depan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang telah diidentifikasi selama tahun 2020.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan serta menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan program dan anggaran, peningkatan tata kelola Kemendikbud, serta peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Kemendikbud Tahun 2020.

Jakarta, Februari 2021
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Nadiem Anwar Makarim



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Bab 1. Pendahuluan	1
Bab 2. Perencanaan Kerja	7
Bab 3. Akuntabilitas Kinerja	15
Bab 4. Penutup	117
Lampiran	121

- Daftar Isi iv
- Daftar Singkatan v
- Ikhtisar Eksekutif xi



Daftar Singkatan

#

3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan/Daerah Perbatasan)

A

ADik (Afirmasi Pendidikan Tinggi)

AKM (Asesmen Kompetensi Minimum)

APE (Alat Peraga Edukatif)

APK (Angka Partisipasi Kasar)

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)

ATS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah)

B

BA (Bustanul Athfal)

BBPPMPV (Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi)

BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing)

BMN (Barang Milik Negara)

BALITBANGBUK (Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan)

BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)

BKK (Bursa Kerja Kursus)

BOP (Bantuan Operasional Penyelenggaraan)

BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)

BPS (Badan Pusat Statistik)

BPP BAHASA (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa)

BPNB (Balai Pelestarian Nilai dan Budaya)

BB (Belum Berkembang)

BSB (Berkembang Sangat Baik)

BSH (Berkembang Sesuai Harapan)

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

BP PAUD DIKMAS (Badan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Masyarakat)

C

CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan)

CB (Cagar Budaya)

COVID (*Coronavirus Disease*)

CEO (*Chief Executive Officer*)

CDIs (*Culture Development Indicators*)

CSR (*Corporate Social Responsibility*)

COE (*Center of Excellence*)

D

DAK (Dana Alokasi Khusus)

DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran)

DITJEN VOKASI (Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi)

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DAPODIK (Data Pokok Pendidikan)

G

GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan)

GSMS (Gerakan Seniman Masuk Sekolah)

I

IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)

ILM (Iklan Layanan Masyarakat)

IKSS (Indikator Kinerja Sasaran Strategis)

INAP (*Indonesia National Assesment Program*)

IT (*Information Technology*)

ITJEN (Inspektorat Jenderal)

IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)

K

KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)

KIP (Kartu Indonesia Pintar)

KEMENDIKBUD (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

KemenPAN dan RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

KEPMENDIKBUD (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

L

LKE (Lembar Kerja Evaluasi)

LMS (*Learning Management System*)

LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan)

M

MB (Mulai Berkembang)

MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)

MI (Madrasah Ibtidaiyah)

MA (Madrasah Aliyah)

MTS (Madrasah Tsanawiyah)

MoLK (Monitoring Laporan Keuangan)

MOOC (*Massive Open Online Course*)

N

NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional)

O

OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*)

P

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

PGB (Program Guru Belajar)

PKB (Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)

PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri)

PISA (*Programme for International Student Assessment*)

PIP (Program Indonesia Pintar)

PPK (Penguatan Pendidikan Karakter)

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

PNS (Pegawai Negeri Sipil)

PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah)

PT (Perguruan Tinggi)

PTN (Perguruan Tinggi Negeri)

PT VOKASI (Perguruan Tinggi Vokasi)

PUSAKA (Pekan untuk Sahabat Karakter)

P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan)

PKG (Pengukuran Kompetensi Guru)

PKN (Pekan Kebudayaan Nasional)

PKK (Pendidikan Kecakapan Kerja)

PKW (Pendidikan Kecakapan Wirausaha)

PMZI (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas)

PMPRB (Pedoman Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)

PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru)

PPG (Pendidikan Profesi Guru)

PP-PAUD DIKMAS (Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Masyarakat)

PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

R

RA (Raudatul Athfal)

RBI (Reformasi Birokrasi Internal)

RENSTRA (Rencana Strategis)

RKB (Ruang Kelas Baru)

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)

S

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)

SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional)

SD (Sekolah Dasar)

SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa)

SDM (Sumber Daya Manusia)

SIMKeu (Sistem Informasi Monitoring Keuangan)

SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)

SMP (Sekolah Menengah Pertama)

SMPLB (Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa)

SMA (Sekolah Menengah Atas)

SMALB (Sekolah Menengah Atas Luar Biasa)

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)

SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri)

SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri)

SPI (Satuan Pengawasan Internal)

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

SPM (Standar Pelayanan Minimal)

SS (Sasaran Strategis)

T

TEFA (*Teaching Factory*)

TK (Taman Kanak-Kanak)

TPA (Tes Prestasi Akademik)

U

UAPPA/B-E1 (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I)

UAPA/B (Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang)

UKBI (Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia)

UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

ULT (Unit Layanan Terpadu)

UKT (Uang Kuliah Tunggal)

UN (Ujian Nasional)

USB (Unit Sekolah Baru)

W

WBTB (Warisan Budaya Tak Benda)

WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

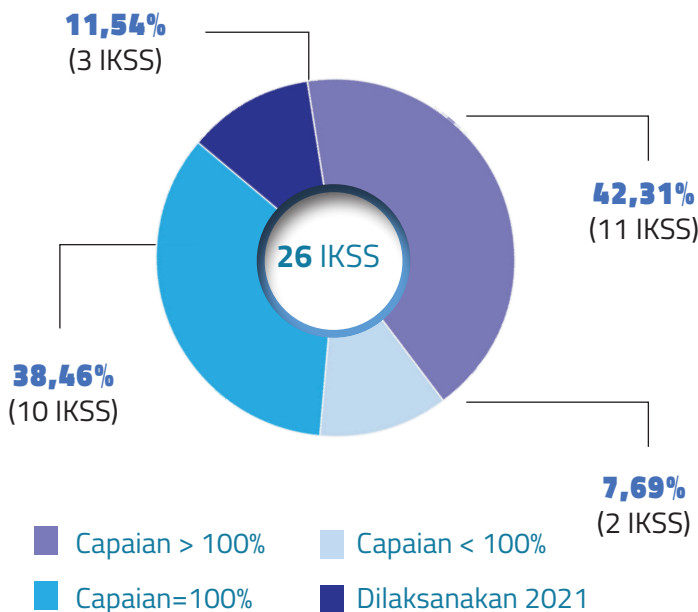
Z

ZI-WBK/WBBM (Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)

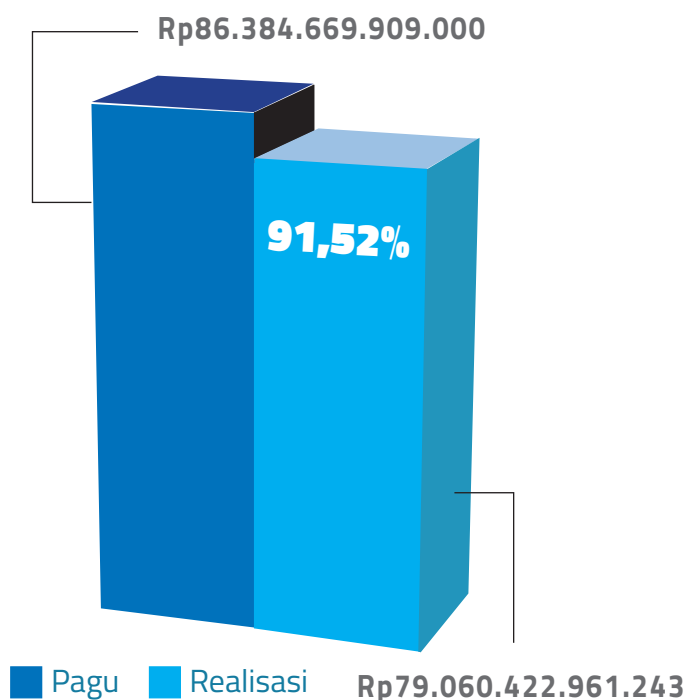


Ikhtisar Eksekutif

Capaian Kinerja 92%



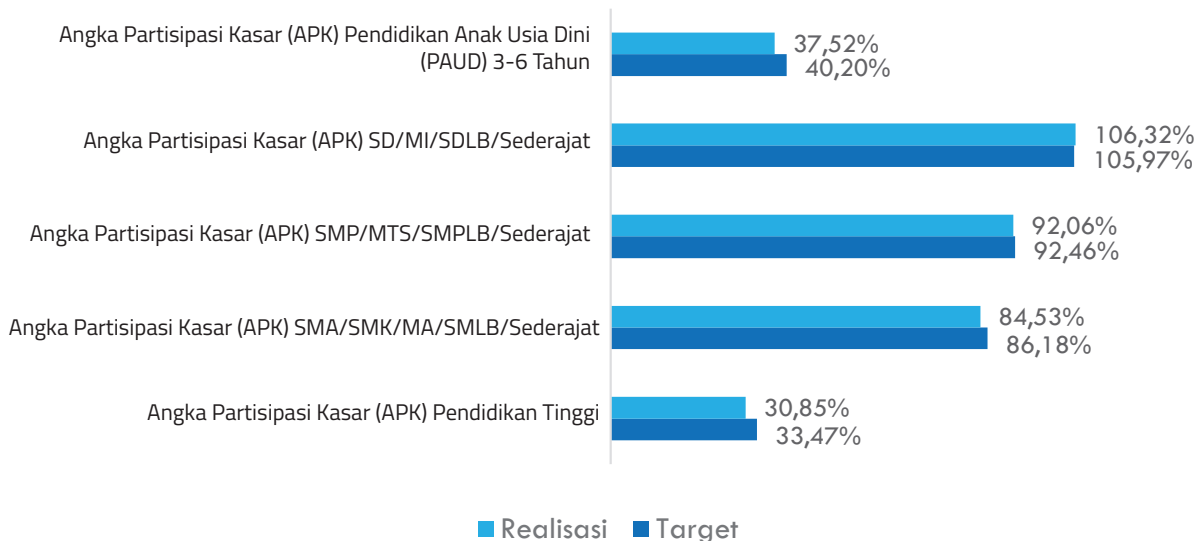
Penyerapan Anggaran



Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang

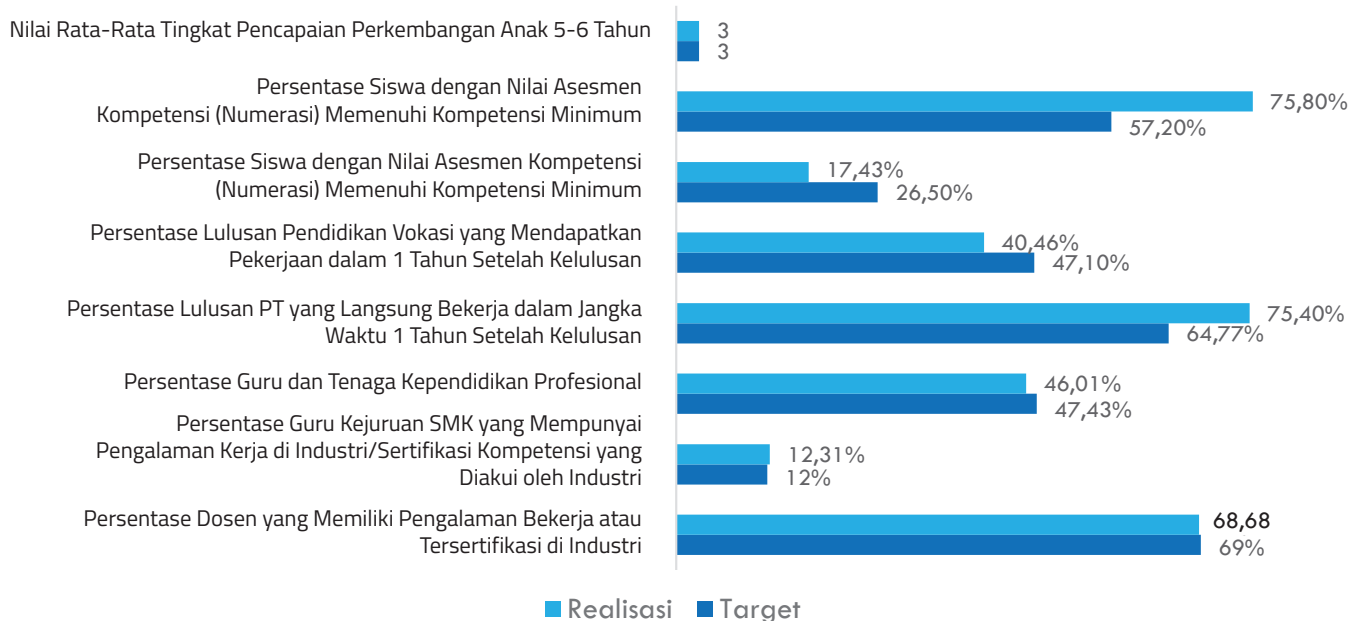
Realisasi IKSS



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang

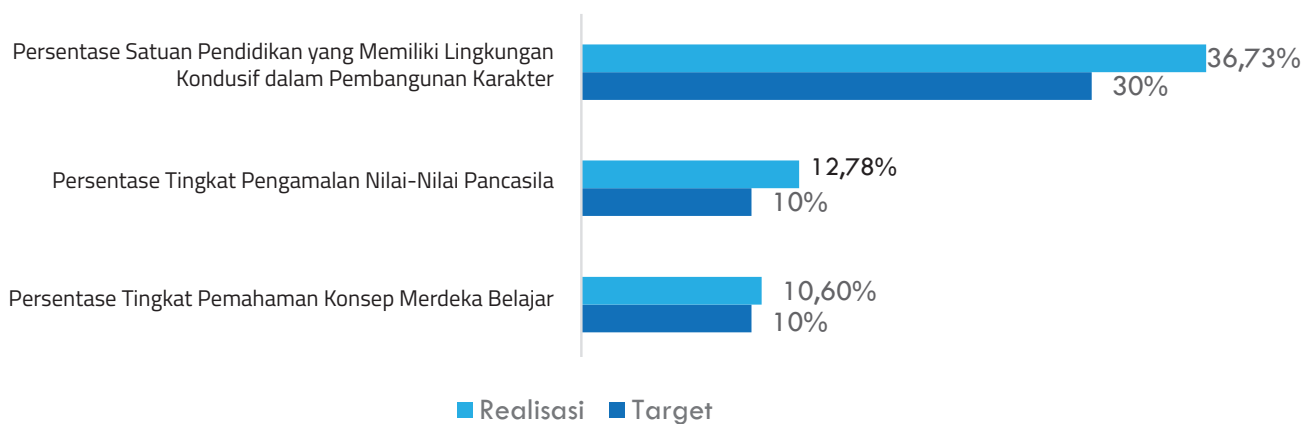
Realisasi IKSS



Sasaran Strategis 3

Menguatnya Karakter Peserta Didik

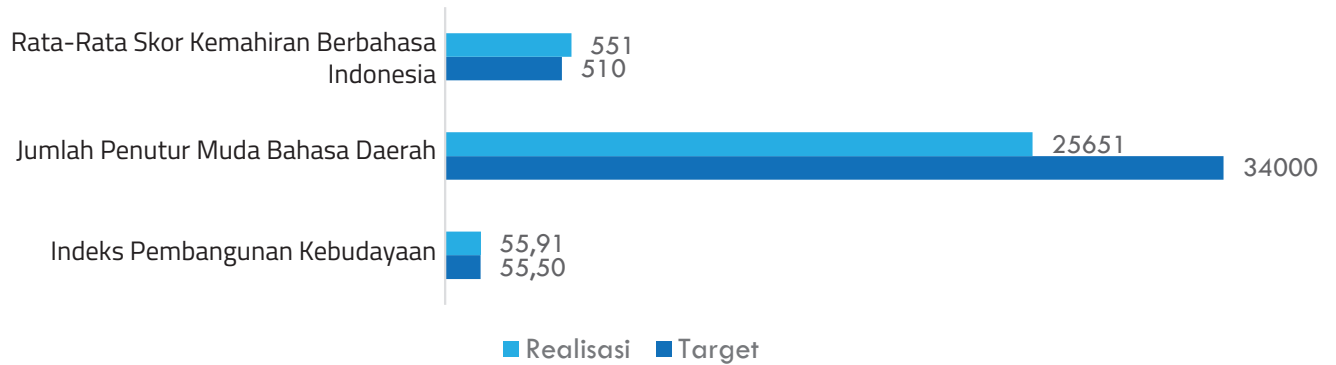
Realisasi IKSS



Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

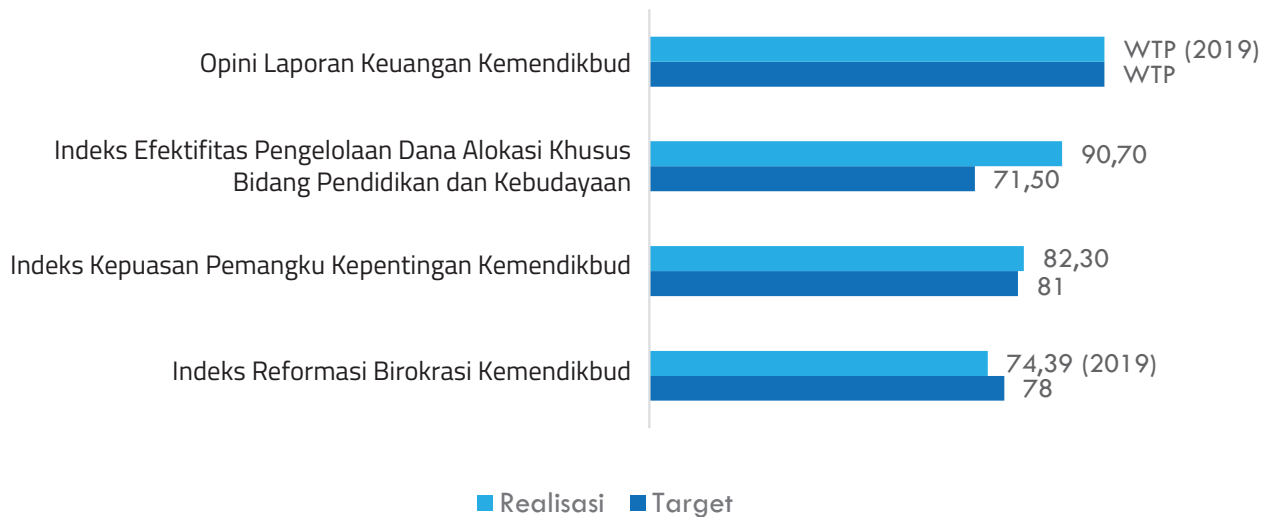
Realisasi IKSS



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Realisasi IKSS



Permasalahan Umum

1. pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perubahan yang dilakukan dalam melaksanakan layanan pendidikan dan kebudayaan baik dari sisi mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan, anggaran, maupun kebijakan yang sudah direncanakan sehingga capaian kinerja yang sudah ditetapkan kurang optimal;
2. angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi yang masih relatif rendah dibandingkan dengan angka partisipasi jenjang lainnya;
3. belum optimalnya sarana dan prasarana pada satuan pendidikan, serta infrastruktur yang mendukung proses pembelajaran berkualitas, termasuk yang terdampak oleh bencana;
4. belum optimalnya hasil pembelajaran pendidikan dasar dan menengah, khususnya bila dibandingkan dengan salah satu hasil asesmen internasional, yakni *Programme for International Student Assessment (PISA)*;
5. belum optimalnya keterserapan lulusan pendidikan tinggi di dunia kerja atau berwirausaha;
6. masih terdapatnya persepsi masyarakat terkait kurikulum yang dianggap kaku dan lebih terfokus pada konten;
7. belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi baik di internal Kemendikbud maupun antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan;
8. belum optimalnya tata kelola pendidikan sehingga mempengaruhi hasil pembelajaran peserta didik;
9. belum optimalnya partisipasi dunia kerja dalam penyusunan kurikulum pada pendidikan vokasi sehingga berdampak pada kurang relevannya kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja;
10. belum optimalnya kompetensi pendidik dalam mendukung pembelajaran berkualitas sesuai kebutuhan;
11. belum optimalnya kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan sehingga nilai pemanfaatan ekonomi dari berbagai cagar budaya serta fasilitas dan infrastruktur kebudayaan yang telah ada belum berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
12. belum optimalnya upaya pemetaan bahasa daerah guna menghindari kepunahannya, sehingga menyebabkan bahasa dan sastra daerah terus kehilangan penutur dan pembaca.

Langkah Antisipasi

1. melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran untuk mengakomodir kebutuhan layanan pendidikan dan kebudayaan pada masa pandemi Covid-19 sehingga layanan pendidikan dan kebudayaan tetap dapat dilaksanakan secara optimal;
2. melakukan inovasi dalam kebijakan BOS dengan mengubah mekanisme penyaluran langsung melalui satuan pendidikan, serta memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS dalam rangka mengantisipasi kelancaran proses belajar mengajar di masa pandemi Covid-19 termasuk peningkatan sarana prasarana pendukung pembelajaran;
3. mendorong kerja sama secara berkesinambungan dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap desa di Indonesia memiliki Lembaga PAUD, serta melakukan pemutakhiran data agar alokasi BOP PAUD tepat sasaran. Selain itu, Kemendikbud terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembang anak pada masa emasnya (*golden years*);
4. mengoptimalkan pemberian bantuan bagi pendidikan tinggi melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK), serta bantuan sarana prasarana kepada perguruan tinggi. Selain itu, Kemendikbud juga mendorong partisipasi swasta dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi;
5. mendorong pendidik melakukan inovasi dalam pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan peserta didik serta memberikan kesempatan kepada profesional untuk mengajar pada satuan pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;
6. mengoptimalkan peran serta dunia kerja pada pendidikan vokasi melalui program *link and match*, program *teaching factory*, dan pelatihan tenaga pendidikan vokasi pada industri.
7. membangun *platform* pendidikan nasional berbasis digital untuk mendorong partisipasi seluruh pemangku kepentingan, baik peserta didik, guru, dosen, pelaku industri, serta pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan;
8. mewujudkan terciptanya kerja sama dan kolaborasi yang erat antar unit kerja di Kemendikbud, dan pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan keluarga, melalui penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
9. mendorong perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi berbadan hukum untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi sesuai kebutuhan perguruan tinggi tersebut;
10. memberikan bantuan peningkatan kompetensi pendidikan sesuai kebutuhan, antara lain melalui program Guru Penggerak, pelatihan di industri, penguatan keahlian dalam melakukan penelitian, serta peningkatan kompetensi lainnya;
11. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam *event* kebudayaan agar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
12. mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik serta mendorong peran serta pemerintah daerah dalam program revitalisasi bahasa dan sastra daerah untuk meminimalisir kepunahannya.

BAB 1

PENDAHULUAN

- Dasar Hukum
- Tugas Fungsi
- Struktur Organisasi
- Isu Strategis
- Peran Strategis



Latar Belakang

Tahun 2020 merupakan tahun awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2020-2024. Salah satu prioritas nasional pada pembangunan di lima tahun mendatang adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga terwujud SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemendikbud yang memiliki mandat menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019, terus berinovasi dan berupaya agar sistem pendidikan yang ada dapat menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan di masa depan, yakni yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, selaras dengan visi Kemendikbud, yakni menciptakan Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Sebagai lembaga publik, Kemendikbud berkewajiban menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik yang berlandaskan asas akuntabilitas sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.



PERATURAN PRESIDEN No 82 TAHUN 2019



TUGAS

Menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

FUNGSI

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik, serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
3. penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
4. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
5. pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, serta pengelolaan kebudayaan;
6. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan pengelolaan kebudayaan;
7. pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
8. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
9. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia;
10. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
11. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
12. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
13. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
14. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian dan pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian;
15. melakukan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penyiapan bahan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada lingkup Kementerian.

Sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden tersebut dan untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi tersebut terdistribusikan dengan baik, Kemendikbud menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Inspektorat Jenderal

Sekretariat Jenderal

Direktorat Jenderal Guru dan Kependidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi

Direktorat Jenderal Kebudayaan

Direktorat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan



9 Unit Utama



344 UPT/
Satker

Total Pegawai Kemendikbud per 31 Desember 2020

124.178 orang

Isu STRATEGIS

1. pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan layanan pendidikan dan kebudayaan;
2. kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini bagi tumbuh kembang anak pada masa emasnya (*golden years*) masih rendah;
3. akses layanan PAUD dan pendidikan tinggi masih terbatas;
4. keterbatasan kemampuan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, untuk membiayai pendidikan tinggi.
5. masih terdapatnya disparitas mutu pendidikan secara geografis, yang salah satunya dipengaruhi oleh keadaan sosio-ekonomi peserta didik dan kondisi geografis.
6. pedagogi dan efektivitas pengajaran pendidik masih kurang optimal untuk mendorong terciptanya pembelajaran berkualitas;
7. sarana dan prasarana pada satuan pendidikan serta infrastruktur pendukung lainnya termasuk yang diakibatkan oleh bencana masih kurang memadai untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas;
8. tata kelola pendidikan belum sepenuhnya mendukung optimalisasi hasil pembelajaran peserta didik;
9. belum optimalnya keselarasan antara pendidikan tinggi dengan dunia kerja, yang antara lain disebabkan oleh terbatasnya keterlibatan dunia kerja dalam proses pembelajaran, misalnya dalam penyelarasan kurikulum, pengajaran, serta dalam menghadirkan dunia kerja pada lembaga pendidikan;
10. belum optimalnya pengembangan kompetensi dan potensi pendidik untuk mendukung pembelajaran berkualitas;
11. belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pembangunan kebudayaan;
12. tingkat kemahiran membaca aksara daerah semakin menurun.

KEMENDIKBUD BERPERAN PENTING DALAM:

1. menciptakan SDM Indonesia yang berkualitas dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila;
2. mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
3. mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu dan yang berpusat pada pengembangan kompetensi peserta didik;
4. mendorong pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan;
5. memastikan terciptanya kerja sama dan kolaborasi yang erat antar pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, dan keluarga, melalui penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.



**MERDEKA
BELAJAR**
Nadiem Makarim



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

- Visi
- Misi
- Tujuan Strategis
- Rencana Kerja Jangka Menengah
- Perjanjian Kinerja



Visi Kemendikbud 2020-2024

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global





Tujuan **STRATEGIS**

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif;
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik;
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter;
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam pendidikan.



Rencana Kinerja Jangka Menengah

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
SS 1	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang						
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun	%	40,20	42,62	45,21	47,81	53,10
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	%	105,97	104,48	102,98	101,49	100
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	%	92,46	94,34	96,23	98,11	100
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	%	86,18	88,39	90,59	92,80	95
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	33,47	34,56	35,62	36,64	37,63
SS 2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang						
IKSS 2.1	Nilai Rata-Rata Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (5-6 Tahun)	Nilai	3	3,25	3,50	3,70	4
IKSS 2.2	Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	%	57,20	58,20	59,20	60,20	61,20
IKSS 2.3	Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	%	26,50	27,40	28,30	29,20	30,10
IKSS 2.4	Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Membaca	Nilai	-	394	-	-	396

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
IKSS 2.5	Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Matematika	Nilai	-	385	-	-	388
IKSS 2.6	Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Sains	Nilai	-	399	-	-	402
IKSS 2.7	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan	%	47,10	48,30	49,70	51,10	52,60
IKSS 2.8	Persentase Lulusan PT yang Langsung Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan	%	64,77	65,25	65,72	66,20	66,70
IKSS 2.9	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	%	47,43	48,33	49,22	50,11	51
IKSS 2.10	Persentase Guru-Guru Kejuruan SMK yang Mempunyai Pengalaman Kerja di Industri atau Sertifikasi Kompetensi yang Diakui Oleh Industri	%	12	18	23	31	40
IKSS 2.11	Persentase Dosen yang Memiliki Pengalaman Bekerja atau Tersertifikasi di Industri	%	69	71,80	74,60	77,40	80
SS 3	Menguatnya Karakter Peserta Didik						
IKSS 3.1	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter	%	30	35	40	45	50
IKSS 3.2	Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	%	10	15	22,50	31	40
IKSS 3.3	Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	%	10	15	22,50	31	40
SS 4	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan						
IKSS 4.1	Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia	Skor	510	515	520	525	530
IKSS 4.2	Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	Orang	34.000	50.000	66.000	82.000	98.000
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	55,50	57,30	59,10	60,90	62,70

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel						
IKSS 5.1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS 5.2	Indeks Efektifitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks	71,50	73	74,50	76	77,50
IKSS 5.3	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud	Indeks	81	82	82	83	84
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	78	81	85	87	91



Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target	
1	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang	1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun	%	40,20
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/ Sederajat	%	105,97
		3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat	%	92,46
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ SMLB/Sederajat	%	86,18
		5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	33,47
2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang	1	Nilai Rata-Rata Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (5-6 Tahun)	Nilai	3
		2	Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	%	57,20
		3	Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	%	26,50
		4	Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Membaca	Nilai	-
		5	Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Matematika	Nilai	-
		6	Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Sains	Nilai	-
		7	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan	%	47,10
		8	Persentase Lulusan PT yang Langsung Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan	%	64,77
		9	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	%	47,43
		10	Persentase Guru-Guru Kejuruan SMK yang Mempunyai Pengalaman Kerja di Industri atau Sertifikasi Kompetensi yang Diakui oleh Industri	%	12
		11	Persentase Dosen yang Memiliki Pengalaman Bekerja atau Tersertifikasi di Industri	%	69

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target
3	Menguatnya Karakter Peserta Didik	1 Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter	%	30
		2 Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	%	10
		3 Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	%	10
4	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1 Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia	Skor	510
		2 Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	Orang	34.000
		3 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	55,50
5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	1 Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	Opini	WTP
		2 Indeks Efektifitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Indeks	71.50
		3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud	Indeks	81
		4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks	78



Alokasi Anggaran Tahun 2020

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud	34.145.468.261.000
2	Guru dan Tenaga Kependidikan	2.236.061.732.000
3	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Likuidasi)	144.673.267.000
4	Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	4.812.589.293.000
5	Pendidikan Vokasi	6.627.898.632.000
6	Pendidikan Tinggi	35.886.689.898.000
7	Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	1.327.431.152.000
8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud	185.402.955.000
9	Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	385.162.160.000
10	Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud	633.292.559.000

*) Sumber: SatuDJA, Kemenkeu, Februari 2021

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja
- Realisasi Anggaran



A. Capaian Kinerja



Sesuai Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020, Kemendikbud menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dengan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Tingkat ketercapaian SS dan IKSS tersebut sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

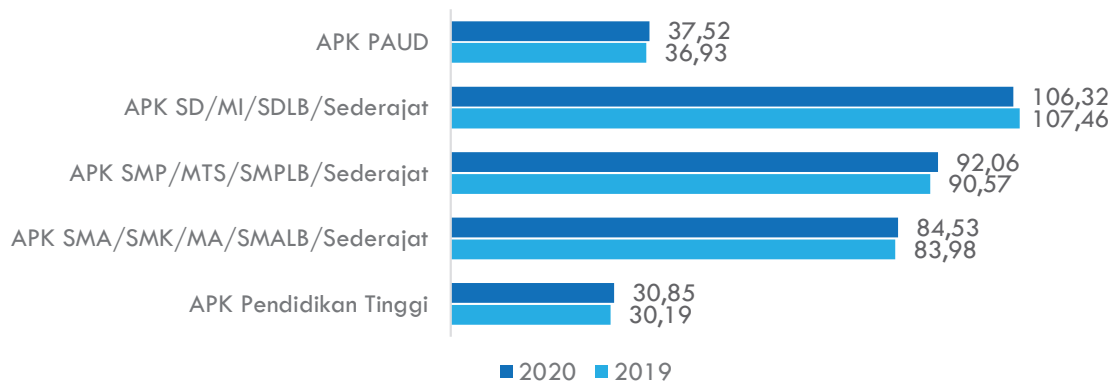
SS 1

Meningkatnya Pemerataan Layanan
PENDIDIKAN BERMUTU DI SELURUH JENJANG

Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang, serta percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun masih menjadi salah satu prioritas nasional pada RPJMN tahun 2020-2024,

yang juga menjadi salah satu prioritas yang termuat dalam kebijakan Merdeka Belajar pada Renstra Kemendikbud. Sampai dengan tahun 2020, pemerataan layanan pendidikan bermutu diseluruh jenjang mengalami peningkatan dari tahun 2019 untuk semua jenjang. Capaian Sasaran Strategis (SS) ini ditandai dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) diseluruh jenjang mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Pendidikan Tinggi (PT).

Angka Partisipasi Kasar 2019-2020



* Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Dapat disimpulkan bahwa dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi peningkatan APK pada tahun 2020 di hampir seluruh jenjang, kecuali jenjang SD/Sederajat mengalami penurunan dari 107,46% di tahun 2019 menjadi 106,32% di tahun 2020. Idealnya, APK seharusnya maksimal sebesar 100%, yang menandakan bahwa semua peserta didik yang ada pada jenjang SD/Sederajat tersebut berusia sesuai dengan jenjangnya yaitu usia 7-12 tahun. APK yang melebihi 100% mengindikasikan bahwa masih ada peserta didik yang usianya di luar kelompok umur 7-12 tahun tetapi masih bersekolah pada jenjang SD/Sederajat.

Secara umum, capaian SS 1 di atas didukung oleh 5 (lima) IKSS sebagai berikut ini:

IKSS 1.1

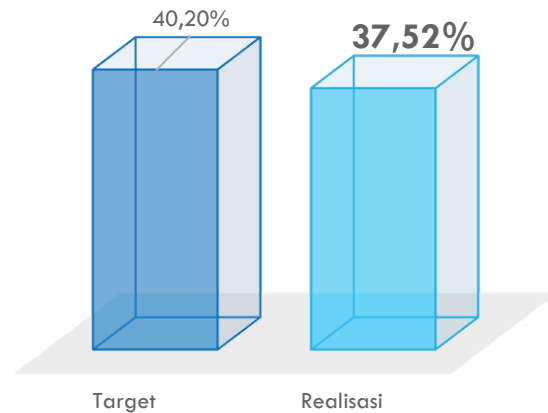
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia 0-6 tahun yang sedang sekolah di jenis prasekolah (Taman Kanak-Kanak/ Bustanul Athfal/Raudatul Athfal/PAUD terintegrasi BKB/ Taman Posyandu, PAUD, TAAM, PAUD PAK, PAUD BIA, TKQ) terhadap jumlah penduduk usia 3-6 tahun.



Capaian target APK PAUD tahun 2020 sebesar 37,52%, lebih rendah dari yang ditargetkan yaitu 40,20%, atau realisasi capaian sebesar 93,33%. Meskipun capaian APK PAUD tahun 2020 belum tercapai, namun secara Nasional, APK PAUD tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,59% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 36,93%. Secara keseluruhan, perlu upaya keras untuk meningkatkan APK PAUD karena masih ada 24 Provinsi yang angka APK PAUD-nya di bawah rata-rata Nasional.

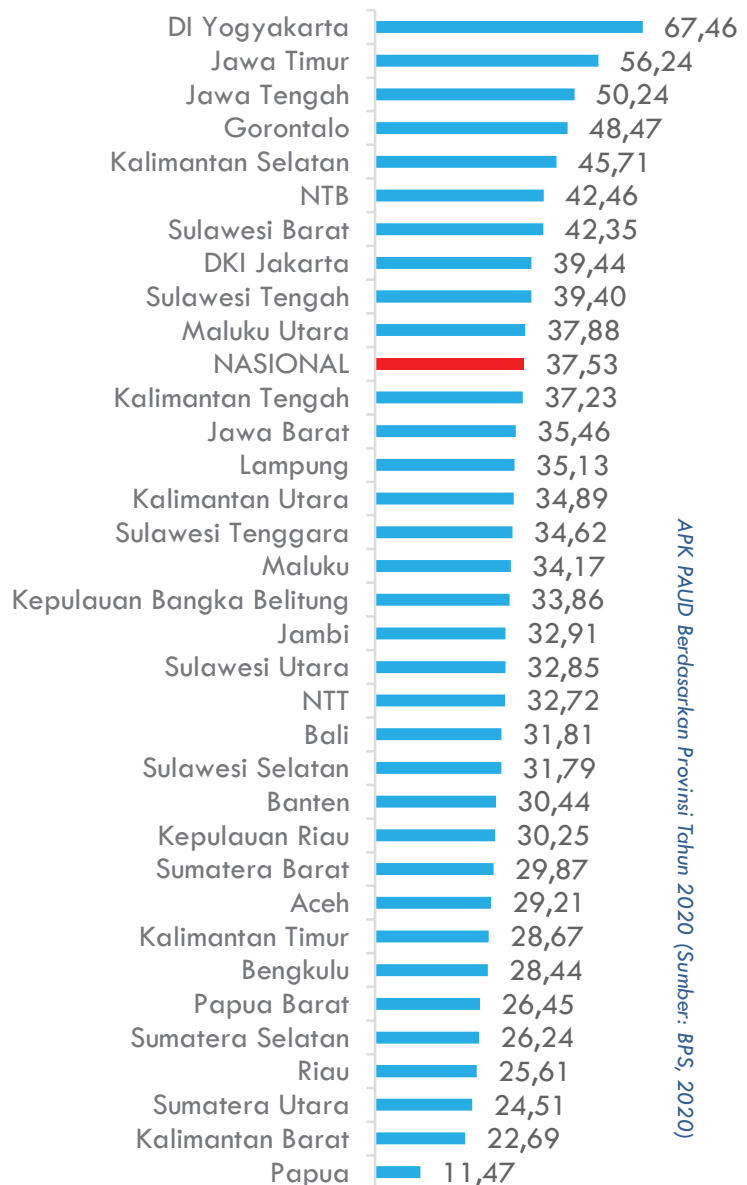
APK PAUD (3-6 Tahun)
Tahun 2020



Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, kepada lebih dari 6,8 juta peserta didik;
2. penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi PAUD sebanyak 169 Lembaga, serta pemberian Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD kepada 410 Lembaga;
- 3, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah memberikan prioritas pada PAUD dan memastikan akses masyarakat terhadap PAUD semakin mudah, mengingat PAUD merupakan salah satu layanan wajib pada bidang pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2018 terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM).



APK PAUD Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 (Sumber: BPS, 2020)



Sejumlah peserta didik PAUD sedang melakukan kegiatan bersama



Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya berbagai *refocusing* dan realokasi anggaran sehingga mempengaruhi alokasi anggaran, khususnya untuk program yang berkaitan dengan sarana dan prasarana PAUD;
2. tingkat kesejahteraan sosial peserta didik, dimana masyarakat berpenghasilan rendah masih terkendala dalam mengakses PAUD;
3. kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (*golden age*);
4. masih terbatasnya akses layanan PAUD di daerah-daerah tertentu terutama di daerah 3T maupun pedesaan. Sampai tahun 2019, masih ada sekitar 30% atau 25.000 desa di Indonesia yang belum memiliki Lembaga PAUD;
5. terbatasnya akses untuk peserta didik berkebutuhan khusus.



Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. mengoptimalkan pemberian BOP PAUD khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah;
2. pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan seperti program Unit Sekolah Baru (USB), Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi dan renovasi sekolah dan kegiatan pembangunan lainnya;

3. meningkatkan koordinasi antar unit di Kemendikbud, antar kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah, terutama dalam hal penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran; dan
4. penyediaan lembaga pendidikan khususnya bagi anak berkebutuhan khusus.



Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap PAUD adalah sebagai berikut:

1. peningkatan pemberian BOP PAUD utamanya bagi masyarakat yang berpendapatan rendah;
2. fokus pemberian bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), RKB, rehabilitasi dan renovasi Lembaga PAUD di wilayah dengan tingkat capaian APK yang masih rendah;
3. sosialisasi dan transfer pengetahuan ke masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini, bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan PAUD baik di pusat maupun daerah.

IKSS 1.2

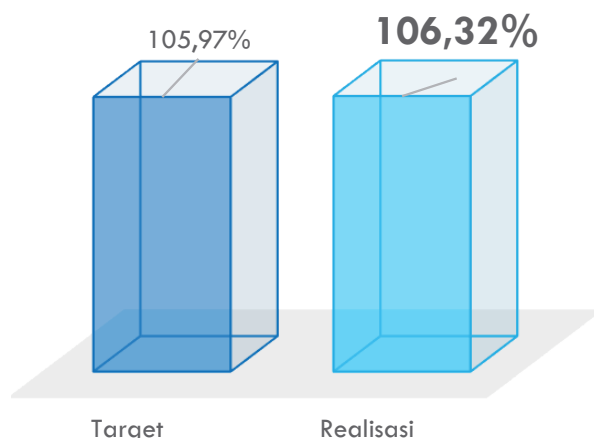
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD/MI/SDLB/Sederajat menggambarkan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SD/MI/SDLB/Sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Hampir seluruh Provinsi di Indonesia mencapai APK SD/SDLB/MI/Sederajat melebihi angka 100%, kecuali Provinsi Papua yang masih mencapai 91,27%. Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia untuk tingkat SD/SDLB/MI/Sederajat sudah cukup merata, bahkan diantaranya ada beberapa daerah yang pencapaian APK SD/SDLB/MI/Sederajat yang lebih besar dari APK Nasional. Kondisi ini dapat disebabkan masih adanya peserta didik yang bersekolah pada jenjang SD Sederajat, di luar usia 7-12 tahun. Hal ini mungkin disebabkan karena masih adanya peserta didik yang masuk ke jenjang SD sebelum usia 7 (tujuh) tahun, memasuki jenjang SD setelah 7 tahun, atau mengulang pada saat bersekolah di jenjang SD.



APK SD/MI/SDLB/Sederajat Tahun 2020





Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

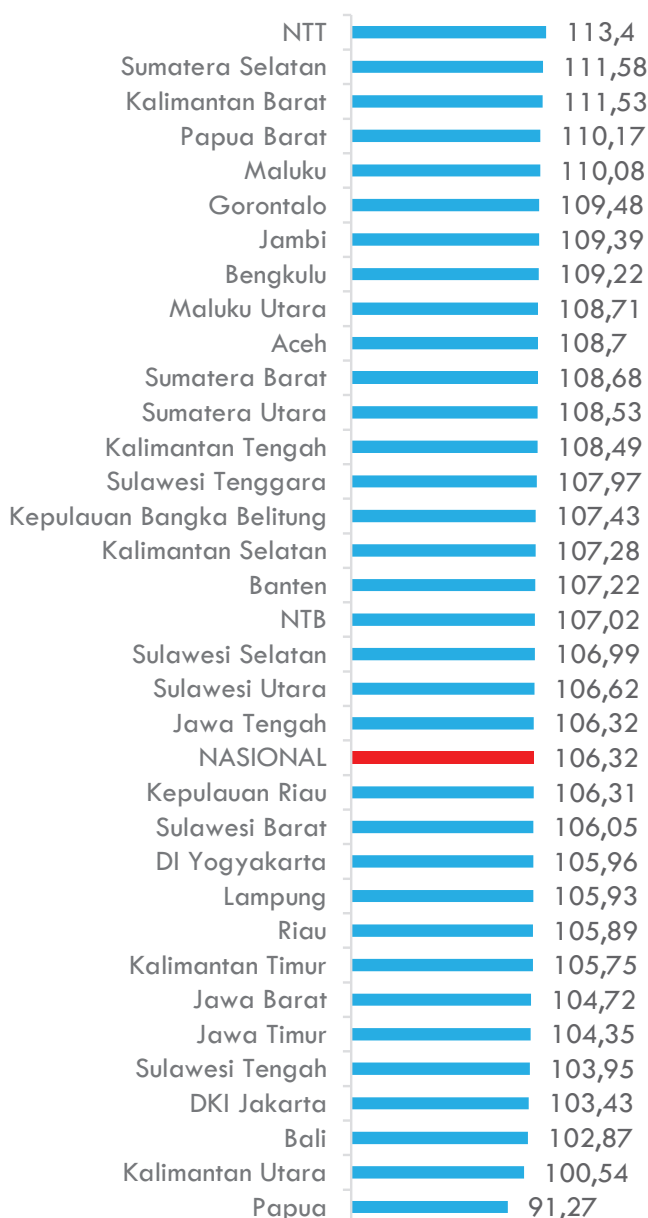
1. pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui Program Indonesia Pintar (PIP) kepada peserta didik yang memiliki latar belakang keluarga dengan tingkat pendapatan yang rendah, yang merupakan salah satu proyek prioritas pada RPJMN tahun 2020-2024;
3. pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa berkebutuhan khusus, termasuk kepada sekolah inklusi;
4. penambahan RKB, rehabilitasi, dan renovasi ruang kelas; dan
5. pemberian bantuan bagi lembaga/ organisasi penyelenggara pendidikan.



Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran sehingga terjadi pengurangan jumlah anggaran dan sasaran dalam pembangunan USB, renovasi, dan revitalisasi satuan pendidikan;
2. kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketepatan usia anak untuk memasuki jenjang SD sehingga sesuai dengan kesiapan dan perkembangan psikologis anak;
3. akses ketersediaan sarana bersekolah tingkat SD di daerah-daerah tertentu terutama daerah 3T yang belum mencukupi maupun radius jarak yang cukup jauh, khususnya wilayah timur Indonesia yang tingkat angka partisipasinya masih di bawah 100%;



APK SD/Sederajat Berdasarkan Provinsi Tahun 2020
(Sumber : BPS, 2020)



Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran dana BOS, khususnya pada wilayah yang tingkat angka partisipasinya masih belum optimal;
2. memprioritaskan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) melalui Program Indonesia Pintar (PIP), pada wilayah yang tingkat angka partisipasinya masih belum optimal;
3. pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan seperti program USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan pembangunan sarana pendidikan lainnya;
4. meningkatkan koordinasi antar unit di Kemendikbud, maupun antar kementerian terkait serta pemerintah daerah, untuk memastikan ketepatan usia anak memasuki jenjang SD Sederajat, yang salah satunya diwujudkan melalui kebijakan zonasi;



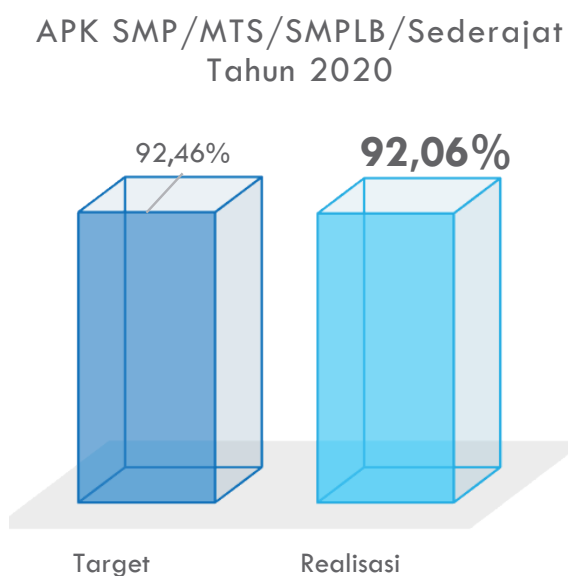
Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. meningkatkan kinerja penyaluran dan penggunaan BOS;
2. pemutakhiran data calon penerima KIP, khususnya yang belum tertangani;
3. pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan seperti pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan pembangunan sarana pendidikan lainnya, khususnya pada wilayah yang tingkat angka partisipasinya masih belum optimal;
4. penuntasan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dasar semakin meningkat, khususnya pada wilayah yang tingkat angka partisipasinya masih belum optimal;
5. meningkatkan komitmen satuan pendidikan jenjang SD Sederajat, agar memprioritaskan calon peserta didik dengan usia yang sesuai dengan ketentuan;
6. mendorong proses pembelajaran yang berkualitas dan berfokus pada peserta didik pada satuan pendidikan, untuk meminimalisir peserta didik yang tinggal kelas.

IKSS 1.3

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/SMPLB/Sederajat



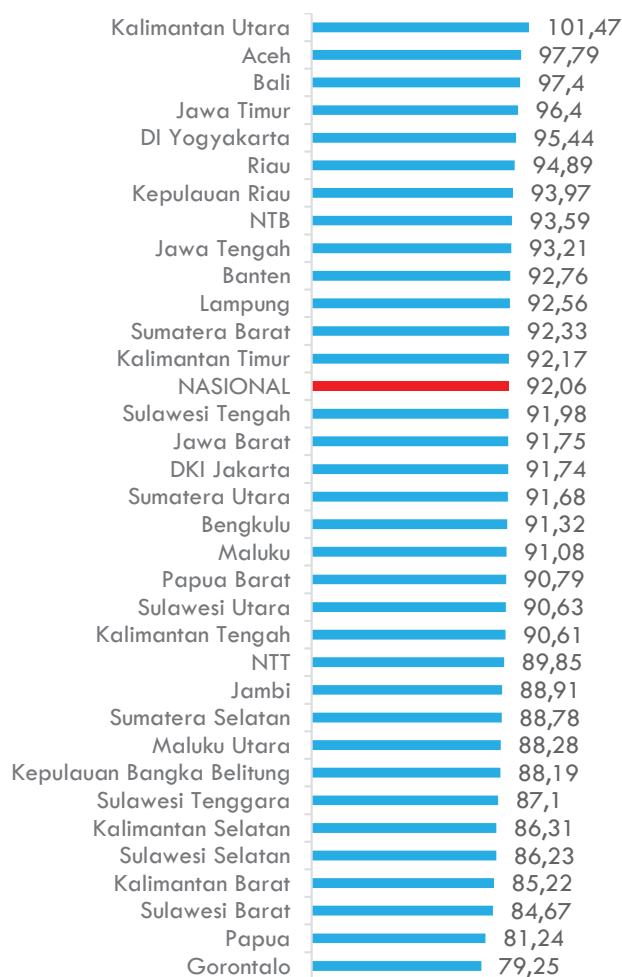
APK SMP/Sederajat Berdasarkan Provinsi Tahun 2020
(Sumber : BPS, 2020)

Capaian APK SMP/SMPLB/MTS/Sederajat, tahun 2020 sebesar 92.06%, lebih rendah dari yang ditargetkan, yakni 92,46%, atau realisasi capaian sebesar 99,57%. Meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan, APK SMP/SMPLB/MTS/Sederajat pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1,49% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 90,57%.

Secara nasional, masih ada 21 provinsi di Indonesia yang rata-rata APK SMP/SMPLB/MTS/Sederajat-nya di bawah rata-rata nasional yang harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan intervensi yang diperlukan sehingga dapat mengoptimalkan capaian APK-nya.



Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/SMPLB/MTS/Sederajat menggambarkan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP/SMPLB/MTS/Sederajat terhadap jumlah penduduk usia 13-15 tahun.



APK SMP/Sederajat Berdasarkan Provinsi Tahun 2020
(Sumber : BPS, 2020)



Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. pemberian dana BOS, dengan memprioritaskan wilayah dengan capaian angka partisipasi yang rendah;
2. melanjutkan pemberian KIP kepada peserta didik khususnya dari keluarga dengan pendapatan rendah yang merupakan salah satu proyek prioritas pada RPJMN tahun 2020-2024;
3. pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya serta pemberian bantuan peralatan pendidikan;
4. pemutakhiran data pokok pendidikan dan *database* lainnya, yang digunakan sebagai acuan dalam menyalurkan bantuan pendidikan;
5. berkoordinasi secara terus menerus baik antar unit di Kemendikbud, maupun kementerian/ lembaga terkait, serta pemerintah daerah dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan.



Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran sehingga terjadi pengurangan jumlah anggaran dan sasaran dalam pembangunan USB, renovasi, dan revitalisasi satuan pendidikan;
2. tingkat kesejahteraan sosial calon peserta didik, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah. Sesuai data BPS tahun 2020, angka partisipasi dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (kuintil 1) sebesar 90,03%, lebih rendah dari masyarakat berpenghasilan tinggi (kuintil 5) sebesar 91,99;
3. keterbatasan ketersediaan satuan pendidikan tingkat SMP/Sederajat di daerah-daerah tertentu terutama di wilayah 3T;
4. ketersediaan satuan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang belum memadai. Sesuai data BPS tahun 2020, angka partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus hanya sebesar 72,51%, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan peserta didik yang non disabilitas sebesar 92,18%.



Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. melanjutkan pemberian dana BOS, dengan memprioritaskan wilayah dengan capaian angka partisipasi yang rendah;
2. pemberian KIP melalui Program Indonesia Pintar (PIP), khususnya bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah;
3. pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan seperti pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan pembangunan sarana pendidikan lainnya;
4. bantuan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta bantuan pendidikan untuk wilayah terdampak bencana;
5. mendorong satuan pendidikan menjadi sekolah inklusi sehingga dapat diakses oleh peserta didik berkebutuhan khusus;
6. meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan terutama pemerintah daerah untuk mendorong ketercapaian SPM bidang pendidikan.



Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. meningkatkan ketepatan sasaran pemberian dan penggunaan dana BOS;
2. melanjutkan pemberian KIP melalui program PIP, khususnya bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah;
3. pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan seperti pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya;
4. meningkatkan koordinasi antar unit di Kemendikbud, maupun antar kementerian/lembaga terkait, terutama dalam hal penyaluran anggaran dan keabsahan data penerima layanan bantuan pendidikan.

IKSS 1.4

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah pada jenjang SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat terhadap jumlah penduduk yang berusia 16 - 18 tahun.

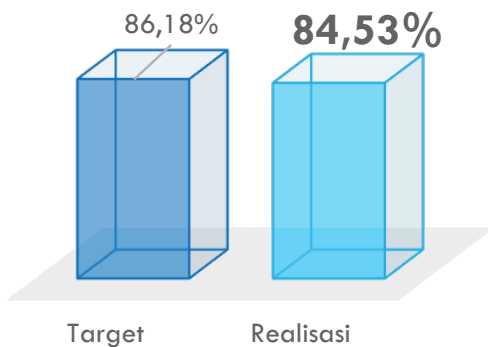
2020

- Target = 86,18%
- Realisasi = 84,53%
- Capaian = 98,08%

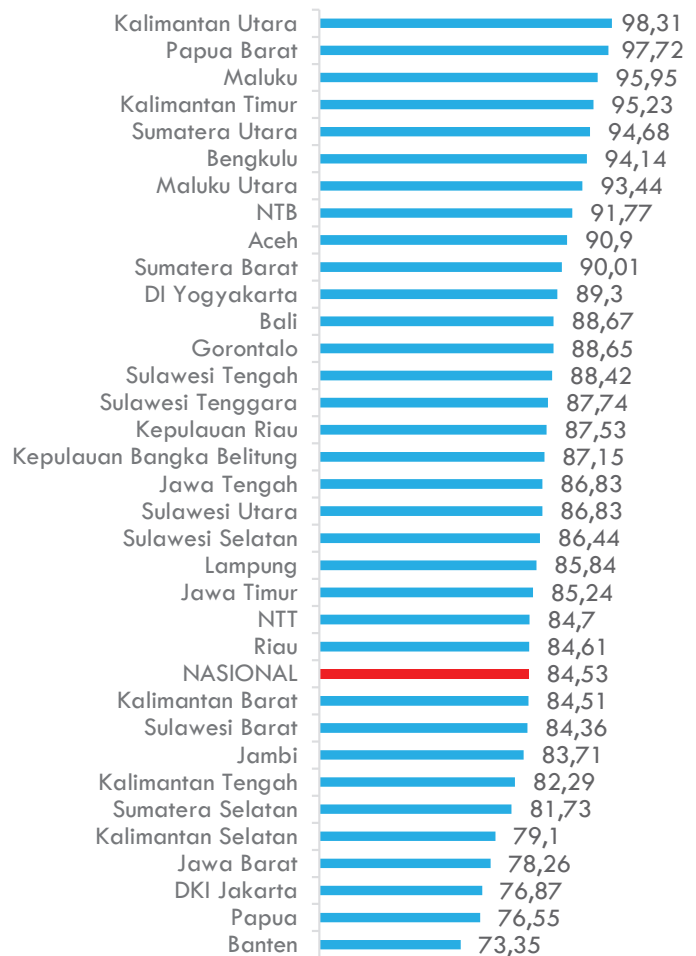
Renstra

- Target Akhir 2024 = 95%
- Capaian Akhir 2024 = 88,98%

APK
SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat
Tahun 2020



Capaian APK SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat tahun 2020 sebesar 84,53%, lebih rendah dari yang ditargetkan, yakni sebesar 86,18%, atau realisasi capaian sebesar 98,08%. Meskipun APK tersebut tidak memenuhi target sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada tahun 2020, APK SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat tetap mengalami peningkatan sebesar 0,55%, jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 83,98%. Secara nasional, masih ada 10 Provinsi di Indonesia yang rata-rata APK-nya masih di bawah rata-rata nasional, dan kondisi tersebut harus menjadi prioritas untuk dilakukan intervensi, baik bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta seluruh pemangku pendidikan.



APK SMA/ Sederajat Berdasarkan Provinsi Tahun 2020
(Sumber : BPS, 2020)

Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. pemberian bantuan pendidikan melalui dana BOS, dengan memprioritaskan wilayah dengan capaian angka partisipasi yang rendah;
2. melanjutkan pemberian KIP kepada peserta didik khususnya dari keluarga yang berpenghasilan rendah, yang merupakan salah satu proyek prioritas pada RPJMN tahun 2020-2024;
3. pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, khususnya di wilayah yang angka partisipasinya masih rendah, termasuk di wilayah 3T;
4. melakukan koordinasi secara terus menerus baik di internal Kemendikbud, maupun dengan kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah dalam rangka mendorong pemenuhan SPM di bidang pendidikan khususnya jenjang menengah.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. tingkat kesejahteraan sosial calon peserta didik, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah. Sesuai data BPS tahun 2020, angka partisipasi dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (kuintil 1) hanya sebesar 71,35%, lebih rendah dari masyarakat berpenghasilan tinggi (kuintil 5) sebesar 92,96;
2. keterbatasan akses terhadap satuan pendidikan jenjang SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat di daerah-daerah tertentu terutama di wilayah 3T. Hal ini terlihat dari kesenjangan angka partisipasi di wilayah pedesaan yang hanya sebesar 79,91%, dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang mencapai 88,17% (BPS, 2020);
3. ketersediaan satuan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang belum memadai. Sesuai data BPS tahun 2020, angka partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus tingkat SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat hanya sebesar 52,69%, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan peserta didik yang non disabilitas sebesar 84,74%;
4. belum optimalnya ketepatan dan keakuratan data calon penerima KIP sehingga belum semua calon penerima KIP terlayani;



Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. melanjutkan dan memperluas kebijakan penyaluran dana BOS dengan mencakup sekolah swasta, termasuk pembiayaan guru honorer;
2. melanjutkan pemberian KIP kepada peserta didik khususnya dari keluarga yang berpenghasilan rendah;
3. pembangunan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan berkelanjutan baik yang dilakukan langsung oleh Kemendikbud, seperti pembangunan USB, RKB, rehabilitasi, renovasi sekolah, dan kegiatan pembangunan fisik pendidikan lainnya, ataupun melalui kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian PUPR, serta pemerintah daerah;
4. memperkuat alternatif program pendidikan lainnya seperti pendidikan kesetaraan, dan sekolah terbuka;
5. mendorong satuan pendidikan menjadi sekolah inklusi sehingga dapat diakses oleh peserta didik berkebutuhan khusus;
6. meningkatkan kualitas data melalui koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah agar seluruh bantuan atau intervensi yang dilakukan tepat sasaran.



Langkah Antisipasi

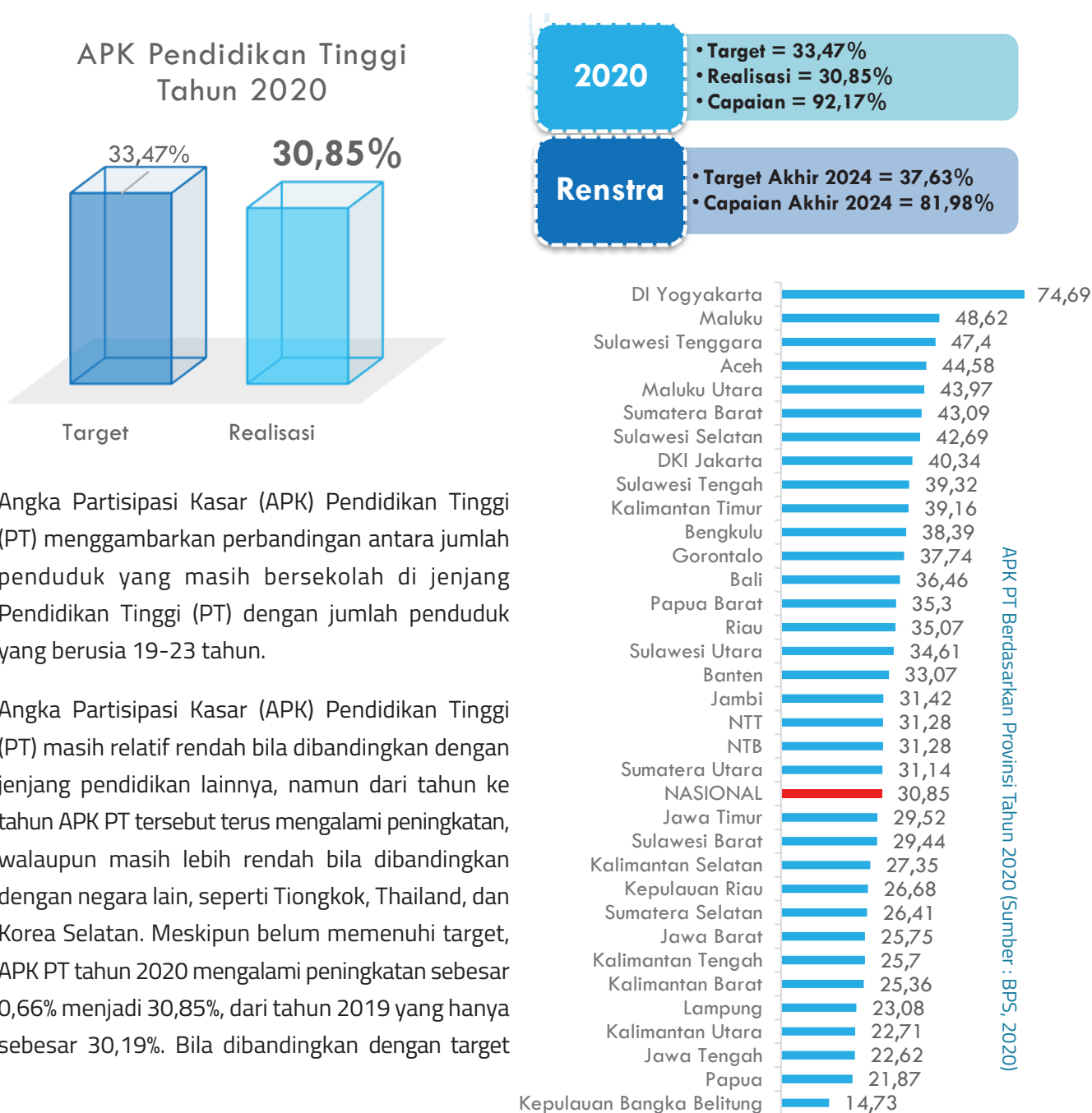
Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. meningkatkan kinerja penyaluran dan penggunaan dana BOS, khususnya di wilayah dengan angka partisipasi rendah;
2. pemutakhiran data calon penerima PIP yang belum tertangani bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait;
3. penuntasan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan semakin meningkat;
4. memberikan insentif kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja pendidikan yang baik;
5. memperkuat alternatif program pendidikan lainnya seperti pendidikan kesetaraan, dan sekolah terbuka;
6. mendorong satuan pendidikan menjadi sekolah inklusi sehingga dapat diakses oleh peserta didik berkebutuhan khusus;

7. mendorong peningkatan kualitas pendidikan menengah, yang salah satu strateginya adalah pemberian keahlian-keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja atau berwirausaha;
8. memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan menengah.

IKSS 1.5

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi



Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang Pendidikan Tinggi (PT) dengan jumlah penduduk yang berusia 19-23 tahun.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) masih relatif rendah bila dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, namun dari tahun ke tahun APK PT tersebut terus mengalami peningkatan, walaupun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain, seperti Tiongkok, Thailand, dan Korea Selatan. Meskipun belum memenuhi target, APK PT tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,66% menjadi 30,85%, dari tahun 2019 yang hanya sebesar 30,19%. Bila dibandingkan dengan target

tahun 2020, realisasi capaian APK PT sebesar 92,17%. Dengan kebijakan Kampus Merdeka, yang salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk kuliah di luar program studi sebanyak tiga semester, diharapkan minat masyarakat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi menjadi lebih baik.

Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. pemberian bantuan melalui program KIP Kuliah, yakni program beasiswa bagi calon mahasiswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, yang juga merupakan salah satu proyek strategis pada RPJMN tahun 2020-2024;
2. pemberian bantuan beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK), khususnya bagi masyarakat yang berasal dari wilayah timur Indonesia;
3. dukungan bantuan pengembangan sarana prasana bagi perguruan tinggi, baik melalui APBN maupun melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) bagi 14 PTN dan 11 PT Vokasi, serta melalui pembiayaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) bagi 17 PT; dan
4. sumber dana lainnya, baik yang berasal dari kementerian/lembaga lain atau dari masyarakat yang dikelola secara mandiri oleh PT.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. masih belum meratanya pembangunan perguruan tinggi terutama di wilayah 3T;
2. belum optimalnya daya tampung pada PT;
3. faktor ekonomi yang menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dari latar belakang ekonomi yang berpendapatan rendah untuk mengakses pendidikan tinggi. Data capaian APK tahun 2020 yang dirilis oleh BPS memperlihatkan kesenjangan yang masih sangat tinggi antara penduduk berpenghasilan rendah dan penduduk berpenghasilan tinggi, dimana APK PT pada masyarakat dengan latar belakang ekonomi terendah (Kuintil 1) hanya yang sebesar 16,13, jauh lebih rendah dibandingkan dengan APK PT pada masyarakat dari latar belakang ekonomi tertinggi (Kuintil 5) yang sudah sebesar 56,87;
4. *refocusing* dan realokasi anggaran terkait pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana PT untuk mendukung penanganan terkait pandemi Covid-19;
5. persepsi masyarakat yang rendah tentang lulusan pendidikan tinggi vokasi, sebagai salah satu alternatif pendidikan tinggi.



Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. melakukan akselerasi pemerataan pembangunan perguruan tinggi di wilayah 3T;
2. mengoptimalkan realisasi daya tampung perguruan tinggi agar jumlah calon mahasiswa meningkat;
3. melanjutkan pemberian bantuan beasiswa bagi masyarakat yang berpendapatan rendah melalui program KIP Kuliah, dan program ADik;
4. pemberian bantuan keringanan UKT bagi mahasiswa terdampak Covid-19, serta pemberian bantuan kuota internet gratis sehingga proses pembelajaran tetap berlangsung;
5. peningkatan sarana prasarana perguruan tinggi melalui dana APBN, SBSN, PHLN, serta swasta, untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi sehingga menarik minat masyarakat khususnya dari keluarga menengah ke atas untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi;
6. melakukan berbagai inovasi melalui kebijakan Merdeka Belajar melalui Kampus Merdeka untuk meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi sehingga menarik minat masyarakat melanjutkan pendidikan tinggi antara lain kemudahan perguruan tinggi untuk membuka pembukaan program studi baru yang sesuai kebutuhan, pemberian fleksibilitas dalam sistem akreditasi perguruan tinggi, mendorong peningkatan jumlah perguruan tinggi negeri berbadan hukum sehingga memberikan keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk berinovasi, serta memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat mahasiswa tersebut;
7. pemberian kelonggaran pada perguruan tinggi dalam menggunakan anggaran SBSN dalam memenuhi kebutuhan sarana prasarana sampai dengan tahun 2021 sesuai surat edaran Kementerian Keuangan.



Kegiatan

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. memperbanyak bantuan melalui beasiswa bagi pra-pendidikan tinggi dan mahasiswa yang sedang studi, sehingga akses untuk mengenyam pendidikan tinggi meningkat dan menghindarkan mahasiswa dari *drop-out* karena kendala biaya pendidikan;
2. membuka program studi baru yang relevan untuk memperbesar ketersediaan program studi yang diminati dan dibutuhkan;
3. meningkatkan mutu program studi perguruan tinggi di Indonesia agar *turn-over* lulusan semakin tinggi sehingga kuota yang ada pada prodi-prodi tersebut cepat terisi;

4. sosialisasi pentingnya pendidikan di jenjang perguruan tinggi melalui media massa; kerja sama antar instansi/lembaga dan dunia kerja dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
5. melanjutkan pembiayaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi baik melalui APBN, Non APBN, maupun melalui partisipasi masyarakat;
6. melanjutkan program-program inovasi pada pendidikan tinggi sesuai kebijakan Kampus Merdeka untuk menarik minat masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi;
7. revitalisasi pendidikan tinggi vokasi khususnya di wilayah timur Indonesia, sebagai salah satu proyek prioritas pada RPJMN tahun 2020-2024.

SS 2**Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang**

Sampai tahun 2020, upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan diseluruh jenjang terus dilakukan melalui kebijakan Merdeka Belajar; salah satunya adalah mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, swasta, guru, satuan pendidikan, dunia kerja, keluarga, dan masyarakat.



Fleksibilitas dan inovasi yang diusung dalam kebijakan Merdeka Belajar sudah digulirkan mulai dari asesmen nasional yang fokus pada perbaikan proses pembelajaran pada satuan pendidikan, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), fleksibilitas dalam pembukaan program studi baru pada pendidikan tinggi, pemberian kesempatan kepada mahasiswa sampai tiga semester untuk belajar di luar program studinya, program Guru Penggerak untuk meningkatkan kompetensi guru, serta Sekolah Penggerak. Kebijakan Merdeka Belajar sejalan dengan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024, yakni peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan penjaminan mutu, serta penguatan tata kelola pembangunan pendidikan.

Secara umum, capaian SS 2 tersebut didukung oleh 11 (sebelas) IKSS. Namun terdapat 3 (tiga) IKSS tidak dilaksanakan pada tahun 2020, sehingga hanya ada 8 (delapan) Indikator IKSS yang dilaksanakan pada tahun 2020, sebagai berikut:

IKSS 2.1

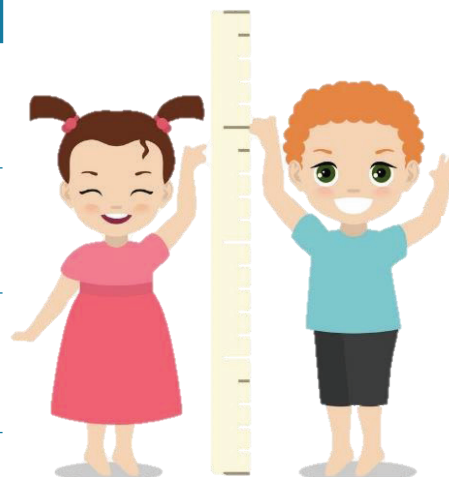
Nilai Rata-Rata Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak 5-6 Tahun

Tingkat pencapaian perkembangan anak 5-6 tahun adalah ketika anak sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan pedoman universal perkembangan anak secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Pengukuran dilakukan dengan melihat rapor anak yang merujuk pada penilaian 6 aspek yaitu:

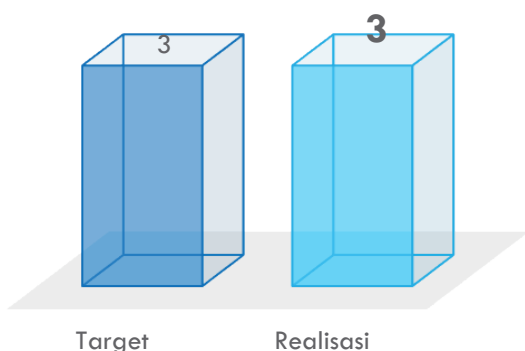


Penjelasan dari nilai tingkat pencapaian perkembangan anak (usia 5-6 tahun) adalah:

Nilai	Jenis Perkembangan	Keterangan
1	Belum Berkembang (BB)	Anak belum menunjukkan kemampuan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya
2	Mulai Berkembang (MB)	Anak sudah mulai menunjukkan kemampuan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya
3	Berkembang Sesuai Harapan (HSH)	Anak sudah menunjukkan kemampuan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya
4	Berkembang Sangat Baik (BSB)	Anak menunjukkan kemampuan melebihi/diatas indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya



Nilai Rata-Rata Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (5-6 Tahun) Tahun 2020



Pada tahun 2020, target indikator kinerja untuk nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak 5-6 adalah 3 (Berkembang Sesuai Harapan), yang mengindikasikan anak sudah menunjukkan kemampuan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya. Target tersebut dapat tercapai sebesar 100%. Pencapaian target ini didasarkan atas pengukuran tahun 2019 melalui survei perhitungan penilaian tingkat pencapaian perkembangan anak 5-6 tahun.

Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. pemberian bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) kepada 410 lembaga pendidikan PAUD untuk mendorong peningkatan ketersediaan dukungan pembelajaran berkualitas pada lembaga PAUD;
2. mendukung pembangunan/revitalisasi 16 Lembaga PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak, sebagai bagian dari Kebijakan Merdeka Belajar;
3. pemberian dukungan bagi Lembaga PAUD yang masih terakreditasi C, serta mendukung penyiapan materi pembelajaran bagi pendidik, khususnya materi bidang literasi kemaritiman, kebencanaan, sosial finansial, dan *coding*;

4. memberikan dukungan dan bantuan melalui gugus tugas PAUD Holistik Integratif (HI) yang sudah terbentuk, serta mendorong kabupaten/kota lainnya untuk membentuk gugus tugas PAUD HI, dan melaksanakan sosialisasi PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif;
5. melakukan berbagai kegiatan lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Lembaga PAUD, antara lain menyusun pedoman untuk orang tua dan pendidik yang terdiri dari 12 buku saku pendidik, 8 (delapan) buku saku orang tua, 30 buku bahan ajar orang tua (dalam bentuk *e-book* dan video animasi); membuat 200 video audio dongeng; serta menyelenggarakan webinar kelas orang tua berbagi dalam rangka meningkatkan kapasitas orang tua anak mengenai berbagai pengetahuan dan kompetensi.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. pandemi Covid-19 menyebabkan pendidik tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara optimal (anak belajar dari rumah);
2. belum meratanya kualitas lembaga PAUD sehingga mempengaruhi kualitas pembelajaran yang diberikan;
3. belum tersedianya informasi data yang memadai mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak, dan informasi tersebut hanya diperoleh dari orang tua sehingga hasil yang diperoleh tidak optimal.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. melakukan inovasi dalam kurikulum agar penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 tidak terganggu, yakni pembelajaran yang fokus pada kecakapan hidup;
2. menyusun kurikulum khusus sebagai antisipasi pandemi sesuai Kepmendikbud No. 719/B/2020 tentang penggunaan kurikulum darurat sehingga satuan PAUD dapat memilih menggunakan kurikulum yang disederhanakan;
3. memaksimalkan belajar dari rumah;
4. memaksimalkan bahan pengajaran melalui daring;
5. memberikan bantuan sarana berupa kuota internet untuk mendukung pembelajaran daring bagi masyarakat yang kurang mampu;

6. memberikan bantuan baik kepada lembaga PAUD dan pendidik PAUD untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
7. memberikan pengetahuan kepada orangtua dan masyarakat mengenai metode pembelajaran secara mandiri di rumah.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. menyusun teknik pembelajaran yang tidak hanya luring tapi juga daring;
2. menyusun indikator dan mekanisme yang memungkinkan penilaian peserta didik secara daring;
3. menyusun modul-modul pembelajaran yang interaktif dan inovatif untuk meningkatkan minat peserta didik;
4. melakukan sosialisasi berkesinambungan kepada masyarakat terkait pengetahuan mengenai teknik pembelajaran yang tidak hanya berbasis luring tapi juga daring.
5. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

IKSS 2.2

Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan jenis asesmen yang dilakukan Kemendikbud untuk mengetahui kompetensi minimal peserta didik dalam bidang literasi, numerasi, dan sains. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pendidikan dan dalam rangka memberikan masukan kepada pihak yang terkait untuk melakukan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kondisi sekolah.

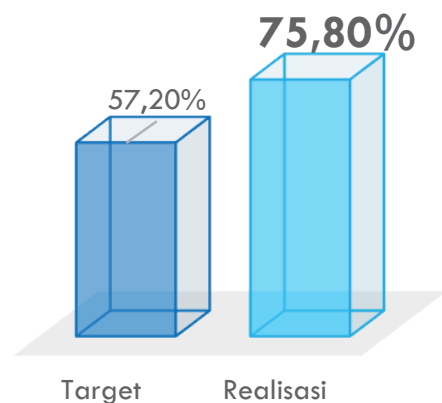


Kompetensi literasi minimum yang dimaksud adalah kompetensi literasi membaca yang sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (*grade expected level*). Standar ini ditetapkan melalui panel praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen. Perhitungan persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi memenuhi kompetensi minimum dengan menghitung

Jumlah siswa dengan nilai literasi yang masuk ke *expected level*
 \times 100%
 Jumlah siswa peserta AKM literasi

Dikarenakan AKM belum dilakukan secara nasional akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, perhitungan capaian AKM ini berdasarkan hasil asesmen bidang literasi dan numerasi tahun 2019. Untuk jenjang SD menggunakan data *Indonesia National Assesment Program (INAP)*, sedangkan jenjang SMP dan SMA menggunakan data Ujian Nasional (UN). Berdasarkan hasil tahun 2019 tersebut, persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi (literasi) memenuhi kompetensi minimum, pada tahun 2020 telah mencapai 75,80%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 57,20%, atau realisasi capaian sebesar 132,51%.

Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum Tahun 2020



Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. kajian akademik dalam mengembangkan AKM yang berdampak pada perbaikan kualitas belajar mengajar dalam rangka peningkatan hasil belajar siswa, khususnya kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi;
2. pengembangan soal akademik untuk digunakan dalam AKM sebanyak 54.467 butir soal tes prestasi akademik dan 11.359 butir soal AKM, sehingga total soal yang dihasilkan sebanyak 65.826 butir soal;

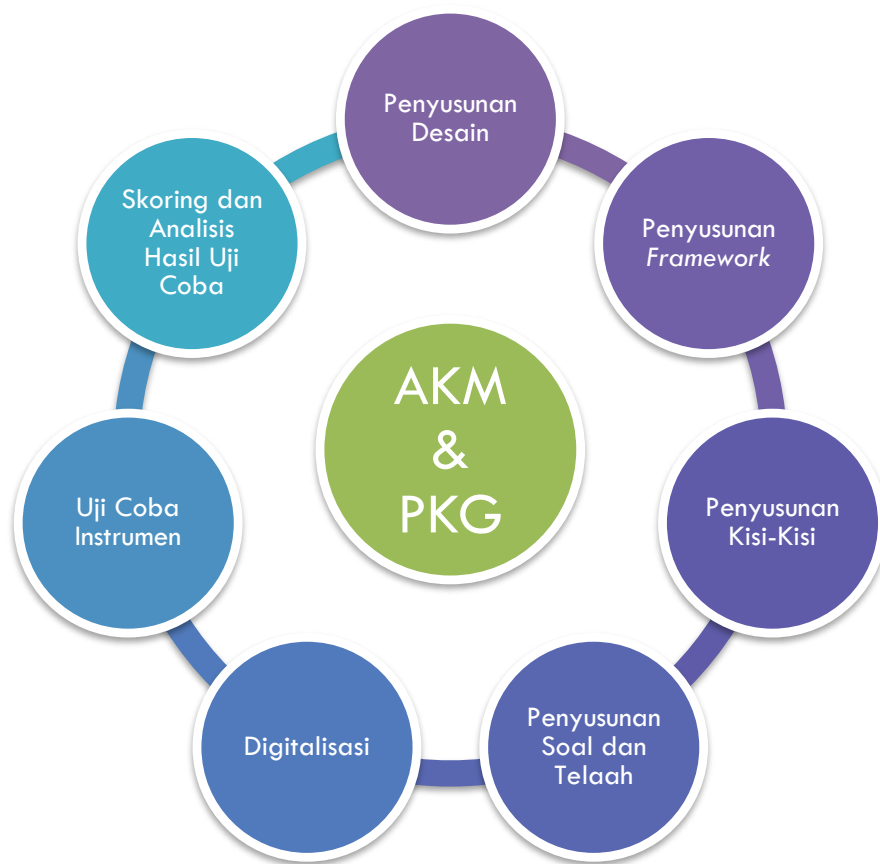
Pengembangan Instrumen Penilaian Akademik

Jumlah Soal yang Dikembangkan



3. sosialisasi program AKM baik di internal Kemendikbud maupun kepada dinas pendidikan pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, siswa, dan orang tua;
4. memberikan pendampingan dan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran dan penilaian pada masa pandemi Covid-19;
5. melakukan pembinaan bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan satuan pendidikan dalam menjalankan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sehingga berdampak pada peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Alur Pengembangan Instrumen Penilaian Akademik (AKM) & Pengukuran Kompetensi Guru



Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. belum optimalnya pemahaman dari berbagai pihak terkait kebijakan AKM yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang baru diperkenalkan sehingga memerlukan penyesuaian dalam proses implementasinya;
2. belum optimalnya pemahaman serta adanya perbedaan persepsi mengenai asesmen di tingkat pemangku kepentingan, mulai dari guru dan satuan pendidikan, tenaga kependidikan, siswa, dan masyarakat;
3. penerapan AKM di tahun 2020 masih dalam bentuk persiapan instrumen penilaian dan sosialisasi, serta baru akan mulai dilaksanakan pada tahun 2021; hal ini menyebabkan hasil asesmen belum tersedia.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. meningkatkan kinerja dan koordinasi terkait AKM, baik antar unit di Kemendikbud, maupun dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya seperti guru dan satuan pendidikan, tenaga kependidikan, siswa, dan masyarakat;
2. melakukan sosialisasi secara terus menerus untuk menyamakan pemahaman dan persepsi terkait pelaksanaan AKM;
3. memanfaatkan berbagai hasil asesmen yang relevan pada tahun sebelumnya sebagai dasar penilaian hasil AKM tahun 2020.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. perencanaan yang lebih matang pada unit-unit terkait mengenai pelaksanaan AKM;
2. peningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai asesmen kompetensi baik di internal Kemendikbud maupun di tingkat pemerintah daerah serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya seperti guru dan satuan pendidikan, tenaga kependidikan, siswa, dan masyarakat;
3. penyiapan berbagai inspirasi praktik baik pelaksanaan pembelajaran dan penilaian berbasis kompetensi;
4. pendampingan yang lebih intensif kepada satuan pendidikan melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.

IKSS 2.3

Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum

Kompetensi numerasi adalah kompetensi yang sesuai dengan standar capaian kompetensi kelas (*grade expected level*). Standar ini ditetapkan melalui panel praktisi kurikulum, pembelajaran serta asesmen.

2020

• Target = 26,50%
• Realisasi = 17,43%
• Capaian = 65,77%

Renstra

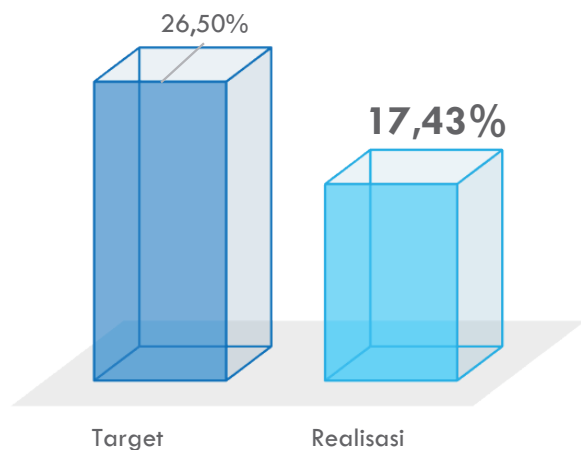
• Target Akhir 2024 = 30,10%
• Capaian Akhir 2024 = 57,91%

Perhitungan persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi numerasi memenuhi kompetensi yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah siswa dengan nilai numerasi yang masuk ke } \textit{expected level}}{\text{Jumlah siswa peserta AKM numerasi}} \times 100\%$$

Dikarenakan AKM belum dilakukan secara nasional karena pandemi Covid-19 pada tahun 2020, perhitungan capaian AKM ini berdasarkan hasil asesmen bidang literasi dan numerasi tahun 2019. Untuk jenjang SD menggunakan data Indonesia *National Assesment Program* (INAP), sedangkan jenjang SMP dan SMA menggunakan data Ujian Nasional (UN). Berdasarkan hasil asesmen tahun 2019 tersebut, persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi numerasi memenuhi kompetensi minimum, pada tahun 2020 baru mencapai 17,43% dari target 26,50% sehingga realisasi pencapaian target sebesar 65,77%.

Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum Tahun 2020



Kegiatan

Sama halnya dengan program dan kegiatan yang mendukung AKM literasi, program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi numerasi memenuhi kompetensi minimum, yakni sebagai berikut:

1. kajian akademik dalam mengembangkan AKM yang berdampak pada perbaikan kualitas belajar mengajar dalam rangka peningkatan hasil belajar siswa khususnya kemampuan literasi membaca dan literasi numerasi;
2. pengembangan soal akademik untuk digunakan dalam AKM sebanyak 54.467 butir soal tes prestasi akademik dan 11.359 butir soal AKM, sehingga total soal yang dihasilkan sebanyak 65.826 butir soal;
3. sosialisasi program AKM baik di internal Kemendikbud maupun kepada dinas pendidikan pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, siswa, dan orang tua;

4. memberikan pendampingan dan pembinaan kepada satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran dan penilaian pada masa pandemi Covid-19;
5. melakukan pembinaan bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan satuan pendidikan dalam menjalankan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sehingga berdampak pada peningkatan kualitas satuan pendidikan.



Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. belum optimalnya pemahaman dari berbagai pihak terkait kebijakan AKM yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang baru diperkenalkan sehingga memerlukan penyesuaian dalam proses implementasinya;
2. belum optimalnya pemahaman serta adanya perbedaan persepsi mengenai asesmen di tingkat pemangku kepentingan, mulai dari guru dan satuan pendidikan, tenaga kependidikan, siswa, dan masyarakat;
3. penerapan AKM di tahun 2020 masih dalam bentuk persiapan instrumen penilaian dan sosialisasi, serta baru akan mulai dilaksanakan pada tahun 2021; hal ini menyebabkan hasil asesmen belum tersedia.



Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. meningkatkan kinerja dan koordinasi terkait AKM, baik antar unit di Kemendikbud, maupun dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya seperti guru dan satuan pendidikan, tenaga kependidikan, siswa, dan masyarakat;
2. melakukan sosialisasi secara terus menerus untuk menyamakan pemahaman dan persepsi terkait pelaksanaan AKM;
3. memanfaatkan berbagai hasil asesmen yang relevan pada tahun sebelumnya sebagai dasar penilaian hasil AKM tahun 2020.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. perencanaan yang lebih matang pada unit-unit terkait mengenai pelaksanaan AKM;
2. meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai asesmen kompetensi baik di internal Kemendikbud maupun di tingkat pemerintah daerah serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya seperti guru dan satuan pendidikan, tenaga kependidikan, peserta didik, dan masyarakat;
3. penyiapan berbagai inspirasi praktik baik pelaksanaan pembelajaran dan penilaian berbasis kompetensi;
4. pendampingan yang lebih intensif kepada satuan pendidikan melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran.

IKSS 2.4

Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Membaca

Programme for International Student Assessment (PISA) adalah evaluasi sistem pendidikan terhadap peserta didik usia sekolah yang bersekolah berdasarkan kemampuan kinerjanya di bidang matematika, sains dan literatur. PISA merupakan tes diagnosis terhadap kompetensi peserta didik dalam membaca yang dilakukan oleh OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) secara berkala.



*) Tahun 2020 tidak ditargetkan pada Perjanjian Kinerja

Sampai dengan tahun 2018, capaian peserta didik Indonesia pada asesmen PISA belum menggemblirakan dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia. Untuk bidang matematika, misalnya, Indonesia berada di peringkat 72 dari 78 negara yang berpartisipasi dalam PISA. Hasil yang kurang lebih sama ditunjukkan untuk tes sains dan membaca. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi Indonesia, khususnya Kemendikbud untuk melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan capaian peserta didik pada tes PISA.

Rerata nilai PISA membaca dihitung berdasarkan siswa sampel usia 15 tahun di Indonesia yang bersekolah di SMP/MTS/SMA/MA/SMK. Jumlah sampel minimal setiap negara adalah 5000 siswa. Kenaikan rerata nilai PISA merupakan dampak dari perbaikan:

- kualitas guru dan calon guru;
- kualitas pembelajaran;
- mutu sumber pembelajaran dan bahan belajar;
- dukungan lingkungan belajar;
- peningkatan *soft skills* dan karakter peserta didik;
- perbaikan manajemen pendidikan yang berbasis mutu hasil belajar.

Metode penghitungan nilai rata-rata hasil PISA: Membaca, adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai peserta PISA: Membaca}}{\text{Jumlah peserta PISA: Membaca}} \times 100\%$$

Penyelenggaraan PISA dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan terakhir dilakukan pada tahun 2018. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, tes PISA yang seharusnya dilakukan kembali pada tahun 2021, diundur pelaksanaannya menjadi tahun 2022. Pada tahun 2020, IKSS terkait nilai rata-rata hasil PISA Membaca tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang berkaitan dengan nilai PISA selaras dengan program dan kegiatan untuk mendukung indikator kinerja yang berkaitan dengan AKM. Rancangan AKM yang menitikberatkan kemampuan literasi dan numerasi dengan model asesmen menyerupai tes PISA diharapkan dapat mendorong capaian indikator kinerja terkait PISA. Disamping itu, indikator kinerja PISA juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikator bagi Pemerintah Indonesia untuk mengukur kemampuan daya saing peserta didik Indonesia di tingkat global.

IKSS 2.5

Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Matematika

Sama halnya dengan PISA Membaca, nilai rata-rata hasil PISA Matematika juga merupakan evaluasi sistem pendidikan terhadap siswa usia sekolah yang bersekolah berdasarkan kemampuan kinerjanya di bidang matematika. Tes PISA Matematika merupakan tes diagnosis terhadap



*) Tahun 2020 tidak ditargetkan pada Perjanjian Kinerja

kompetensi siswa dalam bidang Matematika yang dilakukan oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) secara berkala (per 3 tahun).



Rerata nilai PISA matematika dihitung berdasarkan peserta didik sampel usia 15 tahun di Indonesia yang bersekolah di SMP/MTS/SMA/MA/SMK. Jumlah sampel minimal setiap negara adalah 5000 peserta didik. Metode penghitungan nilai rata-rata hasil PISA: Matematika, adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai peserta PISA: Matematika}}{\text{Jumlah peserta PISA: Matematika}} \times 100\%$$

Penyelenggaraan PISA dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan terakhir dilakukan pada tahun 2018. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, tes PISA yang seharusnya dilakukan kembali pada tahun 2021, diundur pelaksanaannya menjadi tahun 2022.

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang berkaitan dengan nilai PISA selaras dengan program dan kegiatan untuk mendukung indikator kinerja yang berkaitan dengan AKM. Rancangan AKM yang menitikberatkan kemampuan literasi dan numerasi dengan model asesmen menyerupai tes PISA, diharapkan dapat mendorong capaian indikator kinerja terkait PISA. Disamping itu, indikator kinerja PISA juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikator bagi Pemerintah Indonesia untuk mengukur kemampuan daya saing peserta didik Indonesia di tingkat global.

IKSS 2.6

Nilai Rata-Rata Hasil PISA: SAINS

Nilai rata-rata hasil PISA Sains merupakan hasil evaluasi sistem pendidikan terhadap peserta didik usia sekolah yang bersekolah berdasarkan kemampuan kinerjanya di bidang Sains. PISA Sains merupakan tes diagnosis terhadap kompetensi peserta didik dalam bidang Sains yang dilakukan oleh OECD secara berkala.



*) Tahun 2020 tidak ditargetkan pada Perjanjian Kinerja

Rerata nilai PISA Sains dihitung berdasarkan peserta didik sampel usia 15 tahun di Indonesia yang bersekolah di SMP/MTS/SMA/MA/SMK. Jumlah sampel minimal setiap negara adalah 5000 siswa. Kenaikan rerata nilai PISA merupakan dampak dari perbaikan:

- kualitas guru dan calon guru;
- kualitas pembelajaran;
- mutu sumber pembelajaran dan bahan belajar ;
- dukungan lingkungan belajar;
- peningkatan *softs kills* dan karakter peserta didik;
- perbaikan manajemen pendidikan yang berbasis mutu hasil belajar.

Metode penghitungan nilai rata-rata hasil PISA: Sains, adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai peserta PISA: Sains}}{\text{Jumlah peserta PISA: Sains}} \times 100\%$$

Penyelenggaraan PISA dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun dan terakhir dilakukan pada tahun 2018. Sehubungan dengan pandemi Covid-19, tes PISA yang seharusnya dilakukan Kembali pada tahun 2021, diundur pelaksanaannya menjadi tahun 2022.

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang berkaitan dengan nilai PISA selaras dengan program dan kegiatan untuk mendukung indikator kinerja yang berkaitan dengan AKM. Rancangan AKM yang menitikberatkan kemampuan literasi dan numerasi dengan model asesmen

menyerupai tes PISA, diharapkan dapat mendorong capaian indikator kinerja terkait PISA. Disamping itu, indikator kinerja PISA juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikator bagi Pemerintah Indonesia untuk mengukur kemampuan daya saing peserta didik Indonesia di tingkat global.

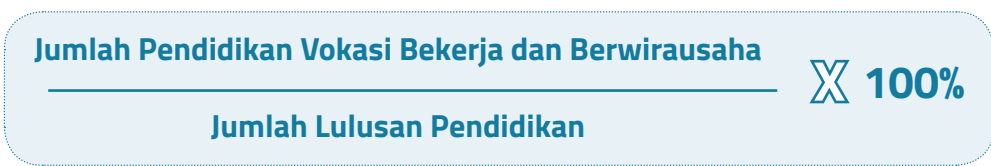
IKSS 2.7

Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan

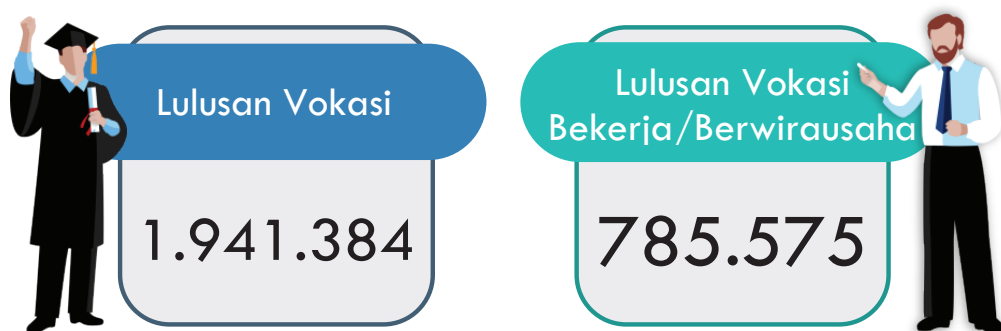
Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang diterima di dunia kerja dan berwirausaha. Lulusan pendidikan vokasi bekerja yang dihitung adalah peserta didik yang lulus kemudian bekerja atau berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan berbanding dengan jumlah lulusan selama satu tahun. Data ini diperoleh melalui hasil survei Sakernas yang dikomparasikan dengan data internal Ditjen Vokasi melalui hasil riset evaluasi BKK (Bursa Kerja Kursus) *online*.



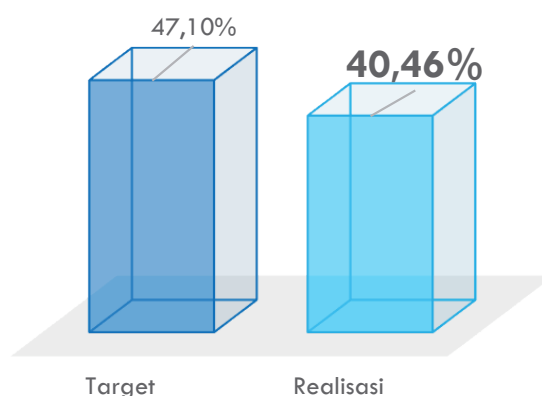
Kategori lulusan pendidikan vokasi yang bekerja adalah lulusan yang tercatat maupun yang ikut dalam proses produksi sebagai tenaga kerja di dunia kerja. Sementara yang berwirausaha adalah lulusan yang atas inisiatifnya mendirikan suatu usaha yang dikelola sendiri. Metode perhitungan lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun, adalah sebagai berikut:



Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 adalah sebesar 40,46%, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 47,10%, atau realisasi capaian sebesar 85,90%. Hasil ini memperlihatkan masih terdapat kesenjangan 14,10% tidak tercapai pada tahun 2020 sehingga perlu ada inovasi dan strategi di tahun 2021 untuk menuntaskan kekurangan target yang tidak tercapai tersebut. Sebagai salah satu program prioritas pada RPJMN tahun 2020-2024, Kemendikbud terus berinovasi untuk memastikan lulusan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga siap untuk berwirausaha. Berbagai program dan kegiatan dilakukan sesuai dengan arah kebijakan nasional pada RPJMN, antara lain pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, mengoptimalkan peran dunia kerja



Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Tahun 2020



dalam pengembangan pendidikan vokasi, penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi, serta pembelajaran inovatif dengan melibatkan profesional dalam penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran.

Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. program *link and match* SMK dengan dunia kerja, dengan melibatkan praktisi profesional dalam proses pembelajaran di sekolah. Keterlibatan praktisi profesional dalam pembelajaran di SMK bertujuan untuk membawa atmosfer dunia kerja ke dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah sehingga peserta didik benar-benar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang aktivitas yang akan dihadapi di dunia kerja nantinya;
2. program revitalisasi sekolah yaitu berupa pengembangan SMK sebagai Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*), dimana sekolah target merupakan SMK yang mempunyai kinerja sangat baik (*excellent*), sehingga dapat sebagai penggerak baik secara aktif maupun secara pasif dan mampu menyelenggarakan peningkatan kompetensi kejuruan Guru SMK lainnya. SMK yang

memiliki keunggulan tersebut, antara lain:

- a. memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, baik guru yang bersertifikasi atau guru yang memiliki pengalaman industri;
 - b. modernisasi sarana dan prasarana SMK;
 - c. lulusan-lulusan yang tersertifikasi industri dan keterserapan di dunia kerja;
 - d. mampu membuat produk sendiri dengan capaian produk unggulan, tersertifikasi HAKI, dan produk laku terjual;
 - e. berprestasi, baik prestasi guru maupun siswa dalam lomba tingkat lokal, nasional, dan internasional;
 - f. pengembangan *entrepreneurship* dengan indikator yaitu: tumbuhnya *start-up* bisnis kelompok usaha di sekolah, capaian omset, dan inkubator wirausaha;
 - g. kerja sama dengan industri, misalnya mendatangkan guru tamu dari industri, melakukan *sharing* sumber daya, melakukan pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, dan mengadakan magang dengan industri;
 - h. tata kelola menuju *smart school* dan mengimplementasikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - i. implementasi pembelajaran di era Industri 4.0;
 - j. pengembangan digital *skill* dalam pembelajaran, seperti *coding* dan bisnis digital;
 - k. SMK yang menjadi penggerak bagi pengembangan potensi wilayahnya dan potensi kerja global;
 - l. sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan;
 - m. melaksanakan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).
3. program pengembangan *Teaching Factory*, untuk menghadirkan suasana yang mendekati lingkungan dan aktivitas industri sesungguhnya melalui kerjasama dengan industri dengan pembelajaran berbasis produk untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter berbudaya kerja dan berjiwa wirausaha melalui kegiatan produksi baik berupa barang atau jasa yang memiliki standar perencanaan, prosedur dan pengendalian kualitas industri dan layak dipasarkan ke konsumen/masyarakat;
 4. program sertifikasi siswa SMK yang menasar 138.200 siswa SMK sehingga lulusan SMK siap masuk ke dunia kerja yang membutuhkan sertifikat keahlian tertentu;
 5. program peningkatan mutu 171 program studi pada perguruan tinggi vokasi untuk memastikan proses pembelajaran berkualitas dapat terlaksana;

6. SMK yang mendapatkan peralatan pendidikan yang memenuhi kriteria minimum, untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan pembelajaran bermutu. Dengan tersedianya peralatan pendidikan ini, SMK diharapkan mampu mengembangkan pendidikan kejuruan yang semakin relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berubah sesuai perkembangan dunia kerja;
7. program PKK, merupakan program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, diberikan kepada 53.709 orang peserta didik untuk memperoleh kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia kerja. Program ini diberikan pada warga masyarakat dengan prioritas usia 15 s.d 25 tahun dengan kriteria:
 - a. anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) atau lulus tidak melanjutkan;
 - b. warga belajar paket C Vokasi;
 - c. warga masyarakat menganggur atau tidak memiliki pekerjaan;
 - d. memiliki NIK dan tidak sedang mengikuti program sejenis yang dibiayai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
8. program PKW, bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dijadikan sebagai bekal wirausaha, diberikan kepada 16.676 peserta didik pada lembaga yang terakreditasi A/B, mempunyai NPSN, telah memiliki kerja sama dengan industri, serta memiliki sarana dan prasarana sesuai standar industri. Penerima bantuan ini adalah warga masyarakat dengan prioritas usia 15-25 tahun dengan kriteria:
 - a. putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan;
 - b. belum memiliki pekerjaan tetap atau menganggur;
 - c. prioritas dari keluarga kurang mampu.



Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. pandemi Covid-19 yang terjadi menyebabkan pembelajaran tidak dapat dilakukan dengan tatap muka, khususnya apabila peserta didik SMK perlu melakukan proses pembelajaran praktek, sehingga tujuan pembelajaran atau kompetensi-kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh lulusan banyak menjadi kurang optimal;
2. belum optimalnya sebagian kompetensi lulusan yang dihasilkan PT Vokasi sesuai dengan harapan dunia kerja;
3. belum optimalnya *database* lulusan yang langsung bekerja atau berwirausaha;

4. belum optimalnya proses pengadaan bantuan kepada satuan pendidikan karena terkendala e-katalog;
5. belum optimalnya penerapan TEFA di beberapa SMK serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah sehingga belum menjadi prioritas pilihan bagi dunia kerja dalam melakukan kerja sama.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. pembelajaran dilakukan secara daring untuk teori, dan dilakukan pembelajaran tatap muka dengan membagi beberapa kelompok khusus untuk materi praktek. Selain itu, inovasi media pembelajaran juga dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan dan kondisi peserta didik;
2. memberikan advokasi dan fasilitasi terkait pengembangan TEFA di Sekolah menengah kejuruan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah agar satuan pendidikan semakin berinovasi dan berinisiatif untuk melakukan pengembangan keberlangsungan TEFA sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengembangan sekolah yang selaras dengan visi dan misi pendirian sekolah;
3. berkoordinasi dan bekerja sama dengan satuan pendidikan terkait pemutakhiran *database* kelulusan sehingga lulusan yang bekerja atau berwirausahaan dapat ditelusuri.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai, antara lain

1. meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas khususnya pendidikan vokasi;
2. memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya);
3. mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja;
4. memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah;
5. modernisasi sarana dan prasarana SMK;
6. pengembangan *enterpreunership* dengan indikator yaitu: tumbuhnya startup bisnis kelompok usaha di sekolah, capaian omset, dan inkubator wirausaha;

7. kerja sama dengan industri, misalnya mendatangkan guru tamu dari industri, melakukan sharing terkait sumber daya, melakukan pengembangan kurikulum yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri, dan mengadakan magang dengan industri;
8. mewajibkan pengisian nomor kontak pada aplikasi Dapodik untuk memudahkan penelusuran lulusan.

IKSS 2.8

Persentase Lulusan PT yang Langsung Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan

Terdapat dua kategori yang menjadi pertimbangan dalam melakukan perhitungan untuk jumlah lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja yaitu kategori lulusan yang bekerja dan lulusan yang berwirausaha. Kumulasi dari kedua kategori tersebut akan dibandingkan dengan jumlah lulusan dalam laporan *tracer study* Perguruan Tinggi.

2020

- Target = 64,77%
- Realisasi = 75,40%
- Capaian = 116,41%

Renstra

- Target Akhir 2024 = 66,70%
- Capaian Akhir 2024 = 113,04%



Bekerja

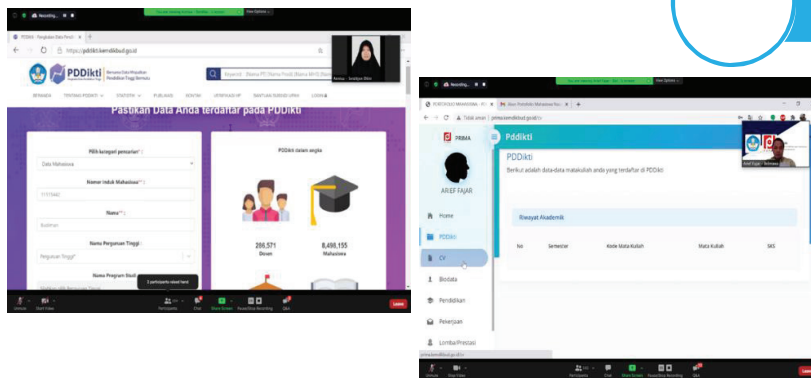
- Waktu < 6 Bulan
- Gaji > 1,2 X UMR
 - Swasta
- Organisasi Nirlaba/ Multilateral
- Lembaga Pemerintah
 - BUMN/BUMD
- Penghasilan > 1,2 X UMR Sebelum Lulus

Berwirausaha

- Waktu < 6 Bulan
- Gaji > 1,2 X UMR
- Pendiri/Pasangan Pendiri
 - Pekerja Lepas
- Penghasilan > 1,2 X UMR Sebelum Lulus



Tracer study yang dilakukan dalam menghitung masa tunggu lulusan pendidikan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Hasil *tracer study* dapat digunakan perguruan tinggi untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukan terhadap anak didiknya. Dalam penilaian akreditasi selalu mempersyaratkan adanya data hasil *tracer study* tersebut melalui parameter masa tunggu lulusan, persen lulusan yang sudah bekerja, dan penghasilan pertama yang diperoleh.



Tahapan *Tracer Study*

- 1 **Persiapan**
- 2 **Pelaksanaan**
- 3 **Pengumpulan data**
- 4 **Unggah data pada *Tracer Study***

Keberhasilan capaian jumlah persentase lulusan yang langsung bekerja sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data hasil *tracer study* yang dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, pembaruan data yang valid tentang jumlah lulusan yang sudah bekerja melalui kegiatan *tracer study* yang dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia perlu dioptimalkan dan dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini untuk memungkinkan data hasil *tracer study* dapat menggambarkan keadaan alumni perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Metode penghitungan indikator kinerja tersebut adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Lulusan Pendidikan Tinggi Langsung Bekerja / Berwirausaha}}{\text{Jumlah Lulusan Dalam Laporan Tracer Study Perguruan Tinggi}} \times 100\%$$

Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja merupakan indikator untuk mengukur lulusan perguruan tinggi yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha dengan masa tunggu kurang dari 12 bulan berdasarkan laporan *tracer study* perguruan tinggi terhadap lulusan yang lulus 2 tahun sebelum pelaksanaan *tracer study*. Perguruan tinggi yang dimaksud adalah Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta.

Berdasarkan hasil persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan, capaian tahun 2020 sebesar 75,40% melebihi dari yang ditargetkan sebesar 64,77%, atau realisasi capaian sebesar 116,41%.

Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. melakukan optimalisasi pendataan lulusan melalui sistem informasi terintegrasi *Tracer Study*;
2. melaksanakan program kewirausahaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan keahlian lulusan perguruan tinggi;
3. melaksanakan program pengembangan penalaran, kreativitas, dan inovasi bagi mahasiswa;
4. melaksanakan studi penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yakni memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau nonformal atau informal.

Selain itu, melalui Kebijakan Kampus Merdeka, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk belajar di luar program studinya maksimal 3 (tiga) semester untuk melakukan berbagai aktivitas antara lain melakukan magang/praktik kerja, menjalankan proyek di desa, mengajar di sekolah, mengikuti pertukaran pelajar, melakukan penelitian, melakukan kegiatan wirausaha, melakukan studi/proyek independen, dan melakukan proyek kemanusiaan.



Peluncuran Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Hal ini untuk mendorong mahasiswa agar terbiasa dengan lingkungan dunia kerja dan menemukenali masalah yang mungkin akan ditemui di dunia kerja. Selain itu, perguruan tinggi juga mendorong penyelenggaraan bursa kerja untuk mempertemukan mahasiswa dengan pelaku dunia kerja.

Hambatan

Meskipun pencapaian angka realisasi pada tahun 2020 sudah melebihi yang ditargetkan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan/kendala, antara lain:

1. pandemi COVID-19 mengakibatkan penyesuaian pelaksanaan program mulai dari koordinasi, sosialisasi, *workshop*, hingga pelaksanaan program;
2. perubahan waktu pelaksanaan program kewirausahaan mengakibatkan pelaksanaan di perguruan tinggi menjadi kurang optimal;
3. komitmen dan dukungan perguruan tinggi untuk kegiatan kewirausahaan yang masih beragam;
4. belum semua perguruan tinggi memiliki unit kewirausahaan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan program kewirausahaan, termasuk melakukan sosialisasi program kewirausahaan kepada mahasiswa;
5. sosialisasi dilakukan secara daring, sehingga informasi sosialisasi tidak merata dan beberapa perguruan tinggi, khususnya di wilayah timur terkendala jaringan;
6. belum optimalnya upaya *tracer study* dilakukan oleh perguruan tinggi sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara rutin;
7. permintaan data dalam pengisian sistem *tracer study* belum mengikat, sehingga ada perguruan tinggi yang menggunakan instrumen berbeda.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

1. mekanisme pembelajaran menggunakan metode daring untuk teori, dan metode pembelajaran tatap muka untuk materi praktek, melalui pembagian beberapa kelompok khusus. Selain itu, media pembelajaran pun dibuat seinovatif mungkin sesuai kebutuhan dan kondisi mahasiswa;
2. sosialisasi dan promosi sukses berwirausaha melalui perguruan tinggi dan berbagai media massa;
3. sosialisasi terhadap pengelola kewirausahaan lebih difokuskan pada perguruan tinggi;
4. mendorong setiap perguruan tinggi untuk memiliki unit pengelola kewirausahaan kampus;
5. pelatihan dan pembimbingan berwirausaha secara berkelanjutan;

6. pengembangan infrastruktur yang menunjang wirausahaan;
7. pelaksanaan sosialisasi serta pengisian data pada platform *tracer study* pada perguruan tinggi untuk mengoptimalkan pengisian data lulusan pada platform tersebut;
8. membuat surat edaran kembali untuk mengingatkan perguruan tinggi agar segera melaporkan data lulusannya kedalam sistem *tracer study*.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai, antara lain:

1. memberikan kompetensi tambahan kepada mahasiswa, yang disesuaikan dengan kebutuhan, serta memaksimalkan pemanfaatan bursa kerja;
2. meningkatkan jumlah dan peran guru/dosen yang berlatar belakang profesional atau berasal dari dunia kerja;
3. melaksanakan program magang/praktek kerja industri (PRAKERIN) minimal 1 (satu) semester;
4. melaksanakan program sertifikasi kompetensi yang sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja;
5. meningkatkan kompetensi guru/dosen/pengajar secara berkelanjutan terkait *update* teknologi dan *training* dari dunia kerja untuk pengajar;
6. bekerja sama dengan industri untuk meningkatkan komitmen penyerapan lulusan oleh dunia kerja;
7. memberikan beasiswa atau ikatan dinas untuk peserta didik serta donasi dari dunia kerja;
8. melaksanakan pembelajaran secara *online* dan presensi digital untuk mengoptimalkan pembelajaran;
9. melakukan penyusunan kurikulum bersama dan berstandar dunia kerja (penguatan aspek *softskill* dan karakter kebhkerjaan untuk melengkapi aspek *hardskill* yang sesuai kebutuhan dunia kerja);
10. melaksanakan pembelajaran berbasis *project real* dari dunia kerja (*Problem Based Learning*) sejak dini.
11. melaksanakan uji kompetensi;
12. melaksanakan pendampingan wirausaha mahasiswa Indonesia (PWMI);
13. melaksanakan expo kewirausahaan mahasiswa Indonesia;
14. melakukan sosialisasi secara terus menerus mengenai pentingnya membangun *tracer study* bagi perguruan tinggi;
15. mewajibkan perguruan tinggi untuk menggunakan instrument *tracer study* yang terstandar;

IKSS 2.9

Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.



Kualifikasi GTK Profesional

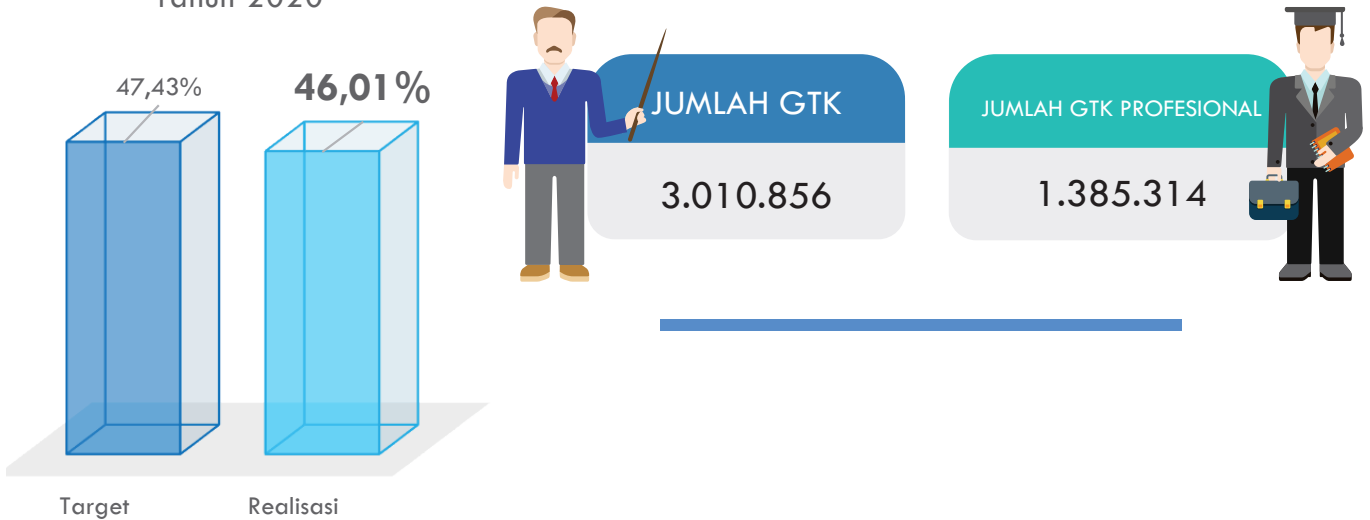
- ✓ Minimal S1/D4
- ✓ Memiliki kompetensi
- ✓ Sertifikat pendidik
- ✓ Sehat jasmani dan rohani
- ✓ Mampu mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional

Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) profesional dihitung dengan rumusan perbandingan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah profesional dengan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. GTK profesional adalah GTK yang memiliki kompetensi akademik minimal S1 dan bersertifikat pendidik/tenaga kependidikan.

$$\frac{\text{Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional}}{\text{Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja tersebut pada tahun 2020 sebesar 46,01%, lebih rendah dari yang ditargetkan, yakni sebesar 47,43% sehingga realisasi pencapaian target pada tahun 2020 sebesar 97,00%.

Persentase Guru dan Tenaga
Kependidikan Profesional
Tahun 2020



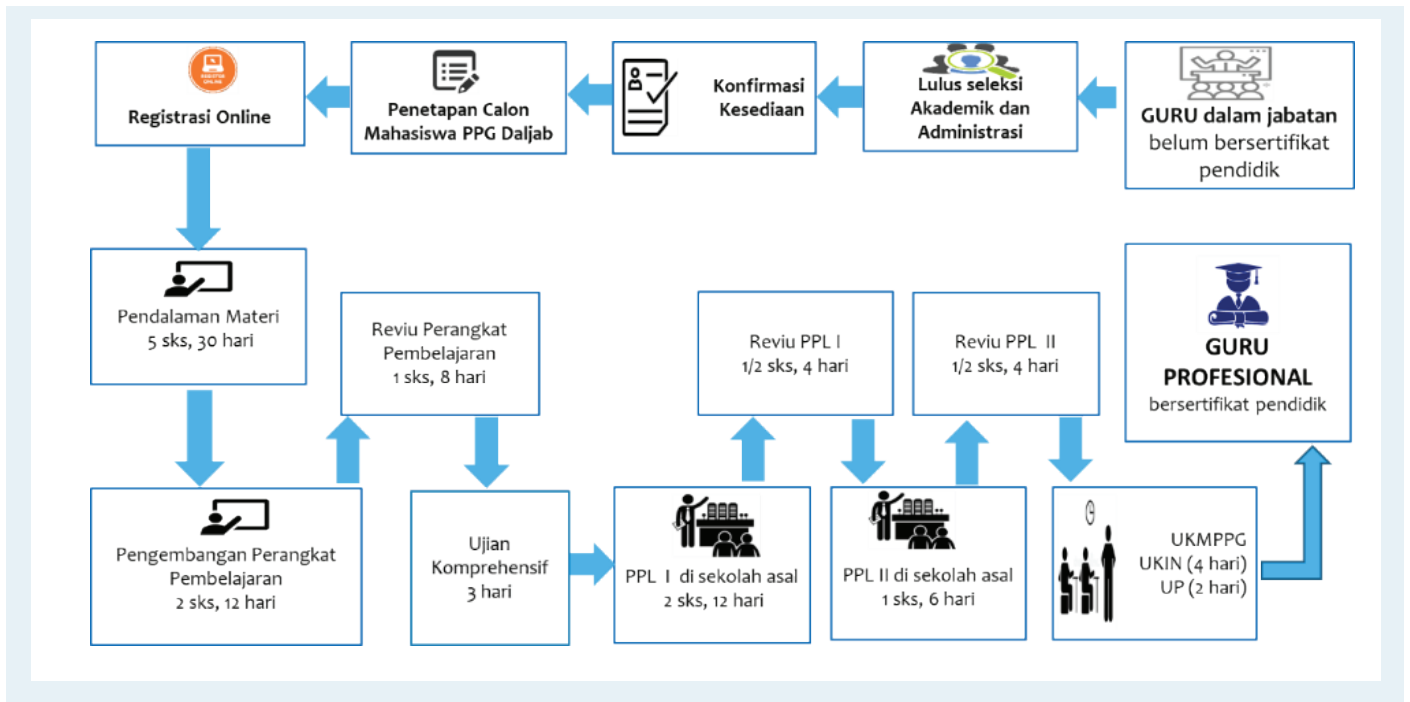
Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG)

	2020	2019	2018
Peserta	35.615		
Lulus Tahun 2020	20.060	316	71

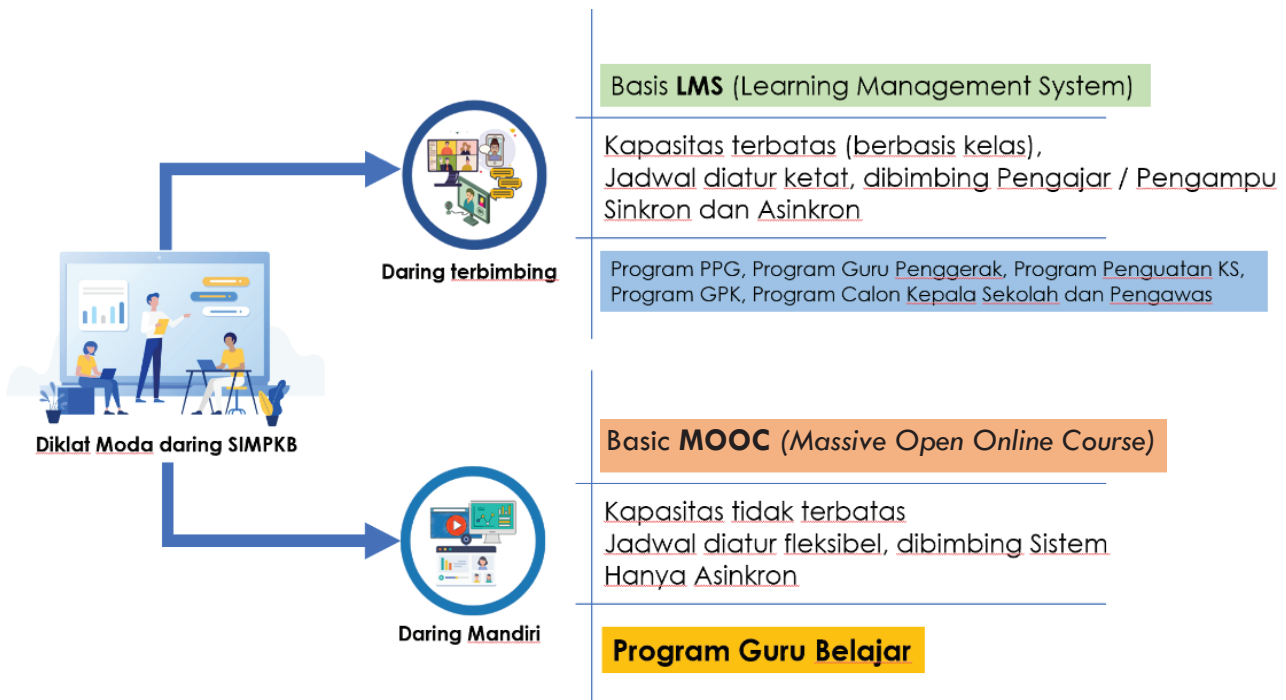
Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan Standar Pendidikan Guru;



2. menyelenggarakan program Diklat Penguatan Kepala Sekolah yang didasari dari Permendikbud No. 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai kepala sekolah yang mengharuskan kepala sekolah telah mengikuti diklat kepala sekolah;
3. menyelenggarakan Program Guru Penggerak, sebagai salah satu program dari Kebijakan Merdeka Belajar, merupakan program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran;
4. menyelenggarakan program inovasi sebagai wujud pendampingan terhadap guru menghadapi pembelajaran dari rumah akibat pandemi Covid-19, yaitu:
 - a. webinar Seri Guru Belajar yaitu seminar yang dilakukan secara daring yang memberikan informasi kepada guru dan tenaga kependidikan tidak hanya terkait model proses pembelajaran mata pelajaran secara PJJ, tapi juga memberikan informasi tentang dampak psikososial dan cara penanganannya;
 - b. program Guru Belajar adalah program peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan berbasis *Massive Open Online Course* (MOOC) yaitu metode belajar jarak jauh yang bisa diakses GTK secara mandiri;
 - c. program Guru Berbagi merupakan portal yang berisi sekumpulan praktik baik dari para guru, praktisi, serta komunitas penggerak pendidikan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran daring, luring maupun campuran, artikel fitur video dan berbagai aksi webinar, konferensi, dan aktifitas lainnya yang diselenggarakan baik oleh komunitas maupun Kemendikbud.



Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. pelatihan tidak dapat dilakukan dengan moda tatap muka dikarenakan pandemi Covid 19;
2. waktu pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang saling berdekatan;
3. pembatalan dan penundaan program dan kegiatan karena dana APBD;
4. tingkat partisipasi guru dalam berbagai program pengembangan kompetensi yang belum merata; dan
5. kemampuan IT sebagian guru dan tenaga kependidikan belum memadai.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan atau hambatan yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai, diantaranya adalah:

1. melakukan perubahan moda program menjadi *online* dan *hybrid*;
2. mengoptimalkan waktu yang tersedia;
3. menambah sasaran PKB dengan dana APBN; dan
4. melakukan pendampingan guru utamanya untuk program prioritas.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai, antara lain:

1. program perlu disiapkan untuk kedua moda: tatap muka dan *online*; *timeline* program perlu dilaksanakan sejak awal tahun;
2. meneruskan pola pendampingan untuk program lainnya;
3. sistem pembinaan karir guru dan tenaga kependidikan dikembangkan untuk meningkatkan profesionalitas dan motivasi dalam rangka meningkatkan karir serta penguatan kualitas layanan di satuan pendidikan;
4. sistem penjenjangan karir dibangun terintegrasi dengan sistem pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.



Aktivitas pembelajaran secara tatap muka

IKSS 2.10

Persentase Guru Kejuruan SMK yang Mempunyai Pengalaman Kerja di Industri/Sertifikasi Kompetensi yang Diakui oleh Industri

Persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi dari industri adalah persentase guru kejuruan dari SMK yang termasuk ke dalam 4 (empat) bidang prioritas pengembangan SMK sebagai pusat keunggulan/*Center of Excellence (COE)* yang mendapatkan *upskilling* dan *reskilling* oleh Industri dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kerjasama dengan dunia kerja dan/atau lembaga pendidikan dan pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan/ kompetensi dari dunia kerja.



Pelatihan *upskilling* adalah pelatihan berbasis industri bagi guru yang berorientasi pada peningkatan level kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang telah dimiliki sebelumnya. Pelatihan *reskilling* adalah pelatihan berbasis industri bagi guru yang berorientasi pada penguasaan kompetensi teknis/kejuruan/kerja yang belum dimiliki sebelumnya. Guru kejuruan yang menjadi target untuk dikembangkan

menjadi *Center of Excellence (COE)*, minimal 2 (dua) guru kejuruan setiap kompetensi keahlian dikembangkan dengan merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pendidikan Vokasi Nomor 16 tahun 2020.

Perhitungan persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri adalah sebagai berikut:

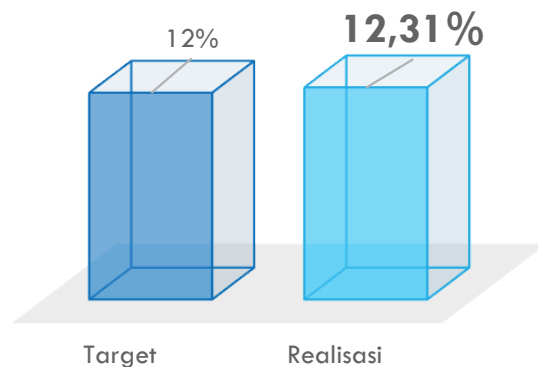
Jumlah Guru Kejuruan Tersertifikasi
di Industri

X 100%

Jumlah Guru Kejuruan SMK

Capaian tahun 2020 indikator kinerja terkait persentase guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri adalah sebesar 12,31%, lebih tinggi dari yang ditargetkan, yakni 12,00%, atau realisasi capaian sebesar 102,58%.

Persentase Guru Kejuruan SMK yang
Mempunyai Pengalaman Kerja di
Industri/Sertifikasi Kompetensi yang Diakui
oleh Industri Tahun 2020



Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. program *upskilling* dan *reskilling* guru kejuruan, menggunakan 2 (dua) mekanisme, yaitu
 - a. kontraktual dengan industri yang memiliki kapabilitas untuk melaksanakan program *upskilling* dan *reskilling* guru kejuruan berstandar industri; dan
 - b. melalui sistem kerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) yang bermitra dengan industri. Tahun 2020, sebanyak 2.646 orang guru mengikuti program *upskilling* dan *reskilling*, dimana 2.193 orang guru mengikuti *upskilling* dan *reskilling* bersama dengan BBPPMPV (BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata, BBPPMPV Pertanian, BBPPMPV Seni dan Budaya, BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik, BBPPMPV Bidang Otomotif dan Teknik Elektronika, BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri, dan BPPMPV Kelautan Perikanan dan TIK), dan 453 orang guru di industri (*United Tractor*, *Oracle Academy*, *L'Oreal Indonesia*, *PPTIK ITB*, *Dyandra Academy*, *AWS* dan *KEK Singhasari*, dan *AICI*);

2. program peningkatan kapabilitas dan manajerial Kepala SMK berbasis industri, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial, *entrepreneurship*, dan *leadership*. Program ini untuk memberikan bekal dan mengubah *mindset* para kepala SMK sebagai ujung tombak penggerak SMK untuk memiliki karakter layaknya seorang *Chief Executive Officer (CEO)*. Program ini dilaksanakan secara kontraktual bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki bidang bisnis dan manajemen dan sudah memiliki reputasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Sepanjang tahun 2020, sebanyak 930 Kepala SMK mengikuti Diklat CEO di 6 (enam) Perguruan Tinggi, sebagai berikut:



3. peningkatan mutu SDM Vokasi.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. tidak semua industri memiliki kapabilitas untuk menyelenggarakan program *upskilling* dan *reskilling*;
2. tidak semua industri memiliki sistem sertifikasi kompetensi;
3. terbatasnya daya tampung industri untuk menampung peserta program;
4. daya tampung perguruan tinggi terbatas untuk menampung peserta program;
5. standar harga yang ditawarkan industri melebihi plafon anggaran.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala adalah sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi, kerja sama, dan negosiasi dengan dunia kerja agar dapat mengoptimalkan penerimaan guru SMK yang akan dilatih;

2. melakukan koordinasi, kerja sama, dan negosiasi dengan dunia kerja agar dunia kerja bekerja sama dengan BBPPMPV sehingga sertifikasi kompetensi dapat diberikan melalui BBPMPV;
3. melakukan inovasi dan modifikasi mekanisme pelatihan baik luring maupun daring;
4. mengoptimalkan pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dunia kerja untuk membantu pelatihan Guru Vokasi.

Strategi

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai, antara lain:

1. melakukan penguatan kerja sama dengan mitra dunia kerja sehingga program dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan;
2. mengembangkan fleksibilitas sistem jadwal pelatihan yang dilaksanakan oleh dunia kerja, sehingga guru produktif memiliki kesempatan yang besar untuk dapat mengikuti pelatihan pada dunia kerja;
3. mendorong SMK, pendidikan tinggi Vokasi dan dunia kerja untuk berbagi sumber daya seperti guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, lab) khususnya bagi yang memiliki bidang keahlian yang sama; dan
4. melakukan aktivitas pembelajaran bersama dunia kerja seperti riset gabungan (*joint research*) dan/atau proyek (*project work*) berdasarkan permasalahan riil di masyarakat.



Aktivitas pembelajaran bersama dunia kerja

IKSS 2.11

Persentase Dosen yang Memiliki Pengalaman Bekerja atau Tersertifikasi di Industri

Dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya yang dimaksud adalah dosen yang memiliki jabatan minimal asisten ahli atau memiliki sertifikasi di industri atau sertifikasi profesi.



Dalam UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2013 No. 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dinyatakan bahwa Jabatan fungsional Dosen yang selanjutnya disebut jabatan Akademik Dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri.

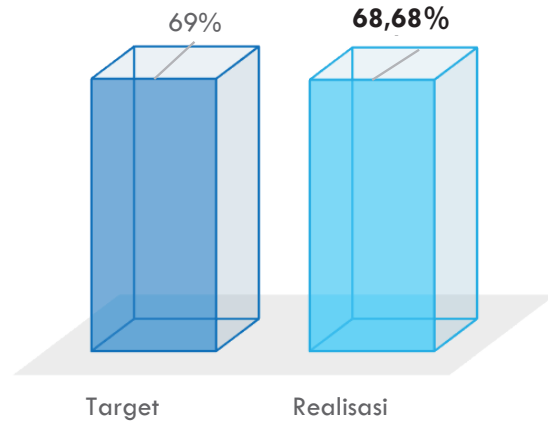


Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri atau profesinya dihitung dari perbandingan antara jumlah dosen yang mempunyai jabatan fungsional dan/atau tersertifikasi dengan jumlah seluruh dosen tetap.

$$\frac{\text{Jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi/berpengalaman bekerja sebagai praktisi}}{\text{Jumlah dosen dengan NIDN + Jumlah dosen dengan NIDK}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui industri, pada tahun 2020 mencapai sebesar 68,68%, lebih rendah dari yang ditargetkan sebesar 69% sehingga realisasi pencapaian target pada tahun 2020 adalah 99,54%.

Persentase Dosen yang Memiliki Pengalaman Bekerja atau Tersertifikasi di Industri Tahun 2020



Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. pemberian beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan;
2. memberikan bantuan kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan;
3. menyelenggarakan Program Magang Dosen;
4. pemberian bantuan/hibah untuk melakukan penelitian/riset;
5. memberikan peluang kepada dosen dan tenaga kependidikan untuk melakukan kolaborasi bersama dunia kerja.



Peluncuran Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi terkait persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui industri, sebagai berikut:

1. pandemi Covid-19 menyebabkan program magang dosen pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena berlaku *lockdown* pada perguruan tinggi pembina program Magang Dosen.
2. masih terbatasnya kerja sama dan kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia kerja sehingga mempengaruhi proyek kerja sama dosen dengan dunia kerja;
3. masih terbatasnya kemampuan sebagian dosen dalam menghasilkan hasil penelitian berkualitas yang dapat digunakan oleh dunia kerja, atau yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi;
4. pandemi Covid-19 mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan Penilaian Angka Kredit dosen, sebagai salah satu indikator untuk menilai kompetensi dosen serta untuk proses sertifikasi;

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala adalah sebagai berikut:

1. penyelenggaraan program Magang Dosen yang dilaksanakan dengan kombinasi metode daring dan luring sebagai berikut:
 - a. materi-materi yang dapat diberikan secara daring seperti pengenalan tugas dan fungsi pokok unit kerja, metoda penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan lain lain;
 - b. materi-materi lainnya seperti kunjungan ke unit, pengenalan kampus akan dilakukan secara luring dengan mempertimbangkan penerapan protokol Covid-19.
2. membuka peluang untuk melakukan kolaborasi dengan dunia kerja dan dengan kampus lain baik dalam maupun luar negeri baik dalam melakukan penelitian maupun melakukan proyek kerja sama;
3. memberikan bantuan riset/penelitian kepada dosen untuk meningkatkan kemampuan riset serta menghasilkan publikasi yang dapat digunakan oleh dunia kerja dan atau dapat terbit pada jurnal internasional bereputasi;
4. membuat wadah diskusi untuk membahas permasalahan Penilaian Angka Kredit dosen pada aplikasi media sosial sebagai tempat untuk berbagi pegetahuan dan berdiskusi.

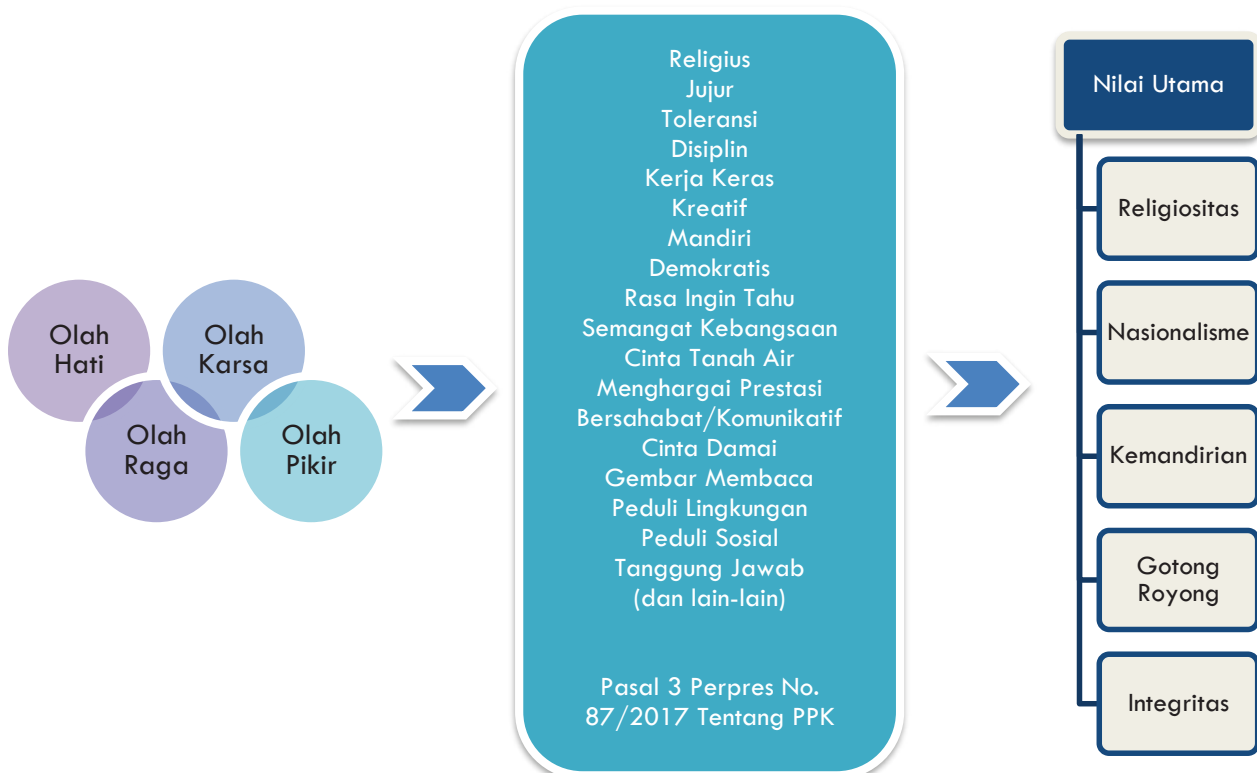
Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai yaitu:

1. meningkatkan target dosen yang akan disertifikasi melalui sosialisasi di awal tahun kepada dosen, perguruan tinggi maupun industri, sehingga dosen dapat melakukan persiapan lebih dini untuk melakukan pendalaman materi keahliannya di industri;
2. mendorong kerja sama dan kolaborasi perguruan tinggi dengan dunia kerja sebagai bagian dari implementasi kebijakan Kampus Merdeka, agar peluang melakukan proyek bersama dengan dunia kerja semakin luas;
3. menghitung beban kerja dosen selama bekerja di industri sebagai nilai tambah yang mendukung peningkatan karir dosen tersebut;
4. optimalisasi penilaian Angka Kredit Dosen lebih banyak dilakukan secara daring melalui sistem penilaian angka kredit untuk mengefektifkan pelayanan di masa pandemi;
5. meningkatkan kompetensi dosen dalam penulisan karya ilmiah melalui bimbingan teknis penulisan karya ilmiah pada jurnal Internasional bereputasi.

SS 3

Menguatnya Karakter PESERTA DIDIK



Salah satu program Nawacita adalah penguatan pendidikan karakter bangsa. Peraturan Presiden No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi panduan Kemendikbud dalam menjalankan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di lingkungan sekolah dan keluarga/masyarakat. Dalam pendidikan karakter, ada empat aspek filosofi pendidikan yang ditanamkan. Filosofi tersebut di atas menjadi acuan dalam menciptakan peserta didik yang berkarakter Pancasila atau Pelajar Pancasila.

Sebagai salah satu program prioritas pada RPJMN Tahun 2020-2024, penguatan karakter menjadi sentral dalam kebijakan Kemendikbud, yang juga dijadikan sebagai visi Kemendikbud, yakni menciptakan Pelajar Pancasila. Hal ini juga mendorong didirikannya unit kerja setingkat Eselon II di Kemendikbud agar isu penguatan karakter dapat tertangani dengan lebih baik. Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui pendekatan guru dan siswa secara langsung melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra-kurikuler pada setiap jenjang pendidikan, serta melalui pendekatan keluarga dan masyarakat melalui kampanye publik.

PROFIL PELAJAR PANCASILA

Beriman, Bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa
dan Berakhlak Mulia



Berkebhinekaan Global

Mandiri

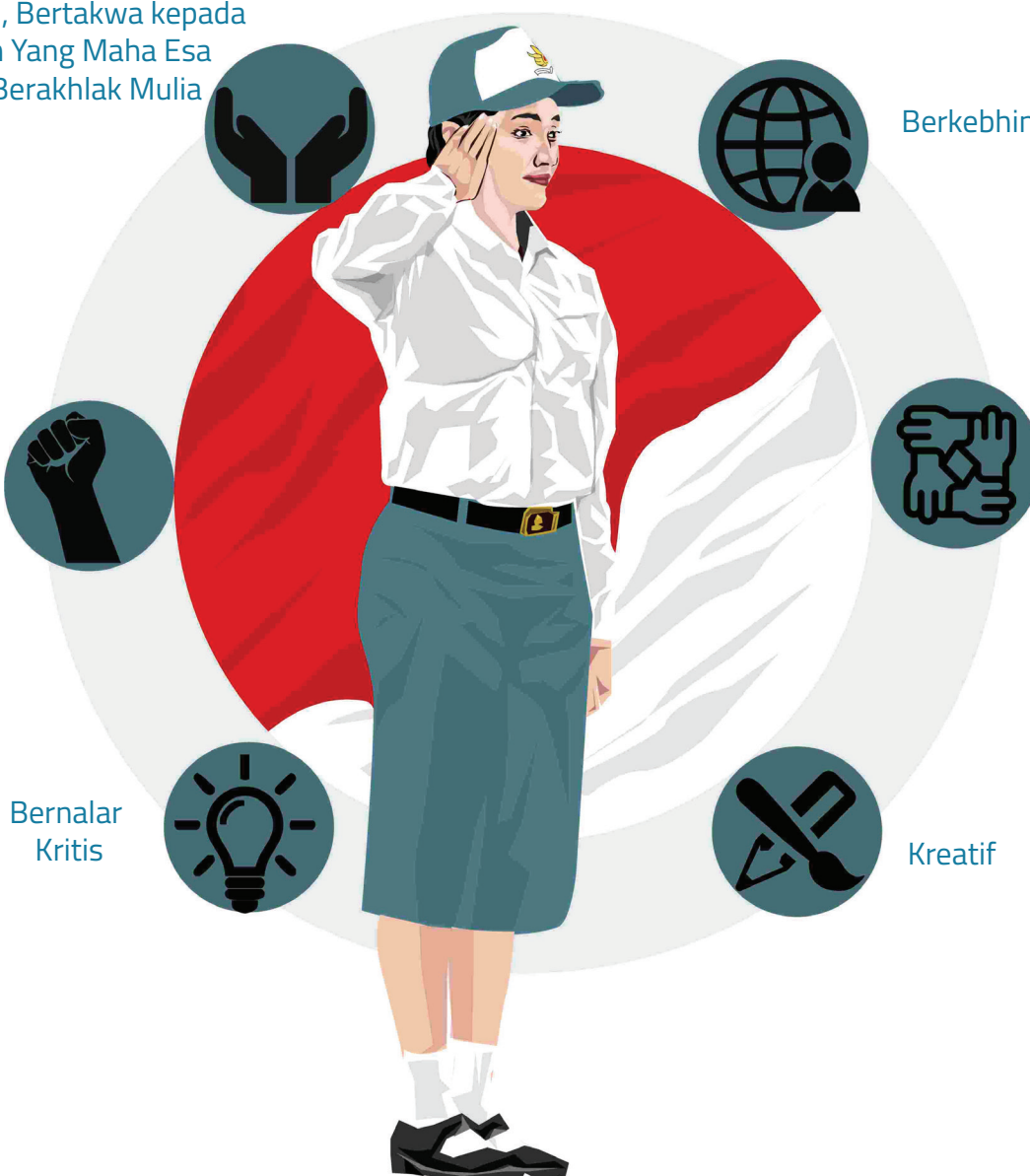


Bergoyong
Royong

Bernalar
Kritis



Kreatif



Secara umum, capaian SS 3 didukung oleh 3 (tiga) IKSS, sebagai berikut:

IKSS 3.1

Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter

Lingkungan kondusif yaitu lingkungan yang aman, nyaman, sehat, gembira, menarik dan mampu membangkitkan gairah belajar. Penghitungan capaian indikator kinerja ini menggunakan metode survei. Survei yang dilakukan mencakup survei lingkungan belajar yang berisi informasi tentang kualitas pengajaran dan iklim sekolah. Variabelnya antara lain metode pengajaran, pemenuhan kebutuhan psikologis dasar siswa dan guru, interaksi antar siswa dan siswa dengan guru (tidak adanya perundungan).



Perhitungan persentase satuan Pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter adalah sebagai berikut:

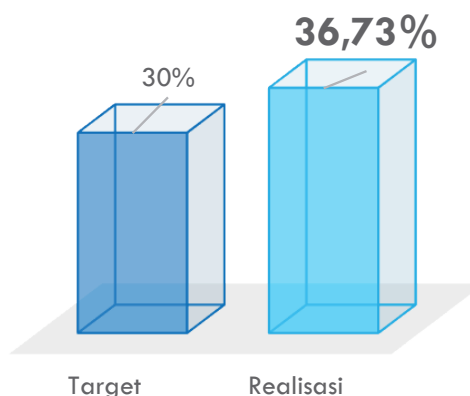
Jumlah satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif

X 100%

Jumlah satuan pendidikan yang disurvei

Berdasarkan hasil persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter, capaian tahun 2020 adalah sebesar 36,73% atau sejumlah 60.791 satuan pendidikan dari total 165.500 satuan pendidikan, lebih tinggi dari yang ditargetkan yakni sebesar 30%, atau realisasi pencapaian target sebesar 122,43%.

Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter Tahun 2020



Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. program pembinaan dan penguatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan khususnya bidang olahraga, kesenian dan pembinaan gugus pramuka. Selain itu, Kemendikbud juga melakukan fasilitasi, advokasi, penyusunan buku, infografis, serta video untuk mendukung pembinaan dan penguatan ekstrakurikuler tersebut;
2. melaksanakan program pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), sebagai salah satu bentuk penguatan pendidikan karakter terkait pola hidup sehat yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi oleh empat kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.
3. pemberian bantuan untuk pembinaan pendidikan karakter bangsa bagi peserta didik, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk festival dan lomba;
4. pembuatan dan penyebarluasan konten penguatan karakter pada satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat melalui berbagai media sebagai bagian dari kampanye publik;
5. Iklan Layanan Masyarakat terkait penguatan karakter melalui berbagai media;

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain

1. belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sehubungan dengan pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui daring, yang seharusnya akan lebih berdampak luas bila dilakukan secara tatap muka langsung;
2. belum optimalnya pelibatan ekosistem pendidikan, baik satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua dan masyarakat dalam membangun lingkungan sekolah kondusif untuk mendukung pembelajaran berkualitas;
3. belum optimalnya koordinasi antar unit internal Kemendikbud terkait sosialisasi konten-konten penguatan karakter serta kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyosialisasikan kebijakan penguatan karakter pada satuan pendidikan.



Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. melakukan inovasi atas pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan media virtual seperti webinar, serta kampanye penguatan karakter menggunakan berbagai media, baik TV, Radio, *video conference*, dan media lainnya;
2. memperkuat kerja sama dan kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam menyosialisasikan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan;
3. pembuatan *e-module* terkait penguatan karakter sehingga dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat;
4. memberikan bantuan kepada satuan pendidikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka penguatan pendidikan karakter;
5. memberikan bantuan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan lingkungan kondusif dalam rangka pembangunan karakter, yang salah satunya melalui program UKS, dan program-program lainnya;
6. pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bertemakan penguatan karakter untuk menginternalisasi nilai-nilai penguatan karakter kepada ekosistem pendidikan, yakni satuan pendidikan, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.



Strategi

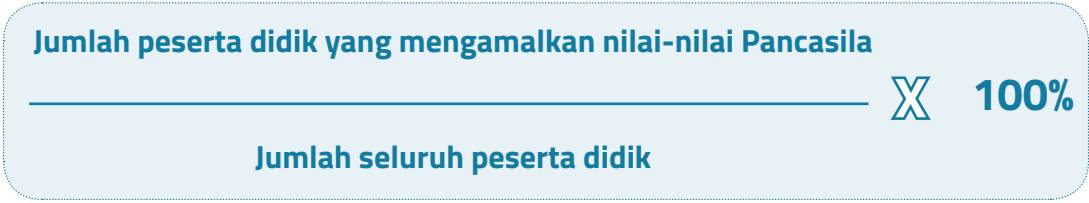
Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. melakukan koordinasi intensif baik di internal Kemendikbud maupun dengan pemerintah daerah terkait kebijakan penguatan karakter;
2. melakukan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan supaya menarik minat masyarakat;
3. memanfaatkan berbagai media baik TV, Radio, dan media virtual lainnya untuk menyosialisasikan program penguatan karakter sekaligus penyebarluasan konten-konten menarik terkait penguatan karakter;
4. membuat konten-konten menarik serta Iklan Layanan Masyarakat untuk menginternalisasi nilai-nilai penguatan karakter di masyarakat.

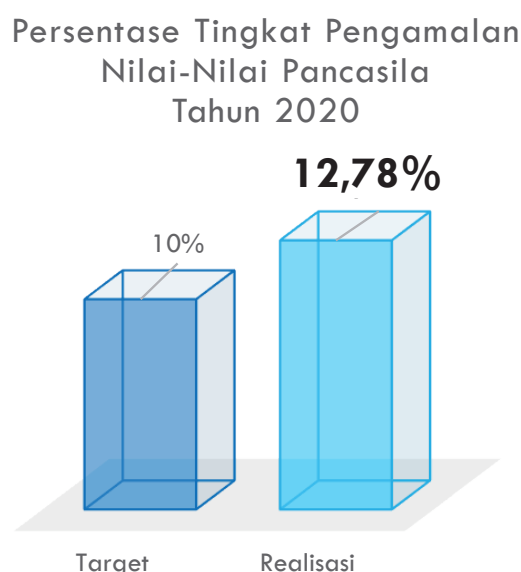
IKSS 3.2

Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila

Persentase tingkat pengamalan Nilai-Nilai Pancasila pada peserta didik diukur berdasarkan hasil kampanye publik konten nilai-nilai Pancasila (Profil Pelajar Pancasila) menggunakan survei persepsi. Metode penghitungan Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:



Tahun 2020, capaian Indikator Kinerja ini mencapai 12,78% atau sekitar 7.562.435 dari total 59.170.384 peserta didik telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, lebih tinggi dari yang ditargetkan yakni 10% atau terealisasi sebesar 127,8%. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah melalui penyebaran konten penguatan karakter melalui kampanye publik yang telah menyasar berbagai pihak, baik peserta didik maupun non peserta didik, menggunakan berbagai platform media daring seperti kanal youtube, zoom, radio serta metode luring.



Kegiatan

Menggunakan strategi *above the line* dan *below the line*, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja ini, antara lain:

1. kajian dan penyusunan konten penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat termasuk iklan layanan masyarakat;
2. penyebaran konten penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat melalui berbagai media, baik TV, Radio, maupun media digital lainnya;

3. pelaksanaan kegiatan webinar dan diskusi kelompok terpumpun daring tentang penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila;
4. supervisi dan evaluasi pelaksanaan penyebaran konten penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan webinar, diskusi kelompok terpumpun daring, dan evaluasi iklan layanan masyarakat.



Salah satu konten penguatan pengamalan nilai-nilai Pancasila

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sehubungan dengan pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda dan pelaksanaannya dilakukan melalui daring, yang seharusnya akan lebih berdampak luas bila dilakukan secara tatap muka langsung;
2. Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada lingkungan Kemendikbud membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan uraian beban kerja dan Tupoksi dari organisasi.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut, sebagai berikut:

1. melakukan inovasi atas pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan media digital seperti webinar, serta kampanye penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila menggunakan berbagai media, baik TV, Radio, *video conference*, dan media lainnya;
2. melakukan berbagai acara-acara yang bertemakan penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila seperti seminar, pameran, parade aksi, malam apresiasi untuk menarik minat masyarakat luas;
3. pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bertemakan penguatan karakter Profil Pelajar Pancasila untuk menginternalisasi nilai-nilai penguatan karakter;
4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk dapat menghasilkan konten-konten penguatan karakter yang lebih baik;

Strategi

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan koordinasi intensif baik di internal Kemendikbud maupun dengan pemerintah daerah terkait kebijakan penguatan karakter;
2. melaksanakan program dan kegiatan dengan mengkombinasikan metode daring dan luring;
3. Membuat konten-konten menarik serta iklan layanan masyarakat untuk menginternalisasi nilai-nilai penguatan karakter di masyarakat;
4. melakukan kampanye publik tentang Profil Pelajar Pancasila yang dilaksanakan secara lebih kreatif dan inovatif, seperti dengan webinar, iklan layanan masyarakat (melalui TVRI dan TV Swasta lain), podcast, radio, lomba-lomba, Pekan untuk Sahabat Karakter (PUSAKA) melalui daring;
5. menyebarluaskan iklan layanan masyarakat melalui media sosial seperti *facebook, instagram, twitter, tik-tok, dan website*.
6. meningkatkan sosialisasi dan sinergi tripusat pendidikan tentang Profil Pelajar Pancasila melalui kegiatan diskusi kelompok terpumpun secara daring;
7. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendampingan tema Profil Pelajar Pancasila secara daring dan luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

IKSS 3.3

Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar

Tingkat pemahaman kebijakan Merdeka Belajar pada ekosistem pendidikan adalah tingkat pemahaman satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap kebijakan Merdeka Belajar yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal. Keluarga yang dimaksud adalah orang tua/wali peserta didik. Sedangkan masyarakat yang dimaksud terdiri dari unsur dinas pendidikan, dewan pendidikan, DPRD, pegiat pendidikan dan kebudayaan, dan organisasi penggerak.



Persentase tingkat pemahaman konsep merdeka belajar pada ekosistem pendidikan diukur berdasarkan hasil kampanye publik menggunakan survei persepsi. Metode penghitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

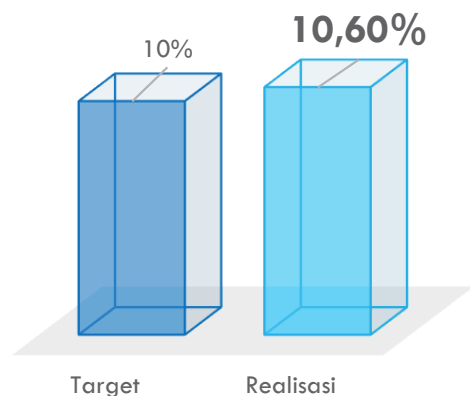
Jumlah ekosistem pendidikan yang paham konsep merdeka belajar

X 100%

Jumlah seluruh ekosistem pendidikan

Tahun 2020, capaian Indikator Kinerja ini mencapai 10,60% atau 19.237.379 dari 181.665.957 orang di ekosistem pendidikan yang memahami konsep Merdeka Belajar, lebih tinggi dari yang ditargetkan yakni 10% atau terealisasi sebesar 106%. Salah satu mekanisme yang digunakan adalah melalui penyebaran konten penguatan karakter melalui kampanye publik yang dilakukan telah menjangkau berbagai pihak, baik peserta didik maupun non peserta didik, menggunakan berbagai platform media daring seperti kanal youtube, zoom, radio serta metode luring.

Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar Tahun 2020



Kegiatan

Menggunakan strategi *above the line* dan *below the line*, upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai Indikator Kinerja ini, antara lain:

1. kajian dan penyusunan konten penguatan karakter Kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat termasuk iklan layanan masyarakat;
2. penyebaran konten penguatan karakter Kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat melalui berbagai media, baik TV, Radio, maupun media digital lainnya, serta kegiatan webinar dan diskusi kelompok terpusat daring;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebaran konten penguatan karakter Kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan webinar, diskusi kelompok terpusat, dan evaluasi iklan layanan masyarakat.

Kegiatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sehubungan dengan pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda dan pelaksanaannya dilakukan melalui daring, yang seharusnya akan lebih berdampak luas bila dilakukan secara tatap muka langsung;

2. Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada lingkungan Kemendikbud membutuhkan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan uraian beban kerja dan Tupoksi dari organisasi.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. melakukan inovasi atas pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan media digital seperti webinar, serta kampanye Kebijakan Merdeka Belajar menggunakan berbagai media, baik TV, Radio, *video conference*, dan media lainnya;
2. melakukan berbagai acara-acara yang bertemakan Kebijakan Merdeka Belajar seperti seminar, pameran, parade aksi, malam apresiasi untuk menarik minat masyarakat luas;
3. pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) bertemakan Kebijakan Merdeka Belajar;
4. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk dapat menghasilkan konten-konten penguatan karakter terkait Kebijakan Merdeka Belajar yang lebih baik.

Strategi

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. melaksanakan program dan kegiatan dengan mengkombinasikan metode daring dan luring;
2. melakukan kampanye publik tentang Kebijakan Merdeka Belajar, yang dilaksanakan secara lebih kreatif dan inovatif, seperti dengan webinar, iklan layanan masyarakat (melalui TVRI dan TV Swasta lain), *podcast*, radio, lomba-lomba, Pekan untuk Sahabat Karakter (PUSAKA) secara daring;
3. penyebarluasan iklan layanan masyarakat melalui media sosial, seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, *tik-tok*, dan *website*;
4. meningkatkan sosialisasi Kebijakan Merdeka Belajar pada ekosistem pendidikan;
5. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pendampingan tema Kebijakan Merdeka Belajar secara daring dan luring dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

SS 4

Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian
BAHASA DAN KEBUDAYAAN

Sebagai penyelenggara pengelolaan kebudayaan dan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia, Kemendikbud menyadari derasnya arus globalisasi yang dapat melunturkan identitas dan ketahanan budaya dan bahasa bangsa. Sepanjang periode 2015-2019, Kemendikbud menjalankan program-program yang berhasil memajukan tata kelola bahasa dan budaya Indonesia sebagaimana terukur melalui Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional. Sebagai salah satu program prioritas nasional pada RPJMN Tahun 2020-2024, program-program Kemendikbud dalam memajukan bahasa dan budaya Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga tema besar:



Upaya untuk mengoptimalkan fungsi dan peran bahasa Indonesia, baik dalam pengembangan mutu bahasa dan sastra Indonesia maupun mutu pengguna bahasa Indonesia terus dilakukan. Optimalisasi tersebut diharapkan dapat mendorong pembentukan karakter bangsa, manusia cerdas, profesional, unggul, dan berkepribadian dalam menyiapkan generasi milenial yang berdaya saing tinggi dalam menyongsong era globalisasi.

Upaya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan yang telah dan akan terus dilakukan melalui:



Selain itu, berbagai even budaya sebagai wujud apresiasi serta meningkatkan identitas bangsa juga dilakukan serta pelestarian cagar budaya dan desa budaya, dukungan terhadap karya film dan musik Indonesia, perlindungan warisan budaya, dan penguatan SDM Kebudayaan.

Ketercapaian sasaran strategis terkait peningkatan pemajuan dan pelestarian kebudayaan bahasa dan kebudayaan tersebut didukung oleh 3 (tiga) IKSS. Tingkat ketercapaian dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

IKSS 4.1 Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia

Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemahiran masyarakat dalam berbahasa Indonesia. Indikator ini menunjukkan kemampuan penutur dalam memahami dan menggunakan bahasa Indonesia yang meliputi kemahiran mendengarkan, kemahiran membaca, kemahiran berbicara, dan kemahiran menulis, serta kemahiran merespon



Apa yang Diukur dalam UKBI?

UKBI mengukur keterampilan reseptif peserta kegiatan **mendengarkan** dan mengukur **keterampilan produktif** peserta uji dalam kegiatan **berbicara** (dalam penggunaan bahasa Indonesia lisan).

UKBI mengukur keterampilan reseptif peserta uji dalam kegiatan **membaca** dan mengukur **keterampilan produktif** peserta uji dalam kegiatan **menulis** (dalam penggunaan bahasa Indonesia tulis).

UKBI juga mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta uji dalam **penerapan kaidah bahasa Indonesia**.

Webinar UKBI

kaidah bahasa Indonesia. Kelima hal tersebut terangkum dalam tes kemahiran berbahasa Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia (UKBI).

Metode penghitungan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah skor seluruh peserta}}{\text{Jumlah peserta}} = \text{Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia}$$

UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. Namun, dalam indikator ini sasaran UKBI ialah penutur bahasa Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri dengan beragam profesi dan tingkat pendidikan (guru, dosen, pelajar, mahasiswa, peneliti, penulis, penerjemah, wartawan, juru bahasa, dan profesional lain). Tingkat kemahiran berbahasa Indonesia tergambar dalam 7 (tujuh) tingkatan sebagai berikut:

Predikat	Skor	Keterangan
Istimewa	725-800	Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sempurna dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan personal, sosial, keprofesian, dan keilmiah.
Sangat Unggul	641-724	Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tinggi dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas, sosial, dan keprofesian. Untuk kepentingan akademik yang kompleks, yang bersangkutan masih memiliki kendala.
Unggul	578-640	Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini, yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas dan sosial. Peserta juga tidak terkendala dalam berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, baik keprofesian yang sederhana maupun kompleks.
Madya	482-577	Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini, yang bersangkutan mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas dan masyarakat dengan baik, tetapi masih mengalami kendala dalam hal keprofesian yang kompleks.
Semenjana	405-481	Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang cukup memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan keilmiah, yang bersangkutan sangat terkendala. Untuk keperluan keprofesian dan masyarakat yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala, tetapi tidak terkendala untuk keperluan keprofesian dan masyarakat yang tidak kompleks.
Marginal	326-404	Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dalam berkomunikasi untuk keperluan masyarakat yang sederhana, yang bersangkutan tidak mengalami kendala. Akan tetapi, untuk keperluan masyarakat yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala. Hal ini berarti yang bersangkutan belum siap berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, apalagi untuk keperluan keilmiah.
Terbatas	251-325	Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulis. Dengan kemahiran ini peserta uji hanya mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas. Pada saat yang sama, predikat ini juga menggambarkan potensi yang bersangkutan dalam berkomunikasi masih sangat besar kemungkinannya untuk ditingkatkan.

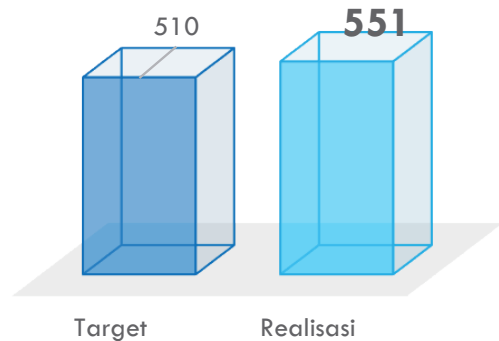
Pada tahun 2020, capaian rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia sebesar 551, lebih tinggi dari yang ditargetkan yakni 510, atau realisasi capaian sebesar 108,04% dari target tahun 2020.

Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. penyusunan dan penyosialisasian instrumen UKBI, yang antara lain untuk melayani kebutuhan uji kemahiran berbasis internet. Selain itu, inovasi yang dilakukan adalah mengembangkan sistem pengujian UKBI bersifat adaptif atau UKBI Adaptif, yang memungkinkan kemahiran peserta UKBI dapat terukur dengan lebih akurat dan efisien karena setiap peserta mengerjakan soal dengan jumlah soal yang berbeda dengan lama waktu pengerjaan yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kemahiran berbahasanya;
2. penyusunan dan penyosialisasian acuan kebahasaan dan kesastraan sebagai bahan pembinaan bahasa dalam masyarakat. Inovasi yang dilakukan adalah menghasilkan acuan kebahasaan dan kesastraan yang lebih praktis sehingga lebih mudah dimengerti oleh masyarakat yang tingkat kemampuannya berbeda-beda. Acuan kebahasaan dan kesastraan yang disusun antara lain Tata Bahasa Praktis Kalimat dan Tata Bahasa Praktis Kata;
3. penyusunan dan penyosialisasian bahan ajar kebahasaan bagi penutur asing (BIPA) sebanyak 7 (tujuh) teman menyesuaikan kebutuhan, yakni kediplomatan, riset/penelitian, kemahasiswaan, pariwisata, perbankan, tata bahasa praktis Bahasa Indonesia, dan bisnis. Selain itu, bahan ajar

Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia Tahun 2020



Uji kemahiran berbahasa Indonesia pelajar di Sekolah Pahoo, Tangerang pada Februari 2020



Uji kemahiran berbahasa Indonesia pelajar Al Kausar Islamic Boarding School Indonesia, Sukabumi pada Februari 2020

berbahasa asing juga disusun yakni Bahan Ajar Bahasa Tunisia, Bahan Ajar Bahasa Jerman, Bahan Ajar Bahasa Bulgaria, Bahan Ajar Bahasa Rusia, Bahan Ajar Bahasa Mandarin.

Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. masa pandemi Covid-19 menyulitkan pelaksanaan uji coba soal UKBI. Walaupun uji coba soal UKBI (Uji Coba Dinamis UKBI) dilaksanakan dengan sistem daring, uji coba empiris yang ideal sebenarnya lebih efektif dilakukan dengan kehadiran tim UKBI di tiap titik uji coba. Selain itu, pelaksanaan UKBI berbasis kertas juga menjadi sulit untuk dilakukan;
2. pandemi Covid-19 juga mempengaruhi penyusunan acuan kebahasaan dan kesastraan serta penyusunan bahan ajar BIPA, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama;
3. sosialisasi UKBI dan sosialisasi bahan ajar serta bahan acuan kebahasaan dan kesastraan juga menjadi tidak optimal akibat pandemi Covid-19.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala, antara lain:

1. proses uji coba soal UKBI dilaksanakan secara daring di 29 provinsi, 8 (delapan) KBRI, dan di Kantor *Learn Indonesian Asia*, Singapura; sementara itu, uji coba sistem layanan UKBI Adaptif, pemanduan peserta UKBI Adaptif dilakukan secara tatap muka di 11 wilayah, yaitu di Bandung, Semarang, Denpasar, Manado, Serang, Padang, Mataram, Pekanbaru, Jakarta, Depok, dan Bogor. Pemanduan secara tatap muka berdasarkan fakta di lapangan memang diperlukan karena UKBI Adaptif merupakan sistem pengujian yang relatif masih langka di Indonesia;
2. proses penyusunan dan diskusi bahan acuan kebahasaan dan kesastraan mengoptimalkan media daring;
3. penyusunan dan pembahasan bahan ajar mengoptimalkan pertemuan secara virtual, walaupun kadang-kadang terkendala dengan jaringan internet.

Strategi

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai, antara lain:

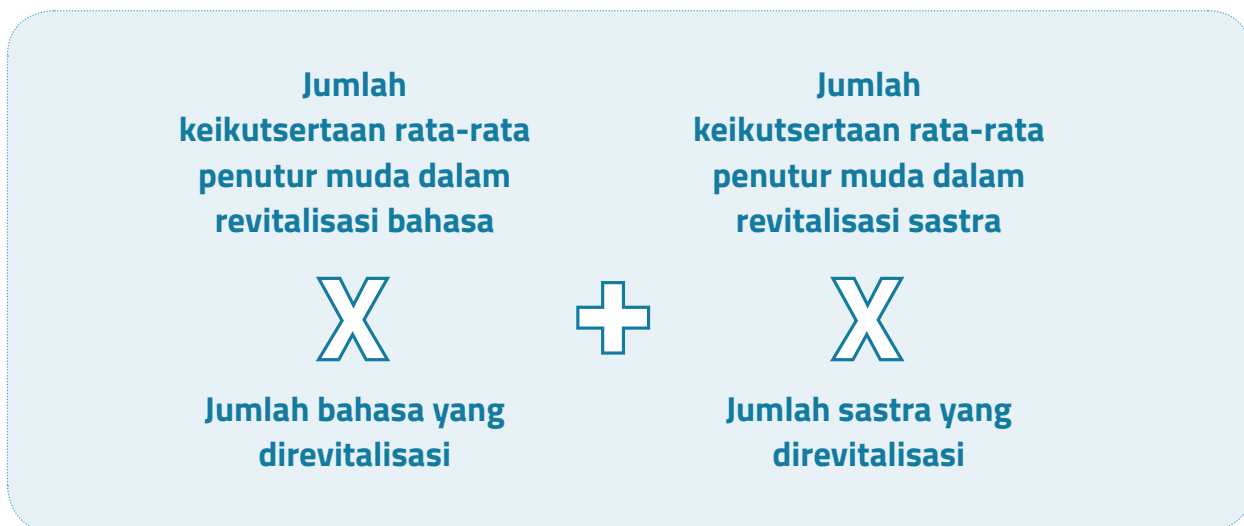
1. melakukan inovasi dalam penyusunan instrumen UKBI dan uji coba melalui pemanfaatan teknologi digital sehingga baik luring maupun daring, menghasilkan kualitas dan kecepatan yang sama;

2. melakukan inovasi dalam penyusunan bahan acuan kebahasaan dan kesastraan serta bahan ajar BIPA melalui optimalisasi penggunaan media daring dan luring sehingga dapat menghasilkan kualitas kerja yang sama;
3. memanfaatkan berbagai media khususnya media digital untuk menyosialisasikan kebijakan dan produk-produk kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat.

IKSS 4.2

Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah

Jumlah penutur muda bahasa Daerah adalah jumlah penutur/pendukung/pelaku muda sastra berbahasa daerah dari kalangan generasi muda antara usia 10-19 tahun yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi sastra (khusus sastra lisan) di suatu daerah persebaran bahasa daerah yang status sastranya kritis dan terancam punah, baik berbasis komunitas/masyarakat maupun berbasis sekolah/klasikal. Metode penghitungan indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

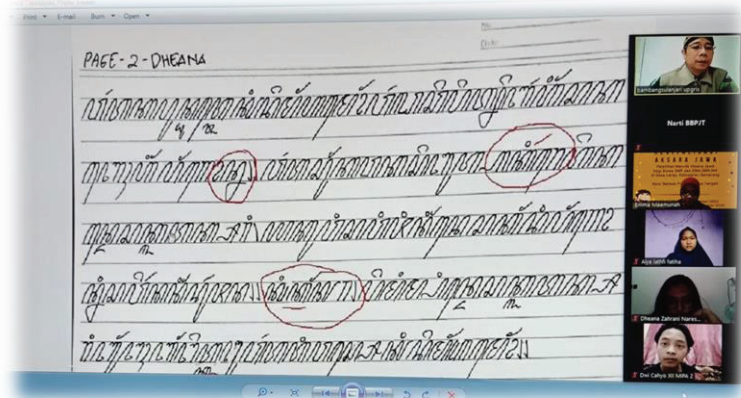


Karena sasaran kegiatan revitalisasi ditujukan untuk meningkatkan daya hidup sastra daerah, perlindungan terhadap sastra berbahasa daerah diprioritaskan pada sastra lisan yang berstatus kritis dan terancam punah. Kategori tersebut berdasarkan pada hasil kajian vitalitas bahasa dan sastra, baik yang dilakukan oleh Kemendikbud maupun pihak eksternal. Peserta yang dipilih (dilibatkan) dalam kegiatan revitalisasi

merupakan kelompok penutur jati muda yang diharapkan menjadi proyek percontohan (*pilot project*) untuk menyebarkan hasil revitalisasi tersebut di wilayahnya.

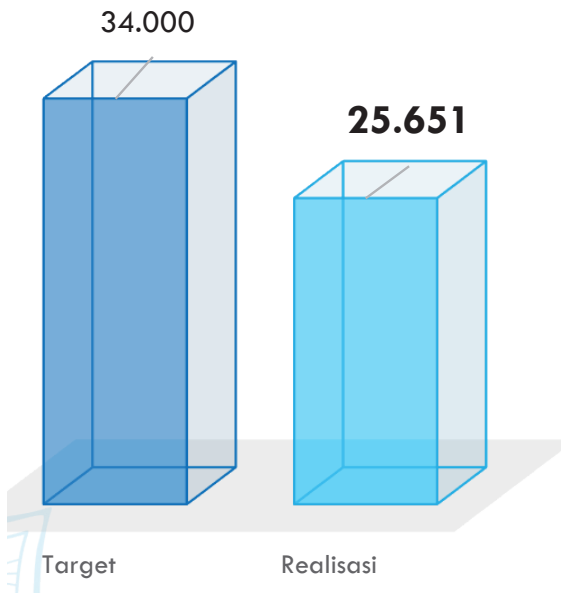
Penentuan indeks yang menjadi target sasaran program didasarkan pada bahasa yang kritis rata-rata indeks sastra yang kritis (< 20) dan yang terancam (< 40) meningkat menjadi sastra berstatus “mengalami kemunduran” (0,41—0,60), yakni target maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 0,59. Penutur muda yang terlibat dalam gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa dan sastra disebut “Tunas Bahasa Ibu”.

Artinya, penutur muda itu tidak sekadar peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut dalam bermasyarakat mereka diharapkan dapat menjadi pelopor dan teladan untuk generasi muda lainnya dalam menggunakan dan melestarikan bahasa dan sastra Daerah.



Pelatihan Menulis Aksara Jawa bagi Siswa SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kab. Semarang 2020

Jumlah Penutur Muda Bahasa Tahun 2020



Hingga tahun 2019 telah teridentifikasi 718 bahasa daerah dengan total 2.560 daerah pengamatan di seluruh Indonesia. Semakin banyak temuan bahasa teridentifikasi maka semakin banyak pula kekayaan bangsa Indonesia. Jumlah tersebut pun masih dapat bertambah karena belum semua daerah di Indonesia ditelusuri mengingat adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Banyaknya bahasa daerah di Indonesia membuat pemerintah selalu berupaya menjaga kekayaan negara dengan melakukan perlindungan bahasa dan sastra daerah.

Tahun 2020, capaian indikator kinerja ini adalah 25.651 orang dari target 34.000 orang, atau dengan realisasi sebesar adalah 75,44%.

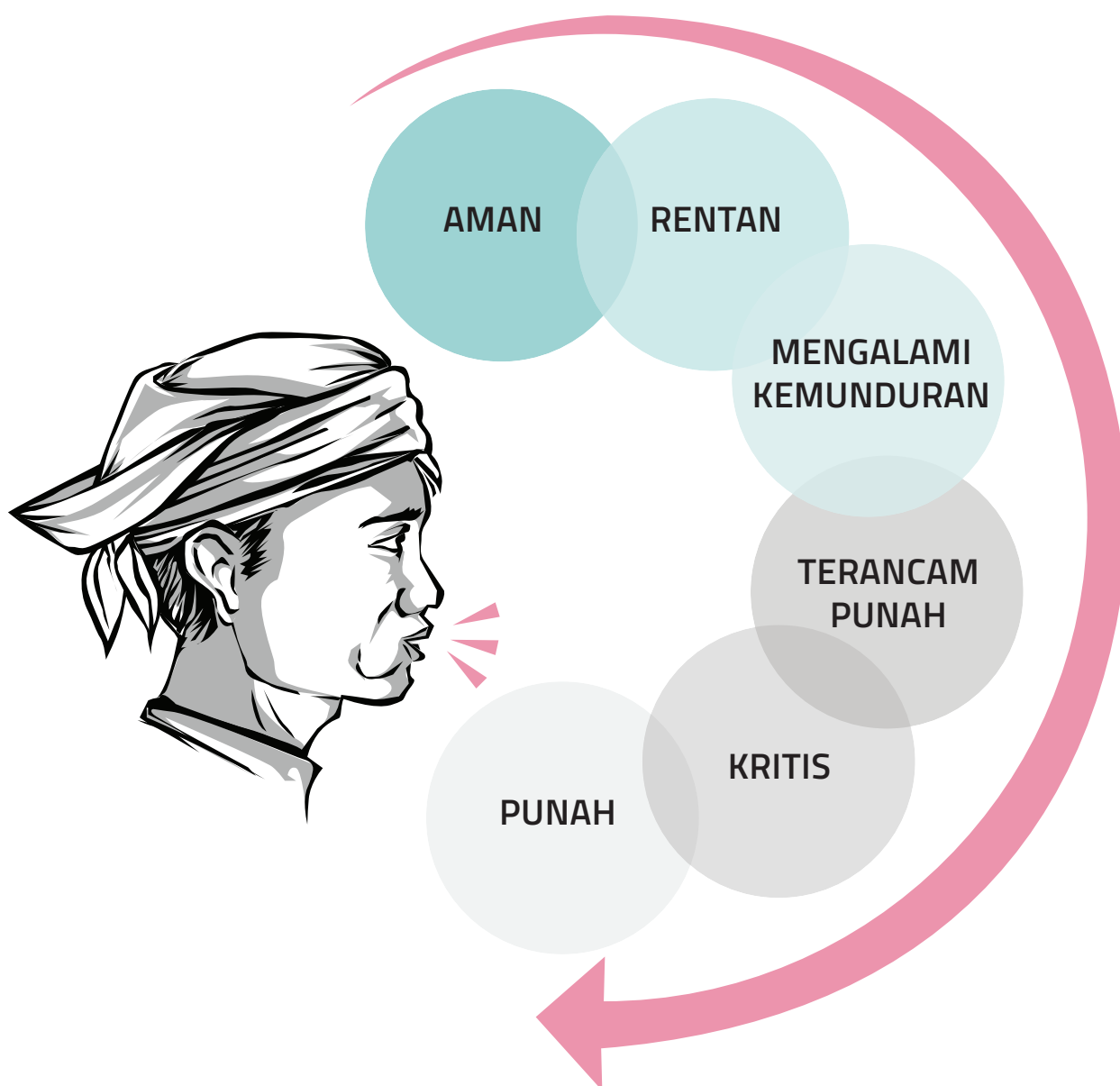
5 PROGRAM UTAMA PERLINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA



Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. melakukan pemutakhiran dan pengujian validitas instrumen kajian vitalitas bahasa agar sesuai dengan kebutuhan;
2. melaksanakan orientasi dan standardisasi pelaksanaan perlindungan bahasa dan sastra, mulai dari pemetaan, kajian vitalitas, konservasi, revitalisasi, hingga registrasi di seluruh daerah target;
3. melakukan verifikasi pemetaan bahasa di kabupaten/kota target agar bahasa-bahasa yang ada dapat diidentifikasi dan didokumentasikan;
4. melakukan kajian vitalitas bahasa untuk menetapkan status bahasa daerah, khususnya yang tergolong terancam punah, agar menjadi prioritas untuk mendapatkan upaya perlindungan selanjutnya, baik dengan konservasi maupun revitalisasi bahasa. Unsur yang dikaji vitalitasnya dari suatu bahasa daerah, antara lain unsur:



5. melakukan revitalisasi bahasa, dengan menggiatkan kembali penggunaan bahasa daerah di masyarakat dengan ditandai adanya transmisi atau pembelajaran bahasa daerah penutur muda sebagai generasi penerus. Selain itu, advokasi perlindungan bahasa pada pemerintah daerah setempat juga menjadi salah satu agenda dalam revitalisasi bahasa mengingat kewajiban perlindungan bahasa daerah dibebankan kepada pemerintah daerah selaku pemilik wilayah dalam Permendagri No. 40 tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.



Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. adanya *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan program prioritas lainnya sehingga mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan;
2. kegiatan revitalisasi terhambat karena pembatasan kegiatan tatap muka selama pandemi;
3. kurangnya sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra.



Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala, antara lain:

1. melaksanakan kegiatan revitalisasi dengan pembatasan jumlah peserta dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
2. melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan, yang salah satunya menggunakan media daring;
3. melakukan modifikasi dalam melakukan kegiatan serta memindahkan lokasi pelaksanaan kegiatan yang lebih mudah dijangkau.



Strategi

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

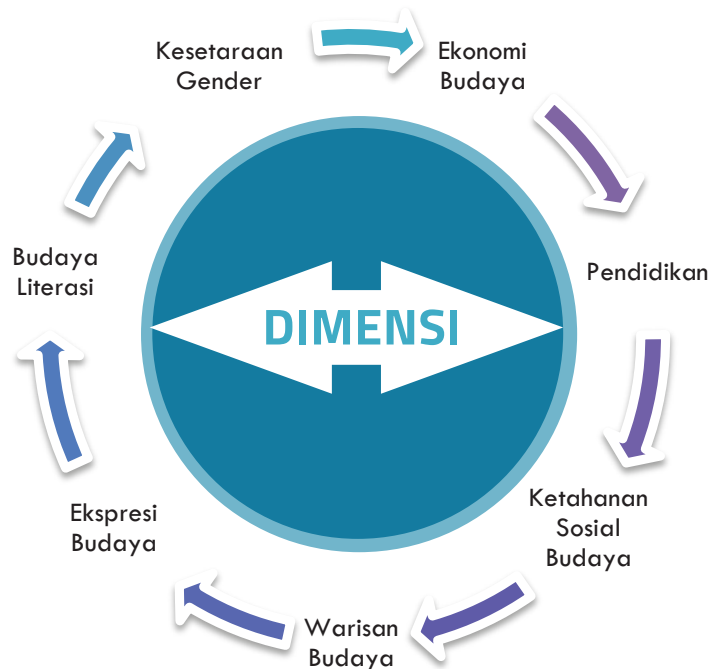
1. menyediakan kelas daring untuk melaksanakan kegiatan revitalisasi;
2. memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung capaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis;
3. penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan yang melibatkan penutur muda dalam perlindungan bahasa.

IKSS 4.3

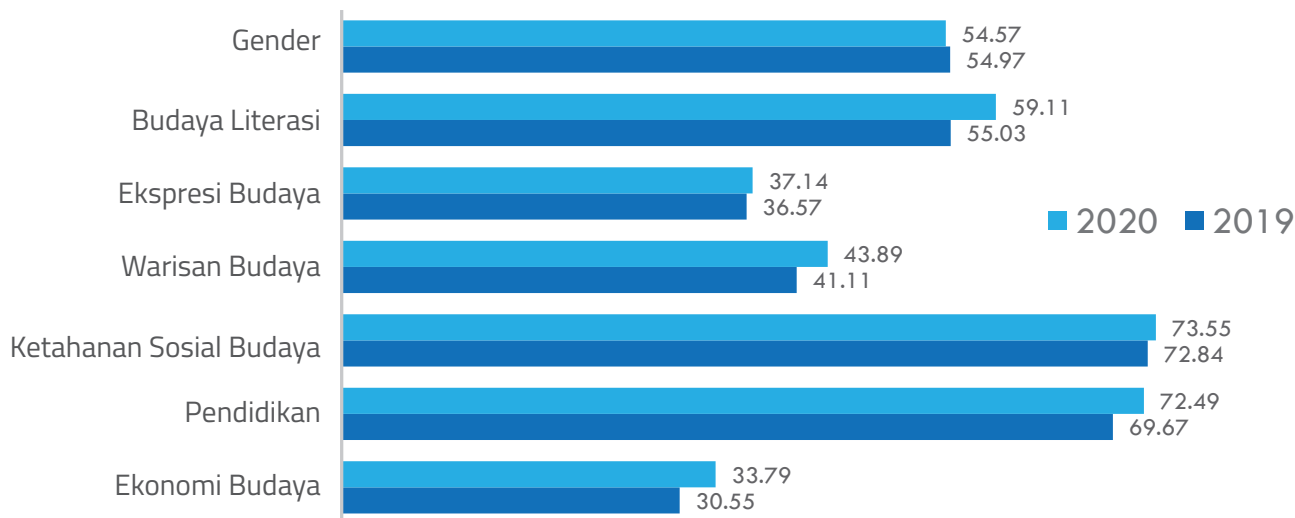
Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kemendikbud menginisiasi penyusunan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang berpedoman pada konsep *Culture Development Indicators* (CDIs) UNESCO, dengan mekanisme penghitungan melalui survei yang dilakukan oleh BPS. Sebagai salah satu program prioritas nasional dan juga menjadi indikator kinerja pembangunan kebudayaan pada RPJMN tahun 2020-2024, IPK merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan yang dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik, yang melingkupi 7 (tujuh) dimensi, yakni dimensi pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, kesetaraan gender, dan ekonomi budaya.

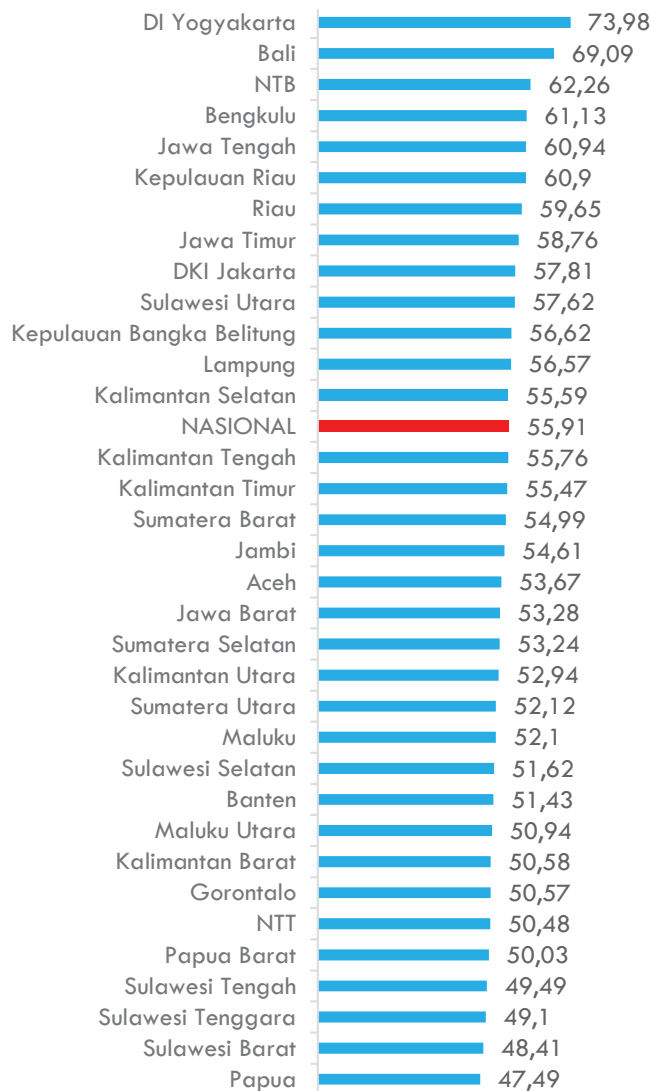
Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor. Dengan diterbitkannya Indeks Pembangunan Kebudayaan ini, diharapkan pembangunan kebudayaan dapat semakin terarah dan berkualitas. Sampai tahun 2020, terlihat peningkatan di hampir seluruh dimensi, kecuali pada dimensi gender. Hal ini tentunya akan mendorong Kemendikbud untuk melakukan koordinasi bersama kementerian/ lembaga terkait serta pemangku kepentingan kebudayaan lainnya.



Tahun 2019-2020



Sampai tahun 2020, IPK di 21 provinsi masih berada di bawah rata-rata nasional; hal ini menjadi salah satu instrumen bagi Kemendikbud untuk memprioritaskan provinsi tersebut dalam melakukan intervensi bersama seluruh pemangku kepentingan kebudayaan. Terlihat pada grafik bahwa sentralisasi pembangunan kebudayaan masih terpusat di wilayah barat dan tengah Indonesia, sementara wilayah timur masih mengalami ketertinggalan dan membutuhkan akselerasi pembangunan kebudayaan yang berkesinambungan.



Kegiatan Finalisasi Hasil Penghitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020

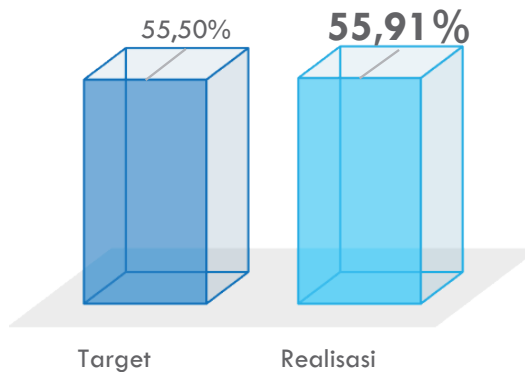
Indeks Pembangunan Kebudayaan Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 (Sumber : BPS, 2020)

Untuk meningkatkan capaian IPK, beberapa program telah dilakukan, diantaranya melalui peningkatan jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda, jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan, jumlah Warisan Budaya yang dilindungi, jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan.



Kegiatan Penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni "Program Fasilitasi Bidang Kebudayaan" Tahun 2020

Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020



Capaian IPK tahun 2020 sebesar 55,91%, lebih tinggi dari yang ditargetkan yakni 55,50% atau realisasi capaian sebesar 100,74%.

Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. meningkatkan jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda, Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan, Jumlah Warisan Budaya yang dilindungi, Jumlah satuan pendidikan yang memasukan pembelajaran Nilai Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan;
2. pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nasional, untuk memberikan ruang ekspresi seni dan budaya kepada masyarakat serta sekaligus menggerakkan ekonomi budaya di tengah pandemi Covid-19. Upaya gigih menyelenggarakan *event* ini adalah juga bukti keberpihakkan kepada seniman dan pekerja seni di dalam keadaan yang penuh kemungkinan baru, penuh kenormalan baru ini. Dan dengan diselenggarakannya secara daring, PKN 2020 hendak memberikan tolok ukur kinerja dan kualitas kegiatan ekspresi seni dan budaya melalui daring;



3. memberdayakan memanfaatkan cagar budaya takbenda kualitas hidup dan yarakat. Pember-

bawah (*bottom up*), dimaknai dalam konteks menempatkan masyarakat sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri, dan bukan sebagai obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar, misalnya pemerintah. Pada tahun Anggaran 2020, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di sekitar kawasan Candi Muara Jambi dan Sangiran;

masyarakat untuk me- budaya dan warisan untuk meningkatkan kesejahteraan mas- dayaan dilakukan dari



4. pelaksanaan karavan budaya untuk meningkatkan diplomasi budaya yang inklusif dan interaktif memanfaatkan WBTB dan cagar budaya;
5. pemberian pembinaan dan bantuan kepada lembaga kebudayaan, antara lain museum dan taman budaya;
6. pelaksanaan *festival mega event* kebudayaan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap karya budaya dan menumbuhkan kecintaan masyarakat akan budaya Indonesia.



Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. perubahan struktur organisasi berdampak pada terkendalanya pelaksanaan program dan kegiatan sehubungan dengan revisi anggaran tahun 2020;
2. pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan budaya terhambat karena kebijakan pembatasan kegiatan di pusat maupun daerah;
3. perubahan mekanisme penyelenggaraan program dan kegiatan, yang sebelumnya melalui luring menjadi daring mempengaruhi optimalisasi capaian target kinerja.



Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala, antara lain:

1. melakukan percepatan revisi anggaran untuk menyesuaikan kondisi pelaksanaan kegiatan di tengah pandemi;
2. melakukan perubahan format beberapa kegiatan dari luring menjadi daring atau kombinasi luring dan daring;
3. melakukan percepatan mekanisme kerja menyesuaikan dengan nomenklatur dan struktur organisasi baru;
4. melaksanakan kegiatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan.



Strategi

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. melaksanakan kegiatan secara daring dan luring;

2. menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan kondisi pandemi di Pusat dan Daerah;
3. melakukan pemantauan secara lebih efektif agar segera mendapatkan solusi atas masalah selama pelaksanaan kegiatan.

SS 5

**Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan
PARTISIPATIF, TRANSPARANT, DAN AKUNTABEL**

Peningkatan tata kelola merupakan salah satu prioritas pemerintah pada RPJMN tahun 2020-2024, antara lain tercermin dari membaiknya tingkat implementasi reformasi birokrasi, perampingan struktur organisasi, serta peningkatan kualitas layanan publik. Kemendikbud telah melakukan banyak perbaikan untuk memastikan kualitas tata kelola Kemendikbud semakin baik, hal ini terlihat dari peralihan pejabat struktural III dan IV menjadi pejabat fungsional, perubahan mekanisme pendanaan pendidikan agar lebih pendek dan lebih tepat sasaran, serta penyederhanaan 9 (sembilan) program Kemendikbud menjadi 6 (program). Selain itu, kebijakan Merdeka Belajar yang diusung oleh Kemendikbud pada tahun 2020-2024 juga ditujukan untuk memperbaiki tata kelola pendidikan yang sebelumnya sangat kompleks menjadi lebih sederhana, misalnya pemanfaatan asesmen nasional pendidikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, penyederhanaan birokrasi dalam sistem akreditasi satuan pendidikan, penyederhanaan kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik, dan perbaikan tata kelola pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Secara umum, pencapaian target rencana strategis pada tahun 2020, untuk sasaran strategis 5, dapat dilihat pada uraian berikut:

IKSS 5.1

Opini Laporan Keuangan Kemendikbud

Opini Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kemendikbud. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI dapat memberikan 4 jenis opini:

2020	<ul style="list-style-type: none"> • Target = WTP • Realisasi = WTP (2019) • Capaian = 100%
Renstra	<ul style="list-style-type: none"> • Target Akhir 2024 = WTP • Capaian Akhir 2024 = 100%

Capaian kinerja ini dihitung berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK, kriteria yang digunakan oleh BPK dalam mengeluarkan opini adalah:

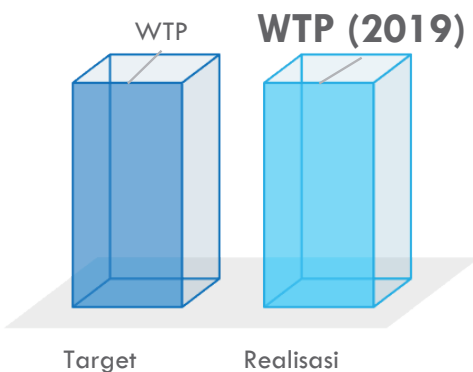


Kemendikbud berhasil mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya dari BPK selama 7 tahun berturut-turut. Opini Laporan Keuangan Kemendikbud untuk tahun 2020 belum diketahui tingkat capaiannya, karena BPK belum mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2020. BPK baru akan mengumumkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan anggaran tahun 2020 sekitar Mei tahun 2021.

7(tujuh) X WTP

(2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Opini Laporan Keuangan
Kemendikbud
Tahun 2020



Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat/opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah. Predikat tersebut diperoleh apabila laporan keuangan secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. asistensi terkait penyusunan laporan keuangan di satuan kerja;
2. penyusunan pedoman laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah di lingkungan Kemendikbud;
3. bimbingan teknis dalam rangka penguatan tim Sistem Akuntansi Instansi Kemendikbud;
4. analisis dan evaluasi laporan keuangan secara berkala.

Hambatan

Hambatan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu:

1. masih terdapat satuan kerja yang belum mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
2. penataan asset yang belum optimal;
3. pengelolaan BMN dan aset tak berwujud belum tertib;
4. pengelolaan hibah belum sesuai ketentuan;
5. pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum sesuai ketentuan;
6. pengelolaan atas realisasi tunjangan Guru bukan PNS belum memadai;
7. pengelolaan BMN dan aset berwujud belum tertib;
8. pengelolaan PNBP belum sesuai dengan ketentuan (belum ada dasar hukum dan digunakan langsung).

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. melakukan pembinaan terhadap Satker dengan melakukan Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi berbasis Akrua, Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Instansi, maupun Bimbingan Teknis terkait dengan PNBP;
2. melakukan asistensi penyusunan Laporan Keuangan pada Satker di lingkungan Kemendikbud untuk memantau perkembangan penyusunan Laporan Keuangan pada tingkat satker dan menginventarisasi permasalahan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan;

3. menyusun pedoman-pedoman yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan yaitu pedoman penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAP, pedoman pengelolaan hibah langsung di lingkungan Kemendikbud, dan pedoman pengelolaan PNBPN di lingkungan Kemendikbud;
4. rekonsiliasi temuan dengan BPK-RI;
5. rakor tindak lanjut temuan dengan BPK-RI dan satuan kerja;
6. penguatan sistem pengendalian internal;
7. pengendalian internal pelaporan keuangan;
8. pembinaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kemendikbud;
9. melaksanakan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada jenjang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B).



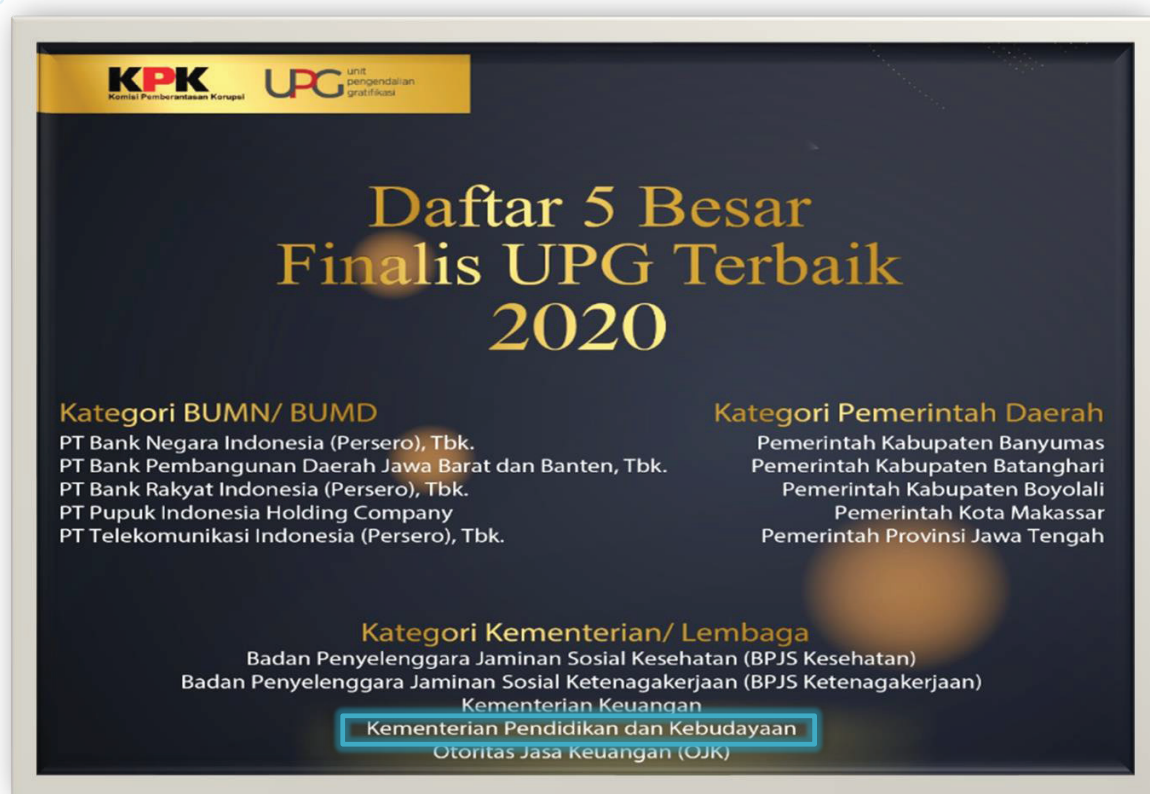
Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, antara lain:

1. melaksanakan anggaran secara akuntabel dan didukung dengan standar dan sistem akuntansi yang berlaku;
2. mengoptimalkan pelaksanaan Satuan Pengawasan Intenal (SPI) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di unit kerja;
3. memastikan semua pengeluaran anggaran didukung oleh bukti yang sah dan lengkap;
4. menyusun laporan keuangan yang didukung oleh proses akuntansi yang lazim, baik manual maupun melalui aplikasi;
5. melakukan telaah dan pemantauan/monitoring e-Rekon Laporan Keuangan;
6. memastikan telah melakukan rekonsiliasi secara rutin yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi, baik internal maupun eksternal;
7. mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas semua temuan audit BPK;
8. meningkatkan integritas, kapasitas, dan kompetensi SDM pengelola keuangan;
9. melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan, baik di pusat maupun daerah;
10. melakukan pengungkapan yang memadai dalam CaLK;
11. memastikan penyampaian laporan keuangan tepat waktu;
12. melakukan reviu laporan keuangan yang dilakukan Inspektorat Jenderal;

13. mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Monitoring Laporan Keuangan (MoLK) SIMkeu yang telah dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal yang dapat membantu para pimpinan Eselon I dan pimpinan Satker dalam memantau pelaksanaan kegiatan dan daya serap secara *online* dan *real time*, serta memudahkan untuk mengetahui Satker yang daya serapnya masih rendah dan belum melaksanakan kegiatan.

rewards!



IKSS 5.2

Indeks Efektifitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan

daerah. Dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, DAK terbagi atas dua jenis: Fisik dan Nonfisik. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai:

2020

- Target = 71,50
- Realisasi = 90,70
- Capaian = 126,85%

Renstra

- Target Akhir 2024 = 77,50
- Capaian Akhir 2024 = 117,03%

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
4. dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD;
5. tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus;
6. BOP Kesetaraan;
7. BOP Museum dan Taman Budaya.

Indeks ini untuk mengukur tingkat keefektifan pemerintah daerah dalam mengelola DAK Fisik dan Nonfisik bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan 3 dimensi, yakni:

Efektifitas Pengusulan

- Mengukur usulan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah alokasi anggaran yang diusulkan oleh Kemendikbud dalam rangka memenuhi kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pendidikan

Efektifitas Pemanfaatan Anggaran

- Mengukur pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian *output* yang ditetapkan dalam dokumen Kesepakatan Rincian Kegiatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Efektifitas Pelaporan

- Mengukur laporan pelaksanaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku

Indeks efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan, memperhitungkan persentase dari tiap dimensi (persentase efektivitas pengusulan, persentase efektivitas pemanfaatan anggaran, dan persentase efektivitas pelaporan). Metode penghitungan Indeks Efektivitas pengelolaan DAK bidang pendidikan dan kebudayaan, adalah:

$$\frac{A + B + C}{3}$$

A = Persentase efektifitas pengusulan berdasarkan persentase usulan

B = Persentase efektifitas pemanfaatan anggaran

C = Persentase efektifitas pelaporan

Pada tahun 2020 target kinerja dari indeks efektifitas pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dan kebudayaan adalah 71,50 dan telah terealisasi sebesar 90,70 dengan persentase capaian sebesar 126,85%. Ketercapaian melebihi target ini dimungkinkan karena tingginya tingkat efektifitas pengusulan, pemanfaatan anggaran dan efektifitas pelaporan yang melampaui target yang dicanangkan.



Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi DAK fisik bersama pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga terkait, antara lain Bappenas, Kemenkeu, KemenPUPR, dan Kemendagri;
2. melaksanakan koordinasi DAK non fisik dengan pemangku kepentingan terkait;
3. melaksanakan koordinasi dalam rangka mempersiapkan usulan rincian kegiatan DAK fisik bersama pemerintah daerah.

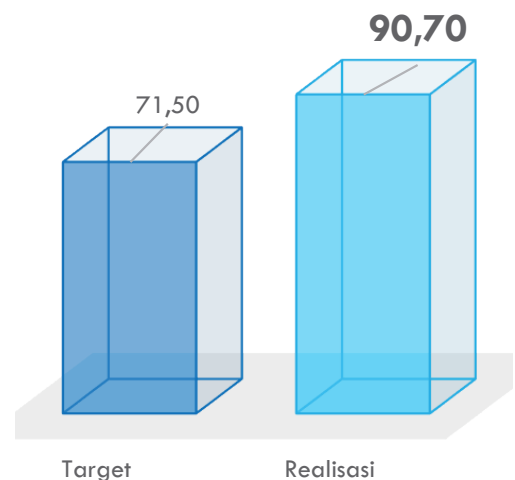


Hambatan

Hambatan/permasalahan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu:

1. kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan kesulitan dalam melakukan koordinasi dan pertemuan dengan pemerintah daerah;
2. keakuratan data dari pemerintah daerah yang belum memadai sehingga memperlambat proses penentuan target sasaran DAK;

Indeks Efektifitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020



3. masih terbatasnya kemampuan SDM perencana daerah dalam menyiapkan data dukung terkait usulan DAK.



Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut, antara lain:

1. melakukan koordinasi lebih awal dengan pihak-pihak terkait termasuk kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah;
2. melakukan verifikasi dan konfirmasi data dengan Dapodik dan dengan Dinas Pendidikan, serta bekerja sama dengan Dinas PUPR atau dinas yang menangani keciptakaryaan terkait data sarana prasarana;
3. menyelenggarakan penguatan kapasitas SDM perencana daerah secara berkala pada Pusdiklat Kemendikbud.



Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah:

1. melakukan kegiatan sinkronisasi dan koordinasi secara daring;
2. mengoptimalkan penggunaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam penentuan sasaran target DAK;
3. membuat mekanisme penilaian dengan *expert judgment*.

IKSS 5.3

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud

Indikasi keberhasilan program dan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, salah satunya adalah melalui kepuasan pemangku kepentingan berupa skor indeks *stakeholder satisfaction*. Sejalan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara

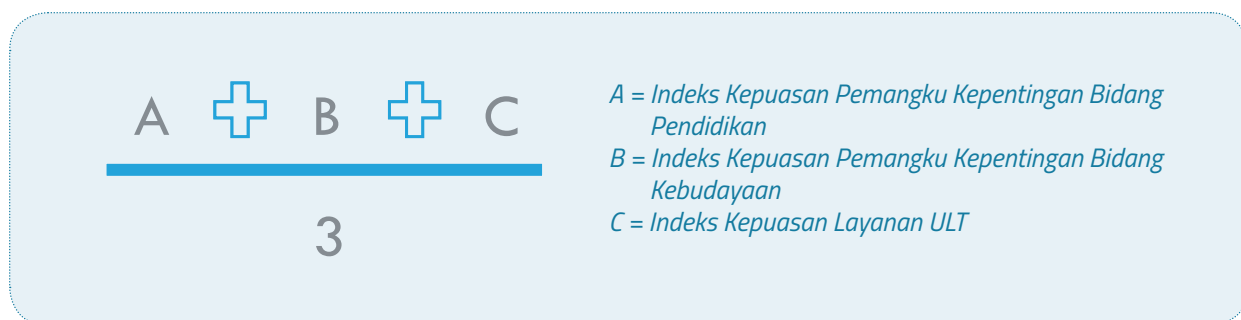
2020

• Target = 81
• Realisasi = 82,30
• Capaian = 101,60%

Renstra

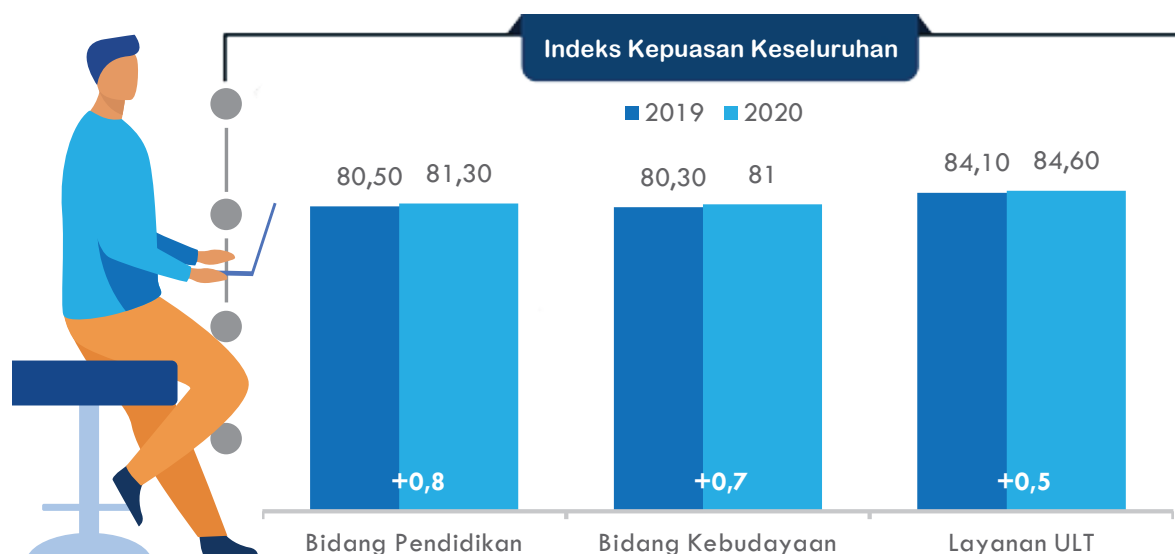
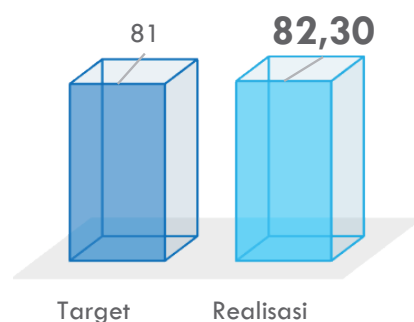
• Target Akhir 2024 = 84%
• Capaian Akhir 2024 = 96,78%

Pelayanan Publik dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun. Indeks kepuasan pemangku kepentingan merupakan rata-rata dari nilai indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan layanan ULT. Metode penghitungan indeks kepuasan pemangku kepentingan, adalah:



Capaian tahun 2020 indikator kinerja ini adalah sebesar 82,30%, lebih tinggi dari yang ditargetkan yakni 81%, atau realisasi capaian sebesar 101,60%. Peningkatan indeks kepuasan Kemdikbud terjadi di seluruh bidang baik bidang pendidikan, kebudayaan maupun layanan ULT.

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud Tahun 2020



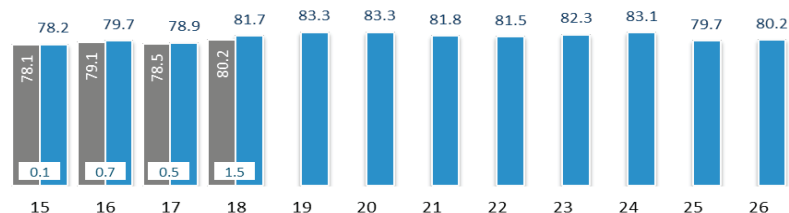
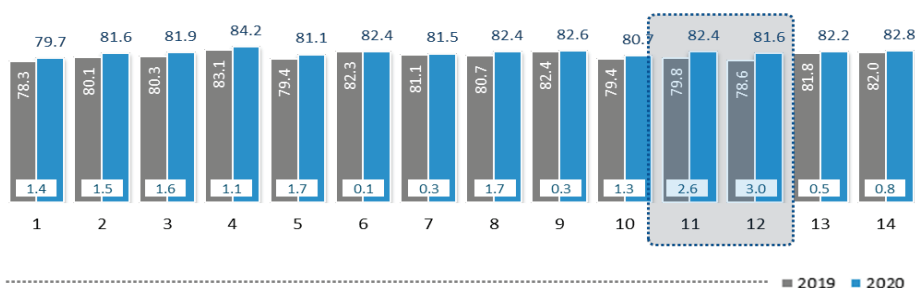
1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan

Parameter indeks kepuasan pemangku kepentingan, sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| a. Sarana dan Prasarana | n. BOS/BOP |
| b. Kurikulum | o. BIPA |
| c. Laman Rumah Belajar | p. UKBI |
| d. Penguatan Pendidikan karakter | q. Penyuluhan Bahasa Indonesia |
| e. PPDB, SNMPTN dan SBMPTN | r. KBBI |
| f. Program Indonesia Pintar | s. Beasiswa Unggulan |
| g. Buku Teks Pelajaran | t. Sertifikasi Tenaga Pendidik |
| h. Pendidikan Vokasi | u. Pangkalan Data DIKTI |
| i. Pendidikan Kecakapan Kerja | v. Pembukaan Prodi pada PT Swasta |
| j. Pendidikan Kecakapan Wirausaha | w. Registrasi Pendidik PT/Dosen |
| k. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik | x. Penilaian Angka Kredit Pendidik / Jabatan Akademik Dosen |
| l. Pengembangan Karir dan Kepangkatan Guru | y. Kampus Merdeka |
| m. Dapodik | z. Anggaran Pendidikan |

Seluruh parameter indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud bidang pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Terdapat beberapa parameter baru yang menjadi ukuran penilaian kepuasan *stakeholder* bidang pendidikan di tahun ini karena masuknya jenjang perguruan tinggi yaitu, Beasiswa Unggulan, Pangkalan Data Dikti, Pembukaan Prodi pada PT Swasta, Registrasi Dosen, Penilaian Angka Kredit Dosen, dan Kampus Merdeka.

INDEKS KEPUASAN : BERDASAR PARAMETER

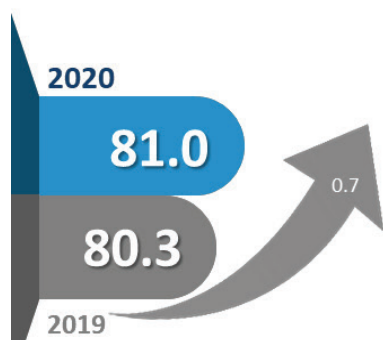


- 1 Sarana & Prasarana
- 2 Kurikulum
- 3 Laman Rumah Belajar
- 4 Penguatan & Pendidikan Karakter
- 5 PPDB, SNMPTN dan SBMPTN
- 6 Program Indonesia Pintar
- 7 Buku Teks Pelajaran
- 8 Pendidikan Vokasi
- 9 Pendidikan Kecakapan Kerja
- 10 Pendidikan Kecakapan Wirausaha
- 11 Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Pendidik
- 12 Pengembangan Karir dan Kepangkatan Guru
- 13 Dapodik
- 14 BOS/BOP
- 15 BIPA
- 16 UKBI
- 17 Penyuluhan Bahasa Indonesia
- 18 KBBI
- 19 Beasiswa Unggulan
- 20 Sertifikasi Tenaga Pendidik
- 21 Pangkalan Data Dikti
- 22 Pembukaan Prodi pada PT Swasta
- 23 Registrasi Pendidik PT/Dosen
- 24 Penilaian Angka Kredit Pendidik/Jabatan Akademik Dosen
- 25 Kampus Merdeka
- 26 Anggaran Pendidikan

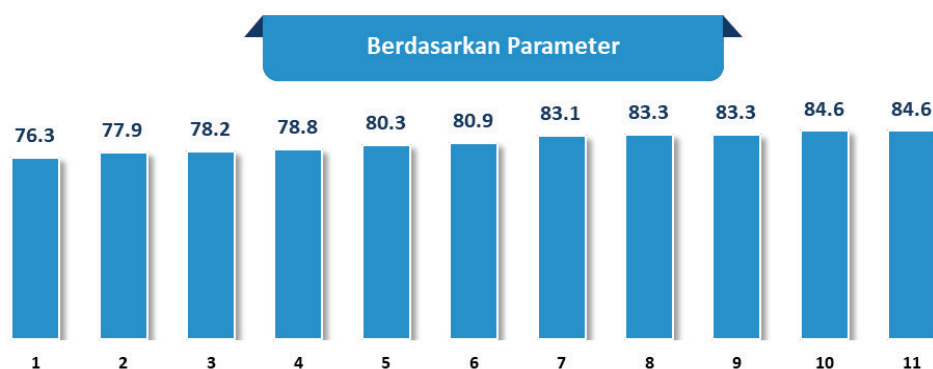
2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan

Parameter indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang kebudayaan, sebagai berikut

- | | |
|--|---|
| a. Penetapan Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Takbenda | f. GSMS (Gerakan Seniman Masuk Sekolah) |
| b. Apresiasi Pelaku Budaya | g. Pelayanan di Objek Budaya |
| c. Dinas Kebudayaan | h. Sertifikasi Tenaga Kebudayaan |
| d. Fasilitasi Bantuan Kebudayaan | i. Perfilman |
| e. Pokok Pikiran Kebudayaan | j. Bimtek Tenaga Kebudayaan |
| | k. Anggoro Kasih |



1. Penetapan Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Tak benda
2. Apresiasi Pelaku Budaya
3. Dinas Kebudayaan
4. Fasilitasi Bantuan Kebudayaan
5. Pokok Pikiran Kebudayaan
6. GSMS
7. Pelayanan di Objek Budaya
8. Sertifikasi Tenaga Kebudayaan
9. Perfilman
10. Bimtek Tenaga Kebudayaan
11. Anggoro Kasih



3. Indeks Kepuasan Layanan ULT

Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan ULT diukur melalui survei kepuasan pemangku kepentingan (*Stakeholder Satisfaction Survey - SSS*), bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan ULT. Survei ini dilaksanakan oleh pihak eksternal untuk menjamin independensi hasil survei. Parameter Survei meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

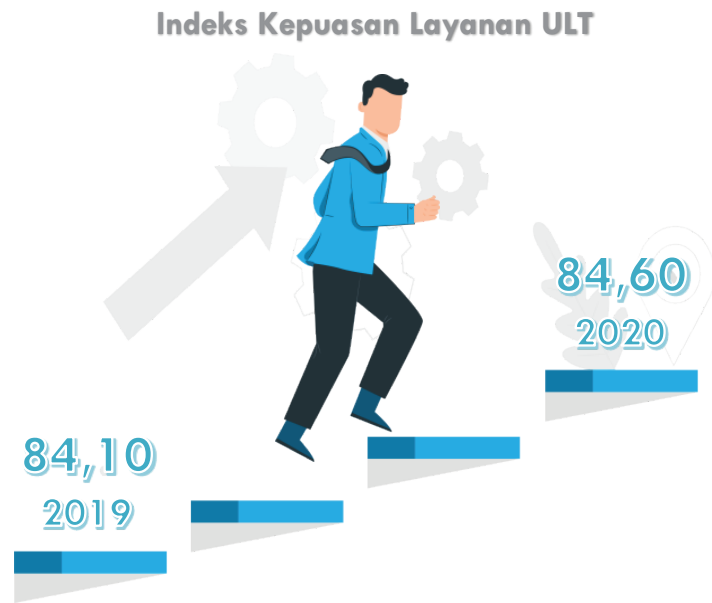
Persyaratan	• Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	• Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
Waktu Pelayanan	• Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan
Biaya/Tarif	• Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	• Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
Kompetensi Pelaksana	• Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman
Perilaku Pelaksana	• Sikap petugas dalam memberikan pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	• Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
Sarana dan Prasarana	• Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud serta tujuan dan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek)

Seluruh parameter layanan ULT perlu dipertahankan karena sudah memberikan kepuasan kepada pengunjung; namun demikian, layanan ULT tetap harus terus ditingkatkan untuk mengantisipasi harapan dan ekspektasi pengunjung yang terus berkembang. Selain itu juga perlu beradaptasi dengan layanan secara daring.

Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. publikasi program Kemendikbud untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program yang ada di Kemendikbud;
2. pembekalan Petugas Layanan Terpadu Kemdikbud baik pada ULT pusat maupun daerah;
3. penguatan automasi layanan publik dengan memperkuat layanan tidak langsung yang ada di ULT.



Hambatan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. adanya Covid-19 membuat tidak dapat dilaksanakannya layanan secara tatap muka langsung;
2. perlu peningkatan koordinasi dengan unit utama terkait untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat Kesesuaian waktu penyelesaian layanan dengan yang dijanjikan, kualitas dan kesesuaian hasil layanan ULT.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala yang hadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. pendampingan dan pembinaan ULT yang ada di daerah dilakukan secara daring;
2. layanan kepada masyarakat dilakukan secara daring.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah:

1. mengembangkan layanan ULT secara daring;
2. pembinaan dan pendampingan terhadap petugas layanan ULT;
3. publikasi program kemendikbud untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program yang ada di Kemendikbud melalui media cetak, elektronik, daring, dan media sosial.

rewards!



IKSS 5.4

Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud

Indeks Reformasi Birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat

2020

- Target = 78
- Realisasi = 74,39
- Capaian = 95,37%

Renstra

- Target Akhir 2024 = 91
- Capaian Akhir 2024 = 81,75%

pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan sidang pleno antara Ombusman, KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tanggal 30 Juni 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ke Menpan RB sebagai persyaratan penilaian indeks Reformasi Birokrasi Kementerian.

Indeks Reformasi Birokrasi pada dasarnya menggambarkan tingkat implementasi reformasi birokrasi terkait 8 (delapan) area perubahan dalam reformasi birokrasi, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik.

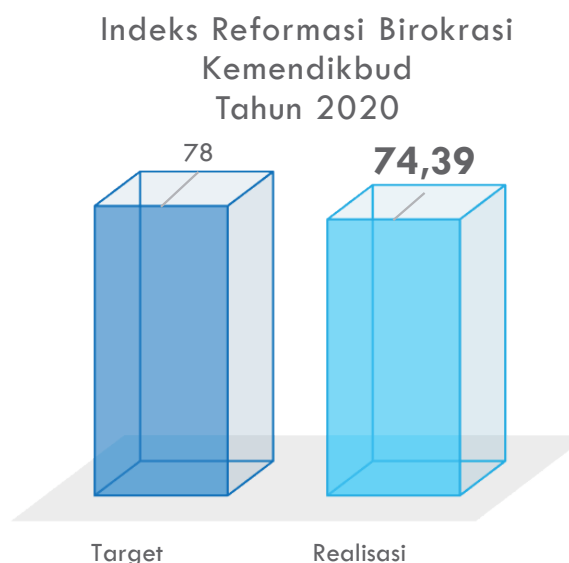
Metode penghitungan indikator kinerja tersebut, adalah sebagai berikut:

Dasar Hukum	Pengungkit	60%	Sub Komponen
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Aspek Pemenuhan	20%	<ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Perubahan (2%); b. Deregulasi Kebijakan (2%); c. Penataan Organisasi (3%); d. Penataan Tata Laksana (2,5%); e. Penataan Manajemen SDM (3%); f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%); g. Penguatan Pengawasan (2,5%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%).
	2. Aspek Hasil Antara	10%	<ul style="list-style-type: none"> a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%); b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%); c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%); d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%); e. Merit System (1%); f. ASN Profesional (1%); g. Kualitas Perencanaan (1%); h. Maturitas SPIP (1%); i. Kapabilitas APIP (1%); j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%)

Dasar Hukum	Pengungkit	60%	Sub Komponen
	3. Aspek Reform	30%	a. Manajemen Perubahan (3%); b. Deregulasi Kebijakan (3%); c. Penataan Organisasi (4,5%); d. Penataan Tata Laksana (3,75%); e. Penataan Manajemen SDM (4,5%); f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%); g. Penguatan Pengawasan (3,75%); h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%)
	Hasil	40%	
	a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10%	a. Opini BPK (3%); b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%)
	b. Kualitas Pelayanan Publik	10%	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%)
	c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10%	Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%)
	d. Kinerja Organisasi	10%	a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%)

Pada tahun 2020 target kinerja dari Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud adalah 78, dan realisasinya masih menunggu dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemen PAN dan RB. Hasil capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud masih menggunakan hasil capaian tahun 2019 sebagaimana tercantum pada gambar disamping, sehingga realisasi capaian sebesar 95,37%.

Selain itu, tingkat capaian reformasi birokrasi juga didukung oleh semakin banyaknya unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI/WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan



Melayani (WBBM). Sampai dengan tahun 2020, ada 28 Satker dengan predikat ZI-WBK serta 2 (dua) Satker dengan predikat ZI-WBK/WBBM, sebagai berikut:

No	Satker	Tahun Perolehan	Predikat
1	LPMP Jawa Tengah	2017 2020	ZI-WBK ZI-WBBM
2	P4TK BOE Malang	2017 2020	ZI-WBK ZI-WBBM
3	BPPAUD dan Dikmas Jawa Timur	2017	ZI-WBK
4	P4TK Bidang Mesin dan Teknik Industri	2018	ZI-WBK
5	LPMP Jawa Timur	2018	ZI-WBK
6	PPPAUD dan Dikmas Jawa Barat	2019	ZI-WBK
7	PPPAUD dan Dikmas Jawa Tengah	2019	ZI-WBK
8	LPMP Bali	2019	ZI-WBK
9	LPMP DKI Jakarta	2019	ZI-WBK
10	LPMP Kalimantan Barat	2019	ZI-WBK
11	LPMP Lampung	2019	ZI-WBK
12	LPMP Riau	2019	ZI-WBK
13	P4TK Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling	2019	ZI-WBK
14	Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran	2019	ZI-WBK
15	Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang	2019	ZI-WBK
16	Musesum Basoeki Abdullah	2020	ZI-WBK
17	Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta	2020	ZI-WBK
18	Politeknik Negeri Bandung	2020	ZI-WBK
19	P4TK Bidang Bangunan dan Listrik	2020	ZI-WBK
20	P4TK Bidang Bisnis dan Pariwisata	2020	ZI-WBK
21	P4TK Bidang IPA	2020	ZI-WBK
22	P4TK Bidang Matematika	2020	ZI-WBK
23	P4TK Bidang Pertanian	2020	ZI-WBK
24	P4TK Bidang Seni dan Budaya	2020	ZI-WBK
25	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	2020	ZI-WBK
26	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	2020	ZI-WBK
27	BPNB Bali	2020	ZI-WBK
28	LPMP D.I. Yogyakarta	2020	ZI-WBK
29	LPMP Jawa Barat	2020	ZI-WBK
30	LPMP Nusa Tenggara Barat	2020	ZI-WBK



Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yakni:
 - a. memberikan sosialisasi dan fasilitasi terkait peningkatan 8 (delapan) area perubahan kepada seluruh Satker Kemendikbud;
 - b. fasilitasi pelayanan prima bagi petugas pemberi layanan publik di Kemendikbud;
 - c. memberikan fasilitas komunikasi dengan Pimpinan Kementerian melalui "Jumpa Sapa Mas Menteri";
 - d. melakukan pembaharuan informasi dan data pelaksanaan reformasi birokrasi dan kampanye berupa video animasi melalui media sosial Kemendikbud (*YouTube, Instagram, dan facebook*);
 - e. melakukan penguatan agen perubahan melalui penyelenggaraan forum agen perubahan secara berkala, pelaksanaan rencana aksi agen perubahan di unit kerja terkait, dan penyusunan buku agen perubahan yang berjudul "Kisah Sukses Agen Perubahan Kemendikbud 2020" sebagai bahan sosialisasi.
2. penguatan Satker menuju ZI-WBK/WBBM, yakni
 - a. memberikan pendampingan pembangunan ZI-WBK/WBBM;
 - b. memberikan fasilitasi pengisian LKE PMPZI;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi penilaian dan pengusulan unit kerja calon ZI-WBK/WBBM.



Hambatan

Hambatan yang dialami dalam pencapaian target kinerja, yaitu:

1. belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja di Kemendikbud sehingga program dan kegiatan reformasi birokrasi menjadi kurang efektif;
2. kurang maksimalnya pemahaman pegawai terkait tugas dan fungsi organisasi maupun tugas jabatan, masih ada distorsi antara apa yang dikerjakan dengan apa yang seharusnya dikerjakan;
3. kurang optimalnya persiapan yang dilakukan terhadap pengusulan unit kerja calon ZI-WBK/WBBM;
4. terbatasnya sumber daya manusia dibanding dengan besarnya jumlah unit kerja dalam pendampingan persiapan penilaian PMPZI;

5. masih kurangnya pemahaman unit kerja terhadap sistem dan mekanisme penilaian instrumen reformasi birokrasi yang baru sehingga penilaian kurang berjalan dengan baik; dan
6. adanya pandemi sehingga menghambat kelancaran pendampingan serta penilaian unit kerja calon ZI-WBK/WBBM.

Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala, antara lain:

1. melakukan sosialisasi metode penilaian RBI secara komprehensif kepada seluruh Satker di Kemendikbud dan penyusunan *quick wins* terkait 8 (delapan) area perubahan;
2. melakukan koordinasi berkesinambungan dengan seluruh Satker Kemendikbud dan Kemen PAN dan RB sebagai instansi Pembina terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemendikbud;
3. melakukan penyusunan *timeline* program/kegiatan persiapan hingga pengusulan ZI-WBK/WBBM;
4. melakukan optimalisasi peran dan fungsi sumber daya manusia yang tersedia dengan memberdayakan sumber daya manusia yang ada di Biro Organisasi dan Laksana untuk bertugas selain tugas dan fungsinya, juga ikut bergabung dengan tim Reformasi Birokrasi;
5. melakukan pendampingan persiapan dan penilaian pembangunan ZI-WBK/WBBM oleh Kementerian PAN dan RB; dan
6. memaksimalkan waktu dan tenaga yang ada melalui pendampingan langsung ZI-WBK/WBBM yang terbatas melalui *video conference*.

Strategi

Adapun strategi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja, adalah:

1. memperkuat komitmen pimpinan dan pegawai untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap Kemendikbud, salah satunya melakukan pertemuan reguler Bersama Mendikbud melalui program 'Jumpa Sapa Mas Menteri';
2. memulai pelaksanaan PMPRB sejak awal tahun sehingga persyaratan dapat lebih komprehensif dan lengkap untuk dipenuhi;
3. melakukan pelatihan/peningkatan kompetensi Asesor Tim Penilai Internal yang dilaksanakan di Pusdiklat Pegawai;
4. memperkuat komitmen pimpinan dan pegawai serta seluruh unit kerja calon ZI-WBK/WBBM untuk memberikan yang terbaik dalam persiapan hingga pengusulan unit kerja calon ZI-WBK/WBBM;

5. memaksimalkan pendayagunaan teknologi dan sumber daya dalam pendampingan ZI-WBK/WBBM;
6. koordinasi yang intens antar unit kerja dan Kementerian PAN dan RB dalam persiapan dan pengusulan ZI-WBK/WBBM.

rewards!

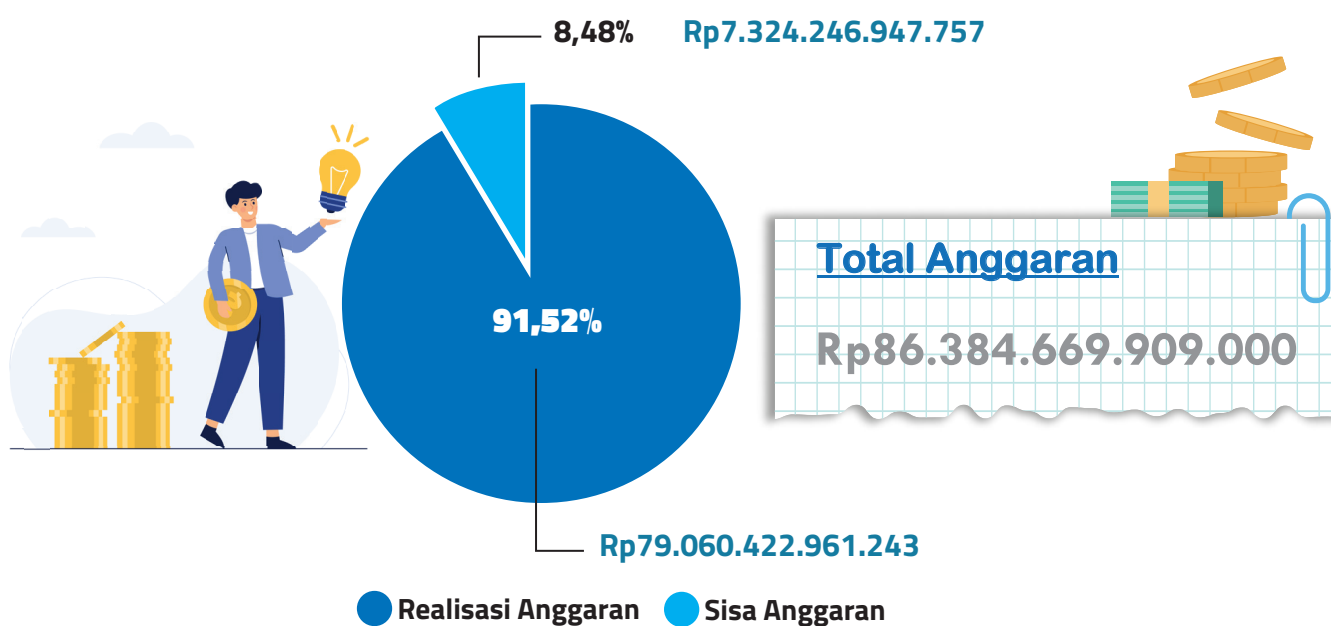
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	89.36
2	Kementerian Perdagangan	89.35
3	Kementerian Kesehatan	88.06
4	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	85.26
5	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	84.64
6	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	80.46



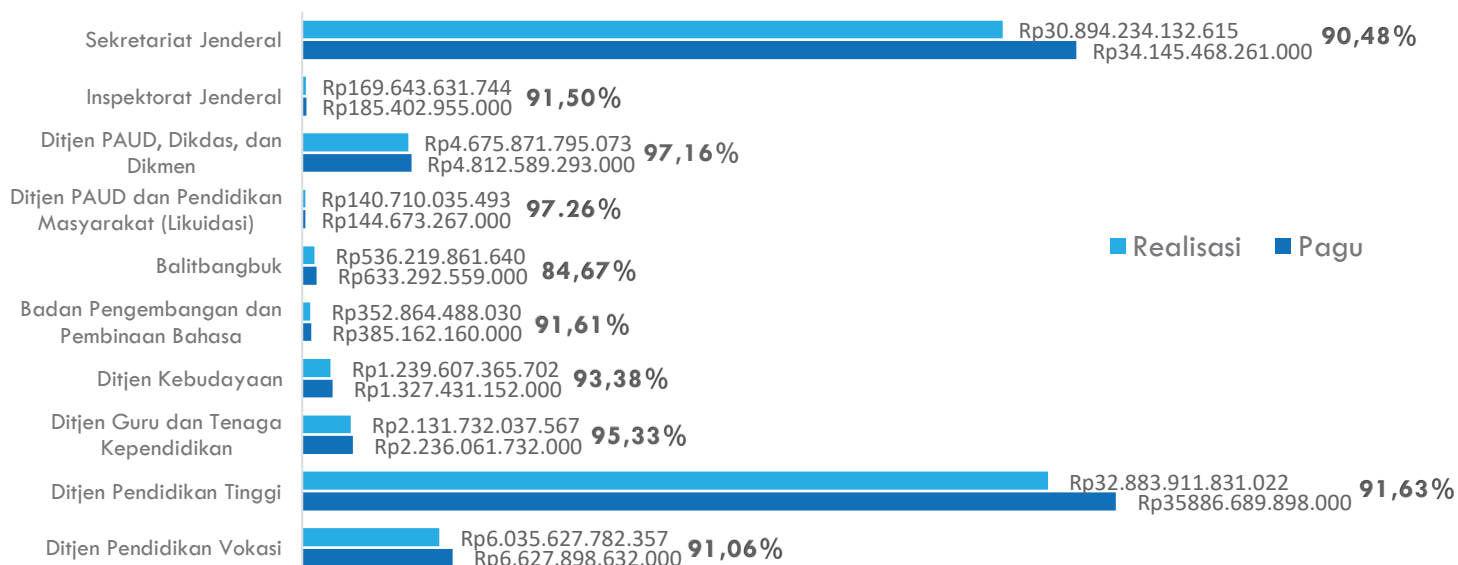
B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Kemendikbud tahun 2020 sebesar Rp86.384.669.909.000. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 5 (lima) SS dengan 26 (dua puluh enam) IKSS yang terdistribusi ke 9 (sembilan) Unit Eselon I.

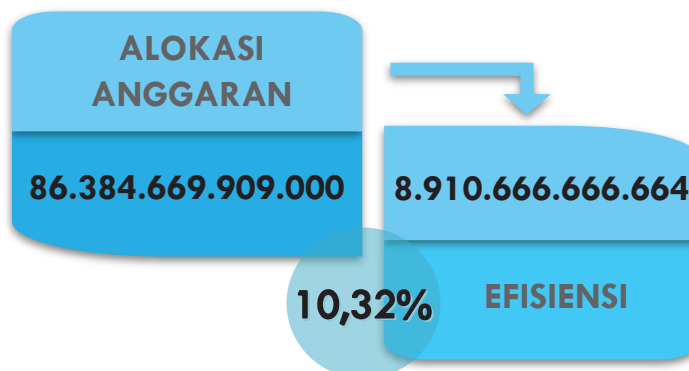
1 Capaian ANGGARAN



Capaian Realisasi Anggaran 2020



Sesuai instruksi Presiden No. 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kemendikbud telah melakukan efisiensi anggaran pada tahun 2020 sebesar 10,32% atau Rp8.910.666.666.664 dari pagu anggaran sebesar Rp86.384.669.909.000



dengan rata-rata capaian IKSS sebesar 92% dari 26 IKSS. Efisiensi tersebut dapat dilakukan dengan adanya inovasi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain, kegiatan yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi daring. Selain itu, efisiensi tersebut berasal dari efisiensi belanja barang dari sembilan program yang ada di Kemendikbud.

Disamping itu, untuk mengantisipasi pandemi Covid-19, Kemendikbud secara terus menerus melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung program pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Perpres No. 54 tahun 2020, sebagai berikut:

Restrukturisasi dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
Bantuan kuota gratis untuk mendukung pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh sebesar bagi siswa, mahasiswa, guru, dan dosen	7,2 T
Bantuan tambahan penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, tunjangan profesi dosen, dan tunjangan guru besar	1,7 T
Bantuan medis terkait COVID-19 bagi Rumah Sakit Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta	405 M
Dukungan terhadap kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) bekerjasama dengan TVRI	70 M
<ul style="list-style-type: none"> relaksasi penggunaan BOS dan BOP untuk pembayaran honor guru dan pembelajaran daring, serta perluasan cakupan penggunaan BOS Afiriasi dan BOS Kinerja baik sekolah negeri maupun sekolah swasta; dukungan anggaran atas penyusunan kurikulum dalam kondisi khusus; dukungan anggaran untuk mendukung percepatan pembangunan; platform digital untuk digunakan baik oleh siswa, mahasiswa, guru, dosen, serta industri. 	

Kemendikbud juga melakukan *crosscutting and collaborative* program untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, yakni program prioritas yang didukung oleh beberapa Unit Eselon I terkait. Beberapa program tersebut, sebagai berikut:



Program	Unit Pelaksana	Output Program	Anggaran (Rp)
Pembiayaan Pendidikan	Setjen	PIP/KIP-Sekolah	27,35 T
		KIP Kuliah (termasuk ADIK)	
		Tunjangan Profesi Guru	
		Pembinaan SILN & Bantuan Pemerintah	
	Ditjen Pauddasmen	Layanan Khusus, Pendidikan Masyarakat dan Kebencanaan	
Digitalisasi Sekolah dan Media	Setjen	Penguatan Platform Digital	2,01 T
		Bahan Belajar dan Model Media Pendidikan Digital	
		Layanan Terpadu Kemendikbud, Kehumasan dan Media	
	Ditjen Pauddasmen	Penyediaan Sarana Pendidikan	
Pembinaan Peserta Didik, Prestasi, Talenta, dan Penguatan Karakter	Setjen	Pendampingan, Advokasi dan Sosialisasi Penguatan Karakter	508, 1 M
		Peningkatan Prestasi dan Manajemen Talenta	
	Ditjen Pauddasmen	Pembinaan Peserta Didik	
Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak	Ditjen GTK	Pendidikan Guru Penggerak	2,44 T
		Sertifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan	
		Rekrutmen Guru P3K	
	Ditjen Pauddasmen	Penjaminan Mutu dan Sekolah Penggerak	
Peningkatan Kualitas Kurikulum dan AKM	Balitbang dan Perbukuan	Asesmen dan Pembelajaran	1,14 T
		Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan	
		Akreditasi dan SNP	
	Ditjen GTK	Pelatihan Kurikulum Baru untuk GTK	
	Ditjen Pauddasmen	Sosialisasi Pendampingan Implementasi Kurikulum dan Asesmen	



Program	Unit Pelaksana	Output Program	Anggaran (Rp)
Pemajuan Budaya dan Bahasa	Ditjen Kebudayaan	Penguatan Desa dan Fasilitasi Bidang Kebudayaan	983,6 M
		Pengelolaan CB dan WBTB	
		Event dan Program Publik	
		Apresiasi dan Peningkatan SDM dan Lembaga Kebudayaan	
		Layanan Kepercayaan dan Masyarakat Adat	
	Badan Bahasa	GLN dan Penerjemahan	
		Penguatan Bahasa	

BAB 4

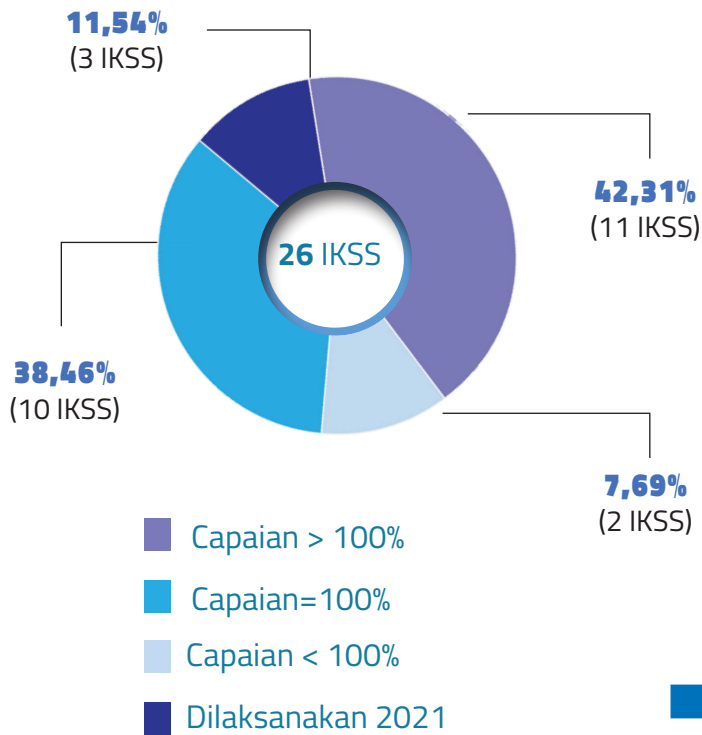
PENUTUP

- Kesimpulan
- Permasalahan
- Langkah Kerja ke Depan

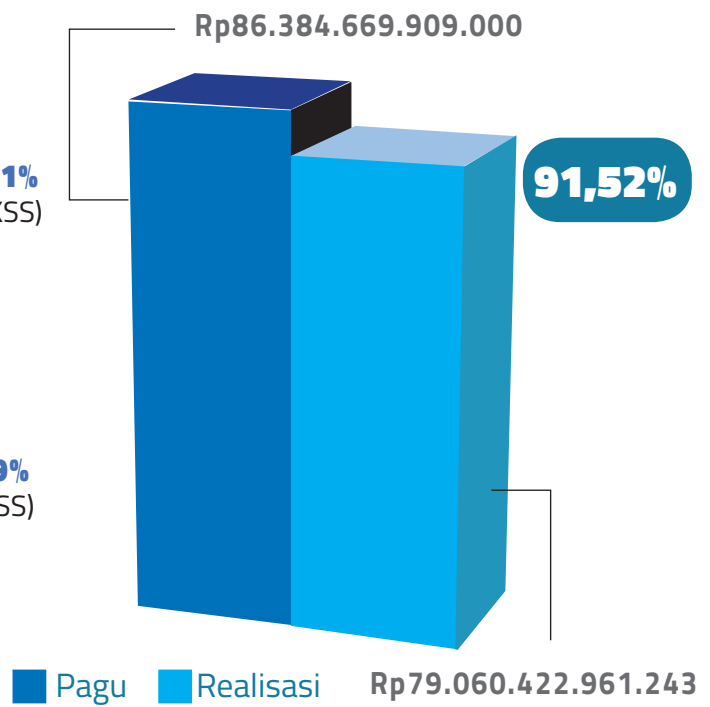
Sesuai target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kemendikbud 2020-2024, secara umum target yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai, dengan ringkasan sebagai berikut:

Capaian Kinerja

92%



Kinerja Keuangan





PERMASALAHAN

1. adanya pandemi COVID-19;
2. masih rendahnya angka partisipasi PAUD dan Pendidikan Tinggi;
3. sarana dan prasarana satuan pendidikan serta infrastruktur pendukung masih kurang memadai termasuk yang diakibatkan oleh bencana;
4. belum optimalnya hasil pembelajaran serta ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis;
5. pedagogi dan efektivitas pengajaran yang masih perlu diperbaiki;
6. tata kelola pendidikan masih belum mendukung hasil pembelajaran peserta didik;
7. kolaborasi dan kerja sama antara satuan pendidikan dan dunia kerja masih belum optimal;
8. kurangnya kesadaran akan pentingnya pembangunan kebudayaan serta kepedulian terhadap bahasa daerah.



LANGKAH KERJA KE DEPAN

1. peningkatan inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran melalui media daring;
2. peningkatan daya tampung pemerataan akses PAUD dan pendidikan tinggi;
3. peningkatan sarana prasara satuan pendidikan dan infrastruktur pendukung, serta pemanfaatan teknologi;
4. penguatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik;
5. penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen, untuk peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan;
6. peningkatan kemampuan kepemimpinan dan peningkatan kompetensi pendidik pada satuan pendidikan;
7. penguatan tata kelola melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaaan pendidikan melalui kolaborasi antar elemen masyarakat;
8. penguatan budaya, bahasa, dan pendidikan karakter.



LAMPIRAN

- PK Kemendikbud 2020
- Pengukuran Kinerja 2020
- Pernyataan Telah Direviu



Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADIEM ANWAR MAKARIM
Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Juni 2020
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

NADIEM ANWAR MAKARIM

TARGET KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja
1	2	3	4
SS1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	IKSS1.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	40.20
		IKSS1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	105.97
		IKSS1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	92.46
		IKSS1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	86.18
		IKSS1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	33.47
SS2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	IKSS2.1 Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	3
		IKSS2.2 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	57.2
		IKSS2.3 Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	26.5
		IKSS2.4 Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	-
		IKSS2.5 Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	-
		IKSS2.6 Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	-
		IKSS2.7 Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	47.10
		IKSS2.8 Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	64.77
		IKSS2.9 Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	47.43
		IKSS2.10 Persentase guru-guru kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri	12
		IKSS2.11 Persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industry	69.0
SS3	Menguatnya karakter peserta didik	IKSS3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	30
		IKSS3.2 Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila	10
		IKSS3.3 Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	10

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja
1	2	3	4
SS4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	IKSS4.1 Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	510
		IKSS4.2 Jumlah penutur muda bahasa daerah	34,000
		IKSS4.3 Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,5
SS5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	IKSS5.1 Opini laporan keuangan Kemendikbud	WTP
		IKSS5.2 Indeks efektifitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan kebudayaan	71.5
		IKSS5.3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud	81
		IKSS5.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	78

PROGRAM DAN ANGGARAN

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	22.733.228.855.000
2	Guru dan Tenaga Kependidikan	2.571.952.903.000
3	Pelestarian Budaya	1.552.031.546.000
4	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.493.687.935.000
5	Pendidikan PAUD, Dasar dan Menengah	11.791.300.161.000
6	Pendidikan Tinggi	32.714.057.894.000
7	Pendidikan Vokasi	6.542.667.374.000
8	Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	683.792.559.000
9	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	185.402.955.000
10	Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra serta Perbukuan	509.339.108.000

Jakarta, Juni 2020
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,


NADIEM ANWAR MAKARIM

PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 Tahun	40,20	37,52	93,33
		2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Sederajat	105,97	106,32	100,33
		3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Sederajat	92,46	92,06	99,57
		4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ SMLB/Sederajat	86,18	84,53	98,08
		5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	33,47	30,85	92,17
2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan di Seluruh Jenjang	1 Nilai Rata-Rata Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (5-6 Tahun)	3	3	100
		2 Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	57,20	75,80	132,51
		3 Persentase Siswa dengan Nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) Memenuhi Kompetensi Minimum	26,50	17,43	65,77
		4 Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Membaca	2020 Tidak Ditargetkan	2020 Tidak Ditargetkan	2020 Tidak Ditargetkan
		5 Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Matematika	2020 Tidak Ditargetkan	2020 Tidak Ditargetkan	2020 Tidak Ditargetkan
		6 Nilai Rata-Rata Hasil PISA: Sains	2020 Tidak Ditargetkan	2020 Tidak Ditargetkan	2020 Tidak Ditargetkan
		7 Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam 1 Tahun Setelah Kelulusan	47,10	40,46	85,90
		8 Persentase Lulusan PT yang Langsung Bekerja dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan	64,77	75,40	116,41
		9 Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Profesional	47,43	46,01	97,00
		10 Persentase Guru-Guru Kejuruan SMK yang Mempunyai Pengalaman Kerja di Industri atau Sertifikasi Kompetensi yang Diakui oleh Industri	12	12,31	102,58
		11 Persentase Dosen yang Memiliki Pengalaman Bekerja atau Tersertifikasi di Industri	69	68,68	99,54

PENGUKURAN KINERJA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Realisasi	%	
3	Menguatnya Karakter Peserta Didik	1	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Lingkungan Kondusif dalam Pembangunan Karakter	30	36,73	122,43
		2	Persentase Tingkat Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila	10	12,78	127,8
		3	Persentase Tingkat Pemahaman Konsep Merdeka Belajar	10	10,60	106
4	Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1	Rata-Rata Skor Kemahiran Berbahasa Indonesia	510	551	108,04
		2	Jumlah Penutur Muda Bahasa Daerah	34.000	25.651	75,44
		3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	55,50	55,91	100,74
5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbud	WTP	WTP	100
		2	Indeks Efektifitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	71,50	90,70	126,85
		3	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud	81	82,30	101,60
		4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	78	74,39	95,37

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 25 Februari 2021
Inspektur Jenderal Kemendikbud



Chatarina Muliana
NIP197211191996032002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10260